



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
DI KELURAHAN ROA MALAKA KECAMATAN TAMBORA
JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

**Yuli Susilowati
0706212283**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
DESEMBER, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
DI KELURAHAN ROA MALAKA KECAMATAN TAMBORA
JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Negara

**Yuli Susilowati
0706212283**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
DESEMBER 2011**

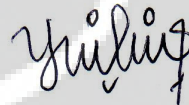
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Yuli Susilowati

NPM : 0706212283

Tanda tangan :



Tanggal : 27 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Yuli Susilowati
NPM : 0706212283
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka
Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Sri Susilih, M.Si (.....)

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, M.A. (.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Eva Andayani, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat" ini. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku Sekretaris Program Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus sebagai Penguji ahli yang telah memberikan masukan bagi penulis.
5. Dra. Rainingsih Hardjo, M.A selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi dan sekaligus sebagai Ketua Sidang Skripsi penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis.
6. Dra. Sri Susilih, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi yang dengan kesabarannya memberikan arahan, saran, pemikiran dan kesediaan waktunya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Dra. Eva Andayani, M.Si selaku Sekretaris Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap dosen Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

9. Denny Sanjaya selaku konsultan spesialis pengelola pengaduan masyarakat pada Konsultan Manajemen Pusat PNPM Mandiri Perkotaan atas bantuannya kepada penulis.
10. Firman Yoga selaku Koordinator Kota Jakarta Barat PNPM Mandiri Perkotaan atas kesediaan waktunya memeberikan informasi kepada penulis.
11. Yusri Abdillah selaku relawan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka dan Sukiman selaku Koordinator TPP RW 03 Kelurahan Roa Malaka beserta seluruh narasumber dalam penelitian ini atas kesediaan waktunya berbagi waktu dengan penulis.
12. Keluargaku tercinta: Papi, mami, kakak-kakak ku semua dan adikku, tanteku, mertuaku, suamiku serta 'bidadari' kecilku (Kirana Syafira Filia Gito) atas doa, kasih sayang, dukungan serta kesabarannya dalam menunggu anak, adik, menantu dan istri tercintanya ini untuk lulus.
13. Sahabat-sahabatku yang mudah-mudahan dapat lulus bareng, Erna, Runi, Tia, yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, semangat, masukan, dukungan dan bantuan-bantuannya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun kehadirannya tetap memberikan kontribusi bagi penulis.

Mengingat inilah karya tulis ilmiah pertama yang disusun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Depok, 11 Januari 2012

Yuli Susilowati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Susilowati
NPM : 0706212283
Program Studi : Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Desember 2011



(Yuli Susilowati)

ABSTRAK

Nama : Yuli Susilowati
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan.

Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

Kata kunci : PNPM Mandiri Perkotaan, kebijakan publik, implementasi, pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Name : Yuli Susilowati
Study Program : Public Administration
Title : Implementation of National Community Empowerment Program (PNPM) at Urban Village in Roa Malaka District in West Jakarta.

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study. The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program.

Key words: PNPM Urban, public policy, implementation, community empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Signifikasi Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
2.1. Tinjauan Pustaka	12
2.2. Kerangka Pemikiran.....	14
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.2.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik	16
2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.4. Model Implementasi	20
2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2. Jenis Penelitian	33
3.2.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian	33
3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian	33
3.2.3. Berdasarkan Dimensi Waktu	33
3.2.4. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Informan Penelitian.....	35
3.6. Pembatasan Penelitian	36
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN	37
4.1. Kondisi Umum.....	37
4.2. Gambaran Umum	39

4.2.1. Pengertian PNPM Mandiri	39
4.2.2. Program-Program PNPM Mandiri	40
4.2.3. Tujuan Umum dan Khusus	42
4.2.4. Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri	43
4.2.5. Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan	44
4.2.6. Siklus Tahapan PNPM Mandiri Perkotaan	49

**BAB V ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERKOTAAN DI KELURAHAN ROA MALAKA
KECAMATAN TAMBORA JAKARTA BARAT.....**

5.1. Permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan	51
5.2. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan	52
5.2.1. Sosialisasi	52
5.2.2. Kelembagaan	56
5.2.3. Sumberdaya	64
5.2.4. Koordinasi	81

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan	83
6.2. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA

85

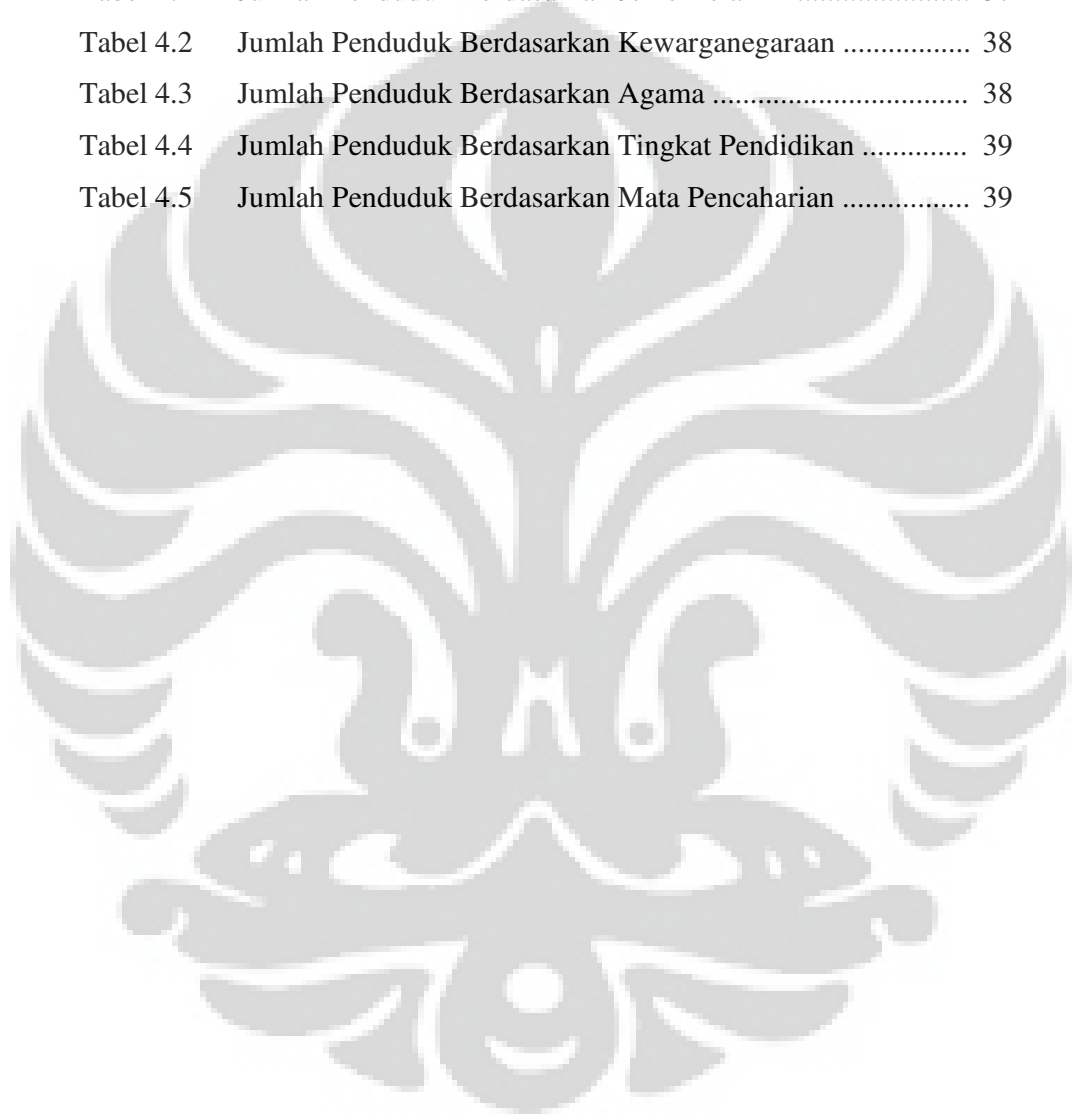
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

89

LAMPIRAN

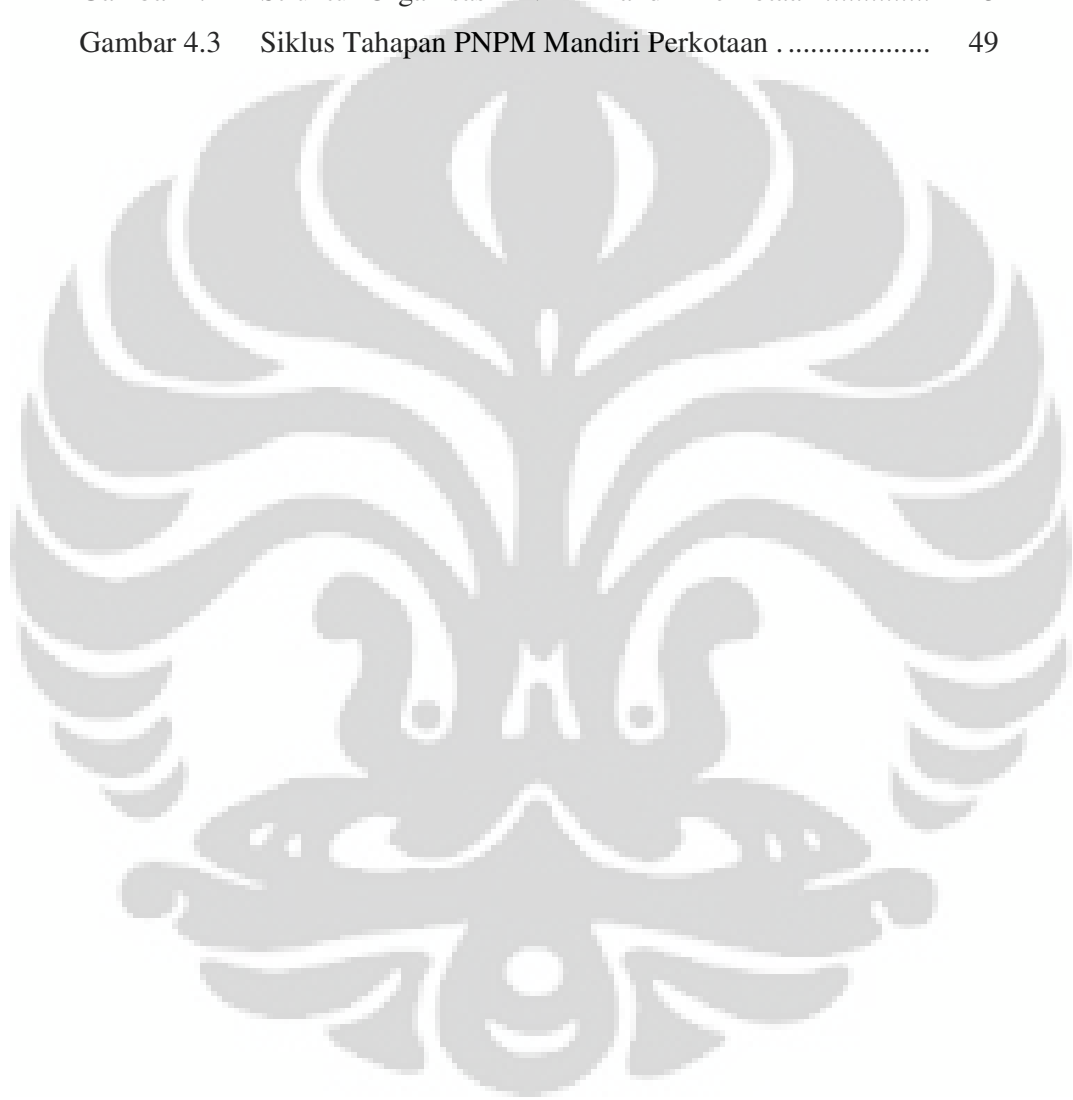
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta	2
Tabel 1.2	Rekap Progres SIM Pemberdayaan Masyarakat	6
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan	38
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	38
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan	19
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan	24
Gambar 2.3	Tahapan Proses Pemberdayaan	30
Gambar 4.1	Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan	45
Gambar 4.3	Siklus Tahapan PNPM Mandiri Perkotaan	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Hasil wawancara penulis dengan narasumber	90
Lampiran 2	: Hasil Dokumentasi Studi Lapangan Penulis	113
Lampiran 2	: Hasil Pemetaan Swadaya	114
Lampiran 3	: PJM Pronangkis	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara adalah kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya kunci yang di butuhkan untuk menyelenggarakan hidupnya secara layak.

Strategi pembangunan yang baik diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan agar tidak berlarut-larut, salah satunya adalah melalui perbaikan ekonomi yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tetapi pada kenyataannya problem kemiskinan dan kesenjangan sosial secara mendasar belum mendapatkan solusi yang tepat sehingga masyarakat miskin belum dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Memahami dan mengatasi permasalahan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pandangan parsial saja. Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan memerlukan pendekatan yang tepat yang merupakan satu kesatuan serta komprehensif. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat yang tergolong kelompok miskin agar memiliki kemampuan, kemandirian dan keswadayaan sehingga mampu melepaskan diri dari kemiskinan.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia secara fungsional merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai kota terbesar dan terluas di Indonesia, dengan luas $\pm 740,29$ km², dan jumlah penduduk ± 12 juta jiwa pada siang hari dan ± 8 juta jiwa pada malam hari,

tentu DKI Jakarta tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia lainnya bahkan juga permasalahan kota-kota di seluruh dunia. Permasalahan kemiskinan dapat memicu tingginya tingkat kriminalitas dan konflik sosial, sehingga diperlukan peranan pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Dampak kemiskinan yang paling dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah adalah kenaikan harga BBM yang berimbas kepada kenaikan sejumlah bahan pokok, biaya transportasi, pelayanan kesehatan dengan mahalnya obat-obatan dan masalah sosial lainnya, seperti PHK yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan sehingga banyak terjadi pengangguran serta meluasnya sektor pekerjaan informal yang mau tidak mau dirasakan oleh masyarakat kecil.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DKI Jakarta yang sebanyak \pm 8,5 juta jiwa pada akhir Juli 2010, 3,48% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Periode Maret 2010, penduduk miskin di Jakarta berjumlah 312,18 ribu jiwa. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 323,17 ribu jiwa (3,62%) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 10,99 ribu jiwa. Penurunan ini tentu menunjukkan upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk menekan angka kemiskinan cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Bulan : Juli 2010

Wilayah	WNI			WNA			Jumlah
	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	
Jakarta Pusat	502.464	418.170	920.634	189	144	333	920.967
Jakarta Utara	776.656	645.203	1.421.859	269	240	509	1.422.368
Jakarta Barat	868.863	765.385	1.634.238	334	302	636	1.634.874
Jakarta Selatan	1.061.953	831.480	1.893.433	407	250	657	1.894.090
Jakarta Timur	1.428.590	1.202.013	2.630.603	124	109	233	2.630.836
Kep. Seribu	11.478	10.496	21.974	0	0	0	21.974
TOTAL	4.649.994	3.872.747	8.522.741	1.323	1.045	2.368	8.525.109

Sumber : Biro Pusat Statistik DKI Jakarta Tahun 2010

Kemiskinan bukan hanya sekadar persoalan jumlah dan persentase, melainkan menyangkut dimensi lain yang juga perlu diperhatikan, diantaranya, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan itu sendiri. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan minuman dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi bukan hanya harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Pada periode Maret 2009-Maret 2010, indeks kedalaman kemiskinan turun dari 0,57 menjadi 0,45. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,14 menjadi 0,11 pada periode yang sama (BPS DKI Jakarta bulan Juli 2010)

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakatnya dalam mencari pendapatan yang lebih baik selain dari sektor formal. Hal tersebut dikarenakan masyarakatnya tidak memiliki modal financial yang cukup, tidak memiliki keahlian yang dapat dikembangkan, tidak tersedianya fasilitas yang dibutuhkan dan yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah setempat yang belum di dapatkan.

Pemerintah tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) mengeluarkan suatu program yang menitikberatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Program ini mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri serta tujuan khususnya untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

PNPM Mandiri dikelola langsung oleh pemerintah setempat berdasarkan SK Menkokesra No. 25 /KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. PNPM Mandiri Perkotaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat dipedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya,

Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, terdapat strategi, prinsip dasar, pendekatan dan dasar hukum yang perlu menjadi acuan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi dari PNPM Mandiri terdiri dari Strategi Dasar dan Strategi Operasional. Strategi Dasar menitikberatkan antara lain pada meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, sedangkan Strategi Operasional menitikberatkan antara lain kepada pengoptimalan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat serta menguatkan peran masyarakat sebagai pengelola program yang terdapat di wilayahnya.

Prinsip dasar PNPM Mandiri menekankan pada pembangunan yang bertumpu pada manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan dan sederhana.

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri menurut Pedoman Umum PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya, antara lain berupa peninggian jalan MHT/setapak, pembuatan tutup got, pengerukan lumpur, pelatihan-pelatihan berupa tata boga, pelatihan tehnik bengkel dan lain-lain.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs atau *Millenium Development Goals*.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Dasar Hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan riil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Propinsi DKI Jakarta memiliki 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten dengan jumlah kecamatan sebanyak 44 Kecamatan, Kecamatan Tambora merupakan

kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di propinsi DKI Jakarta. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar (540,01 Ha) kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 259.952 jiwa.

Kecamatan Tambora memiliki 11 kelurahan dengan rata-rata jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data di atas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada kecamatan Tambora, dimana selanjutnya peneliti lebih memfokuskan dengan mencari kelurahan di Kecamatan Tambora dengan cara membandingkan kelurahan mana yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pelaksanaannya PNPM Mandiri sedikit mengalami kendala. Menurut data internal dari Koordinator Kota Jakarta Barat Bapak Firman, Kecamatan Tambora khususnya Kelurahan Roa Malaka menduduki peringkat terendah dalam hal rendahnya partisipasi masyarakatnya sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Rendahnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Roa Malaka dikarenakan para warganya kurang berminat untuk menjadi relawan PNPM Mandiri sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan PNPM Mandiri yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2009 tetapi baru bisa dilaksanakan pada tahun 2010. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
REKAP PROGRES SIM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TH 2010
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI PERKOTAAN
(PNPM MP) KOTA JAKARTA BARAT

No	Kecamatan	Kelurahan	Jml Peserta	Jml Peserta Perempuan	Jml Peserta Mskn
1	TAMBORA	TANAH SEREAL	1450	161	565
2	GROGOLPETAMBURAN	JELAMBAR BARU	1364	359	1091
3	GROGOLPETAMBURAN	WIJAYA KUSUMA	1358	359	1086
4	TAMBORA	DURI UTARA	1142	189	804
5	CENKARENG	DURI KOSAMBI	960	132	768
6	PALMERAH	KEMANGGISAN	920	273	400
7	PALMERAH	SLIPI	912	233	730
8	PALMERAH	JATI PULO	844	195	675
9	PALMERAH	PALMERAH	833	174	666
10	KEMBANGAN	SRENGSENG	329	166	263
11	KEBONJERUK	DURI KEPA	326	129	281
12	KEBONJERUK	KEDOYA UTARA	322	121	276
13	KEBONJERUK	KEBON JERUK	311	121	270

14	KEBONJERUK	KEDOYA SELATAN	311	118	265
15	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	303	122	263
16	KEBONJERUK	SUKABUMI SELATAN	303	109	260
17	KEBONJERUK	SUKABUMI UTARA	302	120	259
18	KEBONJERUK	KELAPA DUA	298	108	255
19	TAMBORA	DURI SELATAN	204	90	167
20	TAMBORA	KREDANG	203	66	166
21	TAMBORA	KALIANYAR	202	69	169
22	TAMBORA	ANGKE	191	70	154
23	PALMERAH	KOTA BAMBU UTARA	187	26	151
24	KALIDERES	KALIDERES	185	59	145
25	KALIDERES	TEGAL ALUR	183	57	143
26	TAMBORA	TAMBORA	183	64	145
27	KALIDERES	KAMAL	181	28	139
28	TAMBORA	JEMBATAN BESI	180	57	143
29	TAMBORA	PEKOJAN	171	69	133
30	CENKARENG	CENKARENG BARAT	162	61	128
31	TAMBORA	JEMBATAN LIMA	162	60	126
32	KALIDERES	SEMANAN	160	40	124
33	KALIDERES	PEGADUNGAN	158	40	119
34	GROGOLPETAMBURAN	TANJUNG DUREN SELATAN	147	60	114
35	GROGOLPETAMBURAN	TOMANG	140	60	48
36	GROGOLPETAMBURAN	TANJUNG DUREN UTARA	136	38	103
37	TAMANSARI	TAMAN SARI	133	45	97
38	PALMERAH	KOTABAMBU SELATAN	133	55	101
39	TAMANSARI	KRUKUT	124	33	87
40	TAMANSARI	PINANGSIA	124	43	96
41	TAMANSARI	TANGKI	124	50	90
42	KEMBANGAN	KEMBANGAN SELATAN	120	45	65
43	KEMBANGAN	MERUYA UTARA	120	45	59
44	TAMANSARI	MAPHAR	119	53	87
45	GROGOLPETAMBURAN	GROGOL	119	50	86
46	TAMANSARI	KEAGUNGAN	113	50	77
47	CENKARENG	RAWA BUAYA	110	50	68
48	TAMANSARI	MANGGA BESAR	103	35	69
49	CENKARENG	KEDAUNG KALI ANGKE	102	40	57
50	KEMBANGAN	KEMBANGAN UTARA	102	40	73
51	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	102	45	75
52	CENKARENG	KAPUK	97	35	73
53	KEMBANGAN	JOGLO	97	17	71
54	CENKARENG	CENKARENG TIMUR	96	35	71
55	TAMANSARI	GLODOK	95	33	67
56	TAMBORA	ROA MALAKA	92	25	60

Sumber : Data Internal Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kota Jakarta Barat

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa indikator pengukuran dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan program tersebut dengan minimal 40% kehadiran peserta miskin dalam sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan. Keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan program dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan target utama sehingga diharapkan kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam membangun wilayahnya.

Kelurahan Roa Malaka mempunyai luas wilayah 53,1 Ha terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk di Kelurahan Roa Malaka sebanyak 5242 jiwa yang terdiri dari Kepala Keluarga sebanyak 989 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 2709 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2533 jiwa. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka hanya dilaksanakan di RW 3. Hal tersebut disebabkan karena pada RW 1 dan RW 2 tidak terdapat penduduk tetap dan hanya berupa perkantoran dan pergudangan sehingga menyulitkan untuk mencari relawan yang akan melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut.

Wilayah Kelurahan Roa Malaka berbatasan langsung dengan rel kereta api disebelah utara, Kali Jelakeng kelurahan Pekojan disebelah barat, Jalan Perniagaan disebelah selatan dan kali besar barat kecamatan Tamansari disebelah timurnya. Masyarakat Kelurahan Roa Malaka bervariasi dalam mencari mata pencaharian, namun sebagian besar pekerjaan yang digeluti berpusat pada usaha swasta/mandiri dan buruh. Hal ini berhubungan dengan banyaknya peluang usaha perniagaan di sekitar wilayah Kelurahan Roa Malaka. Masyarakatnya berupah rendah, rata-rata di bawah Upah Minimum Regional, sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat sangat lamban. (Sumber data: laporan bulanan Kelurahan Roa Malaka bulan Juli – Desember 2009).

1.2. Pokok Permasalahan

Pelaksanaan PNPM Mandiri yang selama ini dilaksanakan di seluruh kelurahan khususnya di Kelurahan Roa Malaka belum berjalan secara

optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sehingga mengakibatkan program ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Rendahnya kepedulian masyarakat ini tidak hanya berupa partisipasi melalui tenaganya tetapi juga melalui swadaya yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini. Masyarakat sekitar lebih banyak hanya menjadi “penonton” dibanding terlibat di dalamnya. PNPM Mandiri ini sudah berjalan sejak tahun 2009 dan dalam perkembangannya, permasalahan yang dialami Kelurahan Roa Malaka hampir sama dengan yang terjadi di kelurahan lain.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan peneliti adalah bagaimana implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan penelitian ini dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu

1. Kegunaan akademis, yaitu kegunaan penelitian sebagai suatu sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan analisis Pelaksanaan Kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini juga berusaha untuk menghasilkan suatu teori baru dalam ilmu administrasi negara mengenai implementasi dalam pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri tersebut dan hambatan-hambatannya. Dengan diketahuinya implementasi kebijakan tersebut maka diharapkan pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri tersebut akan lebih baik di masa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di

tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk merumuskan suatu formulasi kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan PNPM sehingga tujuan yang dapat diharapkan tercapai.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mendapat gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan tinjauan pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, sedangkan kerangka teori yaitu sejumlah konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian disusun oleh peneliti sebagai dasar acuan kerja dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik penarikan sampel, dan teknik pengolahan dan analisis data yang diperlukan untuk mendukung pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian dan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

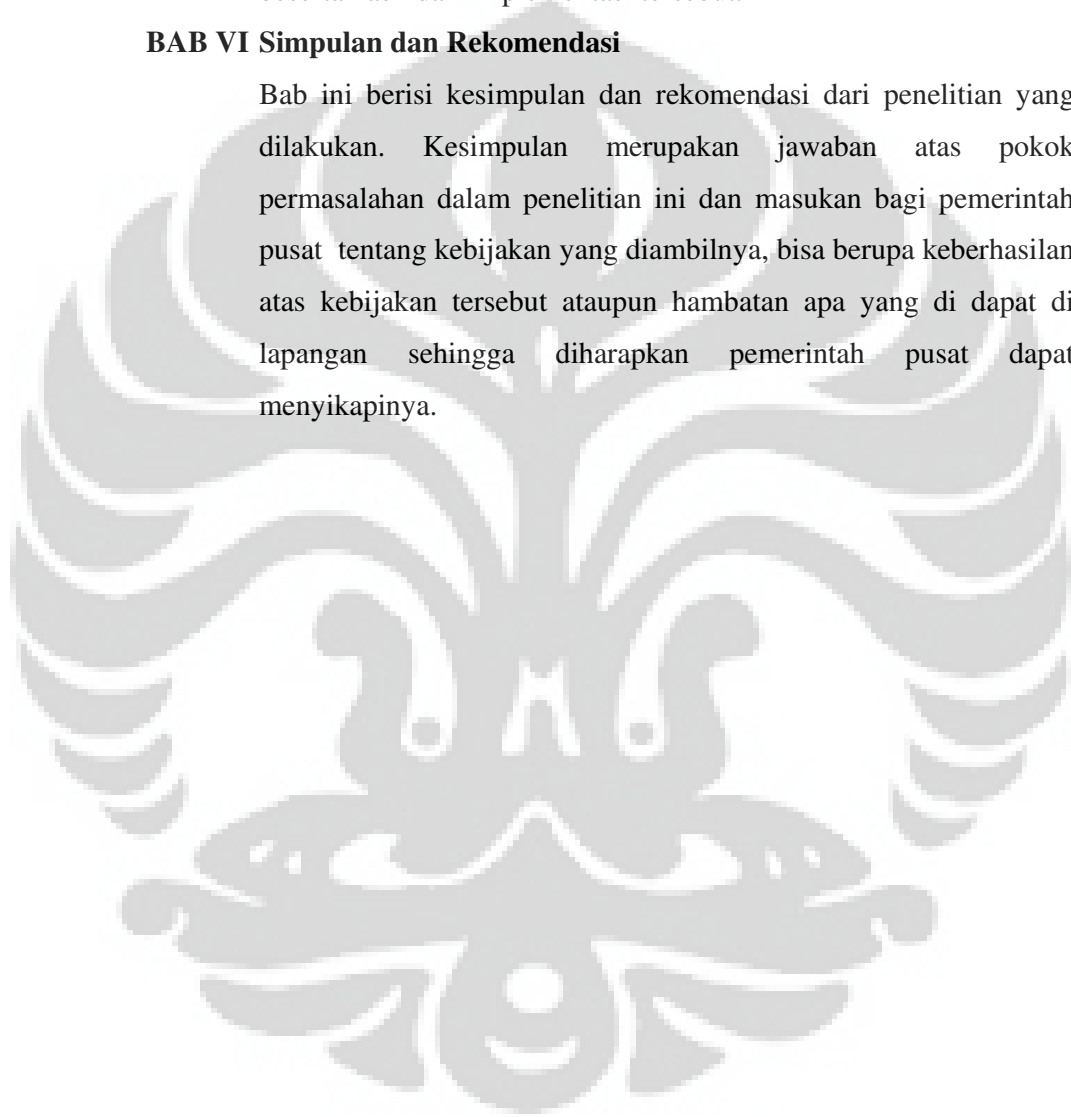
Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian mulai dari profil kelurahan tersebut sampai gambaran umum PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

BAB V Analisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Bab ini membahas tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat beserta hasil dari implementasi tersebut.

BAB VI Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dan masukan bagi pemerintah pusat tentang kebijakan yang diambilnya, bisa berupa keberhasilan atas kebijakan tersebut ataupun hambatan apa yang di dapat di lapangan sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat menyikapinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti berusaha untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Adapun perbandingan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti mencoba melakukan perbandingan dengan melihat dari metode penelitian yang digunakan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Bambang Bayuaji Jurusan Administrasi Negara dengan judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terkait Dengan Implementasi Kebijakan di Propinsi DKI Jakarta (Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara)’. Dalam penelitiannya Bambang Bayuaji mencoba mencari tahu bagaimana proses implementasi kebijakan dan dengan menggunakan teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu juga menggunakan pendekatan penelitian positivis dan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa pada awalnya pelaksanaan PPMK ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi setelah berjalan beberapa lama pelaksanaan PPMK ini mengalami kemunduran dan sudah tidak efektif lagi pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan tidak tersedianya sumber daya yang cukup untuk melaksanakan PPMK sehingga sangat menghambat dalam hal pelaksanaannya.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kiki Pranowo, Jurusan Administrasi Negara dengan judul skripsi “ Eksternalitas Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) bagi Masyarakat DKI Jakarta (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat)” . Dalam penelitiannya, peneliti berusaha mencari tahu

apakah hasil pelaksanaan PPMK telah memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh Pemda DKI Jakarta atau tidak serta dampak yang ditimbulkan baik secara umum maupun khusus. Teori yang digunakan yaitu *bottom up* dengan upaya untuk menciptakan *social bettering*. Hal ini dilakukan pada landasan pemikiran bahwa paradigma pembangunan *bottom up* akan berhasil apabila *empowering* juga berhasil. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan waktu penelitian secara *cross sectional*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PPMK telah memberikan manfaat sesuai dengan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan tujuan yang dibuat dalam masing-masing bina telah tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi ada dampak yang ditimbulkan, baik secara umum maupun khusus.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

	Penelitian		
	Bambang Bayuaji	Kiki Pranowo	Yuli Susilowati
Pembahasan	Analisis Faktor-Faktor Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terkait dengan Implementasi Kebijakan di Propinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara)	Eksternalitas Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) bagi Masyarakat DKI Jakarta (Studi Kasus di Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
Fokus penelitian	Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara	Eksternalitas dari pelaksanaan PPMK	Implementasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka

Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan dan membuktikan apakah implementasi tersebut berjalan dengan baik dan memberi dampak positif	Tujuan dari penelitian ini adalah apakah masing-masing bina telah tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat dan mengetahui manfaatnya secara eksternalitas.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.
Metode Penelitian	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian positivisme dan dengan teknik analisis data yang digunakannya yaitu populasi dan sampel	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan <i>cross sectional</i>	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan <i>cross sectional</i>
Hasil Penelitian	Pada awalnya pelaksanaan PPMK berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, tetapi pada akhirnya mengalami kemunduran dan tidak efektif lagi karena tidak tersedianya sumber daya yang cukup	PPMK telah memberikan manfaat sesuai dengan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan tujuan yang dibuat dalam masing-masing bina telah tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi ada dampak yang ditimbulkan, baik secara umum maupun khusus.	Hasilnya cukup baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga masih rendah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dunn sebagaimana dikutip Abidin (2006:18) berpendapat bahwa menurut sejarahnya kata policy berasal dari kata polis dalam Bahasa Yunani

yang berarti negara kota. Dalam Bahasa Latin adalah *politia*, berarti Negara. Kemudian diserap dalam Bahasa Inggris Lama, menjadi *policie* yang memiliki pengertian yang berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah.

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warna negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Edi Suharto, 2008:3)

Menurut Thomas R. Dye (Edi Suharto, 2008:3) kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do* “ Artinya, kebijakan publik adalah “ apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Kata “kebijakan” (*policy*) merupakan penjelasan ringkas untuk menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Beberapa kalangan mengartikan kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan dan peraturan pemerintah, sebagian lagi mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman, acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Beberapa konsep kunci berikut yang disusun oleh Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto (2008:44-45) dapat membantu untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap definisi kebijakan publik yang beragam :

a). Tindakan pemerintah yang berwenang.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan *financial* untuk melakukannya.

b). Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

Kebijakan publik berupaya untuk merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat

c). Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d). Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e). Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dapat dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

2.2.2. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai aktor pembangunan dalam menjalankan perannya dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui kegiatan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan kajian yang bersifat dinamis dan

berkelanjutan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi proses kebijakan publik ini dengan urutan yang berbeda. Seperti merujuk pada proses kebijakan publik yang ditawarkan oleh Thomas R. Dye (Widodo, 2007:16) meliputi :

- a) Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
- b) Penyusunan Agenda (*Agenda setting*)
Penyusunan Agenda (*Agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c) Perumusan Kebijakan (*Policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- d) Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of polities*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- e) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f) Evaluasi Kebijakan (*Policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target tersebut baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus

diimplementasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) (lihat Abdul Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

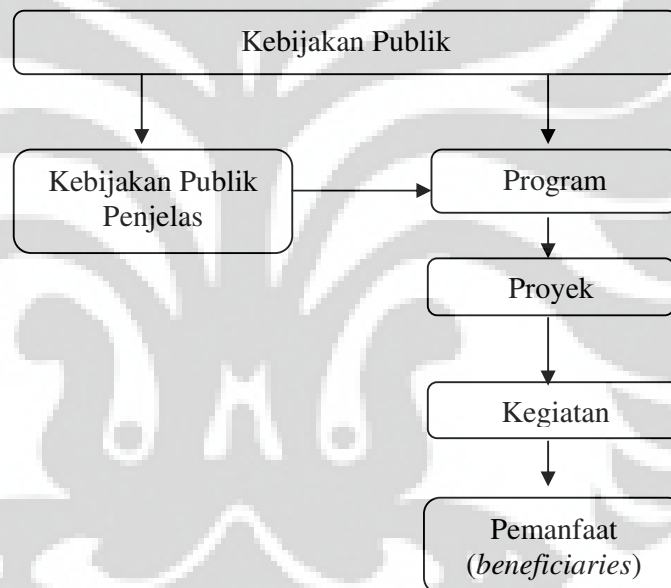
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (Winarno:2007:146) memandang implementasi kebijakan sebagai “*those actions by public or provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang (Dwidjowijoto,2008:432). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber : (Dwidjowijoto, Nugroho, R., 2008:433)

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok di pemerintah. Berbagai pihak yang terkait tersebut merupakan aktor-aktor yang berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin (1986:11) ,keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan sangat penting, seperti dikemukakan olehnya:

“ Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectation who work within a context of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers an units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”

Salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh setiap kebijakan yang baik adalah kemampuan untuk memadukan birokrasi badan-badan implementor seefektif dan seefisien mungkin dan bentuknya sesederhana mungkin sehingga memudahkan implementor dan kelompok sasaran dalam berhubungan. Pembagian kerja diantara sesama petugas dalam implementasi kebijakan memiliki peranan dan dukungan serta prioritas utama dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya resiko terjadinya kegagalan. Resiko terjadinya kegagalan ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).

Menurut Hogwood and Gun (Wahab,1990:51). biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaannya yang tidak baik (*bad execution*),
- b. Kebijakannya sendiri memang yang tidak baik (*bad policy*), atau
- c. Kebijakan itu memang bernasib tidak baik (*bad luck*)

2.2.4 Model Implementasi

Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak di temukan dalam berbagai literatur. Parsons (1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu:

1. The Analysis of failure (model analisis kegagalan)
2. Model Rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses

3. Model pendekatan *Bottom-up*, kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi.
4. Teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*).

Adiwisastra (Tim Penulis Enni Iriani:2007:20;21) mengatakan bahwa pendekatan top-down berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi), standar pelaksanaan, kewenangan dan koordinasi. Sedangkan pendekatan bottom-up menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana pada saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik. Pendekatan ini memandang publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan secara keseluruhan.

Model *Top-down* menyebabkan partisipasi rakyat lebih berbentuk mobilitas atau pergerakan masyarakat hanya sebagai penerima dampak kebijakan (*target group*). Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di lingkungan pusat serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat pada level bawahnya. Inti pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sebaliknya, pendekatan bottom-up lebih menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi melalui pemberdayaan masyarakat atau inisiasi warga masyarakat setempat.

Menurut Sabatier dan Mazmanian (seperti dikutip dalam Tim Penulis Enni Iriani:2007:20;21), mengatakan agar implementasi kebijakan dengan cara *bottom-up* dan *top-down* sukses (efektif), maka terdapat 6 (enam) kondisi yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.

2. Teori kausal yang memadai yang dapat memastikan bahwa sumber kebijakan didasarkan pada teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implemantasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan memiliki komitmen.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksanaan kegiatan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan dikarenakan menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

2. Sumber daya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana.

Agen pelaksana terdiri atas organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat. Sikap warga setempat dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu dan bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

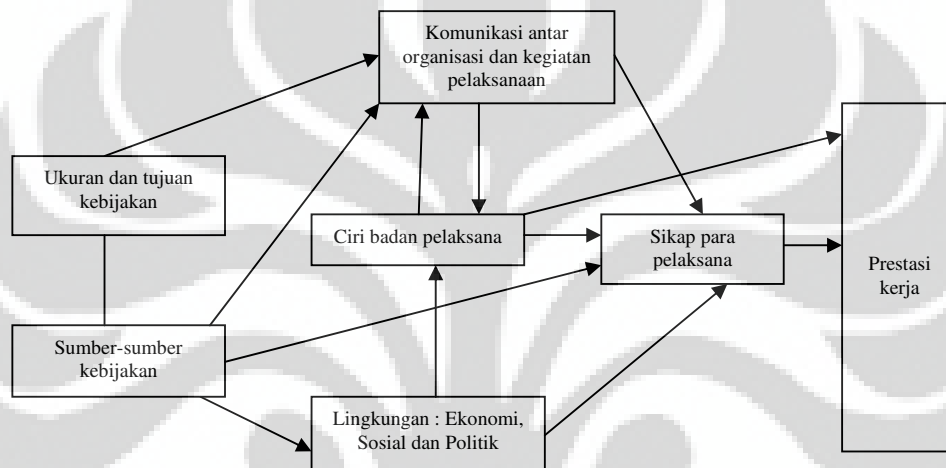
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Adapun model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.2

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn



Sumber : Agustino (2008)

Selaras dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, Edward III memfokuskan perhatiannya pada empat hal yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap mplementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Agar suatu implementasi kebijakan menjadi efektif, maka para pelaksan kebijakan harus

mengerti apa yang harus mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak-pihak terkait merupakan hal yang sangat berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Bila pesan yang disampaikan tidak spesifik dan tidak jelas, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain agar proses komunikasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka ketiga aspek komunikasi yang penting untuk diperhatikan adalah: *transmission, clarity dan consistency*. Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan secara bersamaan karena apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka sulit diharapkan akan tercapai komunikasi yang efektif. Hal ini akan mempengaruhi pemahaman unit-unit terkait terhadap apa yang akan dilakukan.

2. *Resourcess* (Sumber daya)

Sumber daya merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa jika personil-personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, maka kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Kebutuhan akan sumber daya ini meliputi adanya staf-staf yang jumlahnya proporsional dan memiliki pengetahuan mengimplementasikan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan atau sasaran. Dukungan sumber daya merupakan aspek yang sangat krusial yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sumber daya kedua yang cukup penting untuk diperhatikan dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan adalah informasi. Informasi ini terdiri dari dua bentuk yaitu cara melaksanakan kebijakan tersebut dan data yang diperlukan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan akan efektif dan implementator harus memahami apa yang harus dikerjakan dan memiliki informasi mengenai kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Sumber daya ketiga adalah kewenangan (*authority*). Agar dapat melaksanakan kebijakan secara efektif, diperlukan adanya kewenangan yang memadai. Hal ini menjadi sangat krusial manakala implementasi kebijakan melibatkan berbagai unit pelaksana yang berasal dari berbagai tingkatan organisasi.

Sumber daya selanjutnya yang dibutuhkan adalah prasarana. Tersedianya prasarana atau fasilitas fisik yang memadai juga merupakan sumber daya yang sangat penting. Seorang pelaksana kebijakan mungkin saja memiliki tenaga yang cukup, memahami hal-hal yang seharusnya dilaksanakan, memiliki kewenangan yang memadai, tetapi bila tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup, implementasi kebijakan yang efektif akan relatif sulit dicapai

3. *Disposition of attitude* (Sikap pelaksana)

Pemahaman dan kemampuan saja tidak cukup untuk dapat melakukan suatu kebijakan, jika kebijakan berhasil diimplementasikan secara efektif maka implementator tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi implementator juga memiliki kemampuan dalam melaksanakannya. Disposisi terkait dengan sikap pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi atau aktor pemerintah tingkat pusat.

4. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi)

Struktur dalam birokrasi yang terbagi dalam berbagai staff menyebabkan dibutuhkannya koordinasi dari berbagai bagian yang ada. Hal ini harus dirincikan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan sehingga masing-masing pihak mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan yang diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan di tingkat bawah. Indikator struktur birokrasi terkait dengan organisasi dimasing-masing unit

merupakan bagian dari birokrasi dan struktur organisasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dalam pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor pembangunan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Namun, disamping itu dalam proses implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan sebagai faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata "empowerment" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dengan cara pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dirinya sendiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran social dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Adapun ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat (Moelyarto (1999:37-38) meliputi:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.

- c. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan dengan sentralistik.
- d. Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
- e. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

Adapun definisi lain yang dinyatakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:59) adalah :

Pemberdayaan adalah sebuah konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Hal ini didasari pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang tercipta diantara konsep-konsep pembangunan yang ada pada saat ini (alternatif), ciri khasnya adalah adanya pemberian hak (otonomi) pengambilan keputusan kepada suatu kelompok masyarakat.

Adanya kesadaran masyarakat yang menginginkan untuk turut dilibatkan atau berpartisipasi dalam pembangunan ikut mendukung konsep pemberdayaan masyarakat. Conyers (1994:155) mengungkapkan beberapa

alasan mengapa partisipasi sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut
- c. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, sehingga mereka mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka.

Sedangkan menurut Ginandjar Kartasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat *”people centered, participatory, empowering and sustainable* (seperti dikutip Chambers,1995). Dalam kerangka pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi

1. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana, yang lebih bersifat nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan

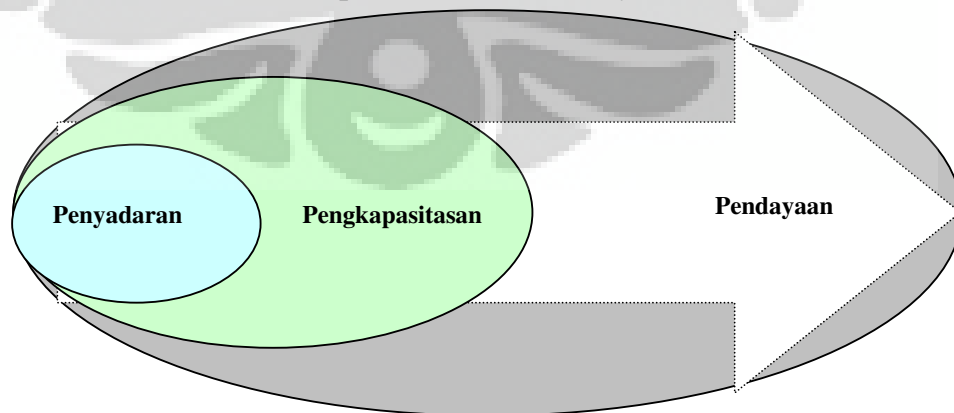
ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal diatas, beberapa hal yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dilakukan guna tercapainya tujuan yang diinginkan seiring dengan diperolehnya partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang kompleks karena melibatkan banyak pihak dan tahapan-tahapan serta memerlukan waktu untuk melihat dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 tahapan yaitu :

Gambar 2.3
Tahapan Proses Pemberdayaan



Sumber : Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto Riant N, 2007 ; 3

1. Tahap pertama adalah penyadaran. Dalam tahap ini target yang hendak di berdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu" Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi, belief dan healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri, tidak dari orang lain.
2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan (*capacity building*) atau memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak di otonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka "cakap" dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, Peraturan Koperasi dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika, dan *good governance*. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan "aturan main" diantara mereka.
3. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau "*empowerment*" dalam makna sempit. Pada tahap ini, pada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas cakapan yang telah dimiliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses dan kegiatan penelitian. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek atau subjek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini subjek yang menjadi tujuan dapat dipahami lebih mendalam sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang akurat, objektif, valid dan reliable.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengutamakan pemahaman (*verstehen*) dari suatu fenomena social. Hal ini berarti suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam suatu situasi tertentu ditafsirkan atau dipahami menurut perspektif peneliti sendiri (Neuman:2000:146). Menurut *Bogdan dan Taylor* (Moleong:1993:3), pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penerapan pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin mengajak pembaca untuk dapat mengetahui informasi dan fakta yang kurang diketahui di masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri selama ini.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. Menurut *Whitney* dalam Nazir, jenis penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Nazir (2003; 54) mengatakan bahwa jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penulis melihat adanya manfaat yang mampu didapatkan dan kesesuaian, karena metode ini mempelajari masalah berdasarkan fenomena yang ada dalam masyarakat. Selain itu, *Neuman* menjelaskan bahwa selain akan mendapatkan deskripsi yang akurat dan lengkap serta menemukan informasi untuk penjelasan baru.

3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama, karena kebutuhan peneliti sendiri. Penelitian murni ini mencakup penelitian-penelitian dalam kerangka akademis yaitu skripsi, tesis, atau disertasi (Jannah,Prasetyo: 2005,38).

3.2.3. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu dalam penelitian ini menggunakan penelitian *cross-sectional*. Penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dan hanya digunakan dalam waktu tertentu (Jannah,Prasetyo, 2005,45). Penelitian ini hanya mengambil data atau informasi dari satu kelompok waktu tunggal dan bukan untuk meneliti perkembangan dari subjek penelitian.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah (Moleong: 1993:6). Berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan adanya kesamaan ciri pendekatan penelitian diantaranya untuk menelaah suatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap dan persepsi. Hal ini berguna untuk menemukan jawaban penelitian atas dampak pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di RW 3 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai teknik penelitian untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara obyektif (Malo dan Trisnoningtas:201). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara :

1. **Studi Lapangan**

Dilakukan untuk mendapatkan data-data primer mengenai kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri, analisis implementasi kebijakan, hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara terbuka dengan informan penelitian.

2. **Studi Literatur**

Peneliti memperoleh data sekunder dengan menggunakan studi literatur dan dokumen untuk mendukung data primer yang diperoleh di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang selanjutnya akan di analisa. Oleh karena itu, pemilihan informan merupakan faktor yang penting dalam melakukan penelitian. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait dengan implementasi kebijakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka yang dipilih yaitu :

1. Denny Sanjaya, sebagai spesialis pengaduan masyarakat pada KMP (Konsultan Manajemen Pusat). Informasi yang ingin peneliti dapatkan adalah mengenai PNPM Mandiri secara umum.
2. Firman Yoga, sebagai Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Informasi yang ingin peneliti dapatkan adalah mengenai implementasi PNPM Mandiri Perkotaan khususnya wilayah Jakarta Barat.
3. Yusri Abdillah, sebagai anggota relawan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka. Informasi yang ingin peneliti dapatkan adalah mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan Roa Malaka khususnya di RW.03
4. Sukiman, sebagai Koordinator Tim Pengendali Program (TPP) RW.03 Kelurahan Roa Malaka. Informasi yang ingin peneliti dapatkan yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di lapangan.
5. Tokoh Masyarakat atau pemanfaat PNPM Mandiri Perkotaan di RW 3 di Kelurahan Roa Malaka. Informasi yang ingin peneliti dapatkan yaitu mengenai tanggapan dan manfaat apa yang dirasakan atas kegiatan PNPM Mandiri yang dilaksanakan di wilayahnya.
6. Prof. Isbandi Rukminto Aldi, Ph.D, Ketua Program Sarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerhati PNPM Mandiri. Informasi yang ingin peneliti dapatkan adalah mengenai

pandangan kalangan akademisi dengan adanya kebijakan tersebut dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perubahan pola hidup masyarakat yang mendapatkan program tersebut.

3.6 Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian dilakukan untuk mempersempit ruang kajian penelitian, sehingga penelitian akan lebih fokus dan menghindari pembahasan yang lebih luas. Pembatasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Roa Malaka pada tahun anggaran 2009.



BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PNPB MANDIRI
PERKOTAAN DI KELURAHAN ROA MALAKA

4.1. Kondisi Umum

Kelurahan Roa Malaka merupakan dataran rendah dengan ketinggian 6 meter diatas permukaan laut. Adapun luas wilayah 53,1 Ha. Terdiri dari 3 Rukun Warga dengan 27 Rukun Tetangga dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rel Kereta Api Jakarta Utara.
- Sebelah Selatan : Jalan Perniagaan Kelurahan Tambora.
- Sebelah Timur : Kali Besar Barat Kecamatan Tamansari.
- Sebelah Barat : Kali Jelakeng Kelurahan Pekojan.

Dengan jumlah Penduduk yang terbagi berdasarkan jumlah kepala keluarga, menurut jenis kelamin, menurut kewarganegaraan, menurut agama, menurut tingkat pendidikan dan menurut mata pencahariannya. Jumlah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga di Kelurahan Roa Malaka sebanyak 989 KK dengan 5242 jiwa.

4.1.1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kelurahan Roa Malaka terdiri dari laki-laki sebanyak 2.709 jiwa dan perempuan sebanyak 2.533 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kelurahan Roa Malaka

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	2.709
2	Perempuan	2.533
Jumlah		5.242

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Tahun 2010

4.1.2. Komposisi Penduduk Menurut Kewarganegaraan

Berdasarkan kewarganegaraannya, penduduk Kelurahan Roa Malaka terdiri atas Warga Negara Indonesia sebanyak 5.224 jiwa dan Warga Negara Asing sebanyak 18 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan
Di Kelurahan Roa Malaka

No	Kewarganegaraan	Jumlah (orang)
1	Warga Negara Indonesia	5.224
2	Warga Negara Asing	18
	Jumlah	5.242

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Tahun 2010

4.1.3. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama, penduduk Kelurahan Roa Malaka terdiri dari Agama Islam sebanyak 3.119 jiwa, Agama Kristen/Protestan sebanyak 200 jiwa, Agama Hindu sebanyak 23 jiwa dan Agama Budha sebanyak 1.900 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Di Kelurahan Roa Malaka

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.119
2	Kristen / Protestan	200
3	Hindu	23
4	Budha	1.900
	Jumlah	5.242

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Tahun 2010

4.1.4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Roa Malaka terdiri dari tamatan Sekolah Dasar sebanyak 803 jiwa, tamatan SLTP/ sederat sebanyak 1.440 jiwa, tamatan SLTA/ sederajat sebanyak 1.785 jiwa, tamatan Akademi

sebanyak 58 jiwa, tamatan S1 sebanyak 1.018 jiwa dan tamatan S2 sebanyak 20 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kelurahan Roa Malaka

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum bersekolah	118
2	Tamatan Sekolah Dasar	803
3	Tamatan SLTP/Sederajat	1.440
4	Tamatan SLTA/Sederajat	1.785
5	Akademi	58
6	S1	1.018
7	S2	20
Jumlah		5.242

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Tahun 2010

4.1.5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Berdasarkan mata pencapaian, jumlah penduduk Kelurahan Roa Malaka terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3 jiwa, TNI/POLRI sebanyak 1 jiwa, pegawai swasta sebanyak 1.816 jiwa, pensiunan sebanyak 2 jiwa, pedagang sebanyak 971 jiwa, dan buruh sebanyak 1.386 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian
Di Kelurahan Roa Malaka

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	98
2	TNI / POLRI	41
3	Pegawai Swasta	1.487
4	Pensiunan	18
5	Pedagang	2.347
6	Buruh	51
6	Belum bekerja	1.200
Jumlah		5.242

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Tahun 2010

4.2. Gambaran Umum PNPM Mandiri

4.2.1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik dalam memampukan masyarakat sebagai pelaku PNPM.

4.2.2. Program-Program PNPM Mandiri

Program-program dalam PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan seperti:

1. PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan sebuah program yang berbasis pada kebutuhan dan prakarsa masyarakat melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan oleh masyarakat yang diharapkan dapat menjamin bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya betul-betul terlibat dalam proses-prose pengambilan keputusan.

2. PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan.

3. PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK)

PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus adalah salah satu program pemerintah Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus.

4. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PNPM IP)

PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang terkait dengan infrastruktur perdesaan.

5. PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW).

PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah merupakan salah satu program nasional yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan penguatan institusi di perdesaan dengan pendekatan pembangunan kewilayahan di tingkat kabupaten.

Kelima program PNPM Mandiri tersebut juga didukung oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral dan khusus terkait pencapaian target sektor tertentu, seperti;

1. PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi)

PNPM Generasi merupakan program percontohan yang melekat pada PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini memfokuskan diri pada 2 aspek kegiatan, yaitu kesehatan ibu-anak balita dan pendidikan anak-anak usia sekolah.

2. PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP)

PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah dengan tujuan agar masyarakat perdesaan di lokasi sasaran menerima manfaat dari peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi energi terbarukan.

3. PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PNPM PUAP)

PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

4. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan

PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan.

5. PNPM Mandiri Pariwisata

PNPM Mandiri Pariwisata merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan sarana prasarana pendukung untuk menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat yang terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pariwisata yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman.

PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui fasilitas berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman dalam upaya menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan perumahan, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

4.2.3. Tujuan Umum dan Khusus

4.2.2.1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

4.2.2.2. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

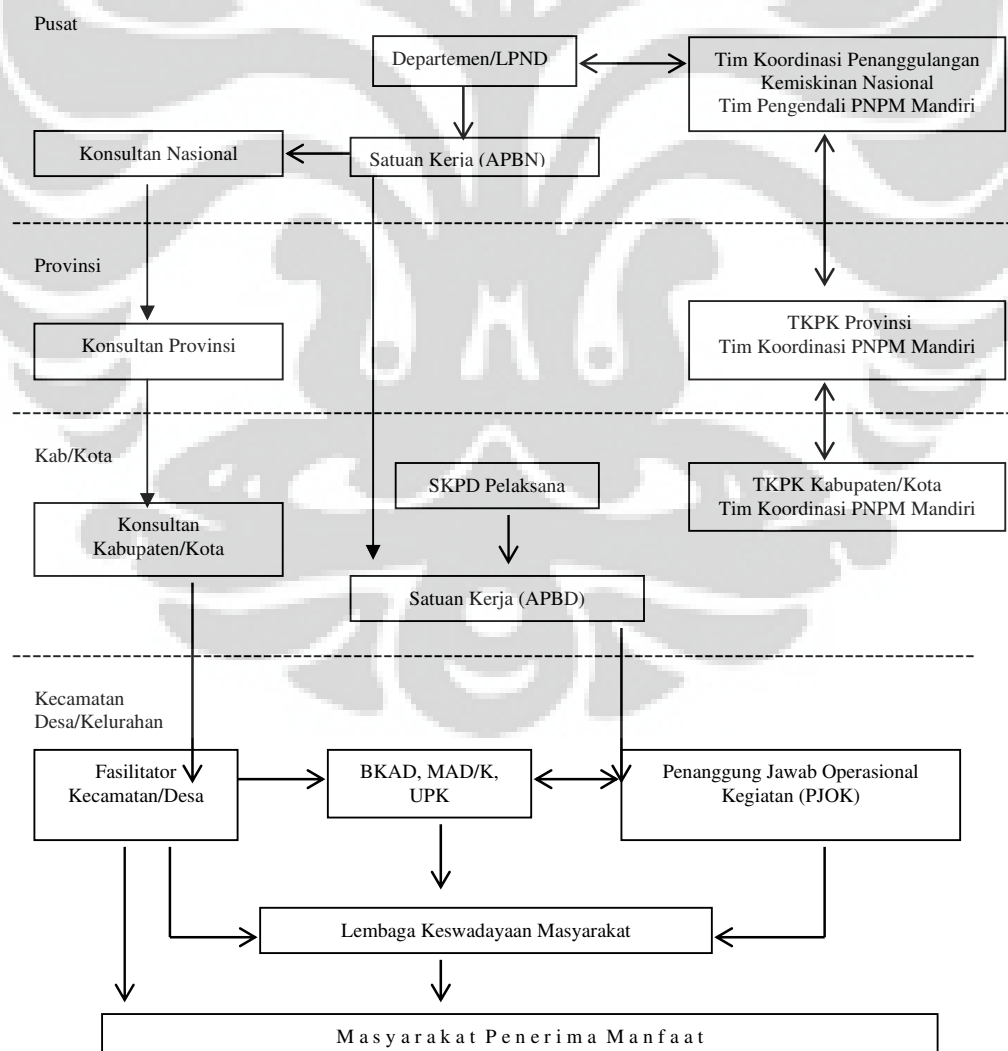
5. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4.2.4. Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri

Secara umum struktur organisasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

STRUKTUR KELEMBAGAAN PNPM MANDIRI



Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping serta masyarakat, baik di pusat maupun daerah. Pengendali PNPM Mandiri dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional/TKPKN) yang diketuai oleh Menkokesra. Di daerah, Tim Koordinasi terdiri dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD Provinsi dan TKPKD Kabupaten/Kota. Gubernur dan Bupati/Walikota adalah penanggungjawab yang membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi di wilayahnya masing-masing dengan diketuai oleh Bappeda.

4.2.5. Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan

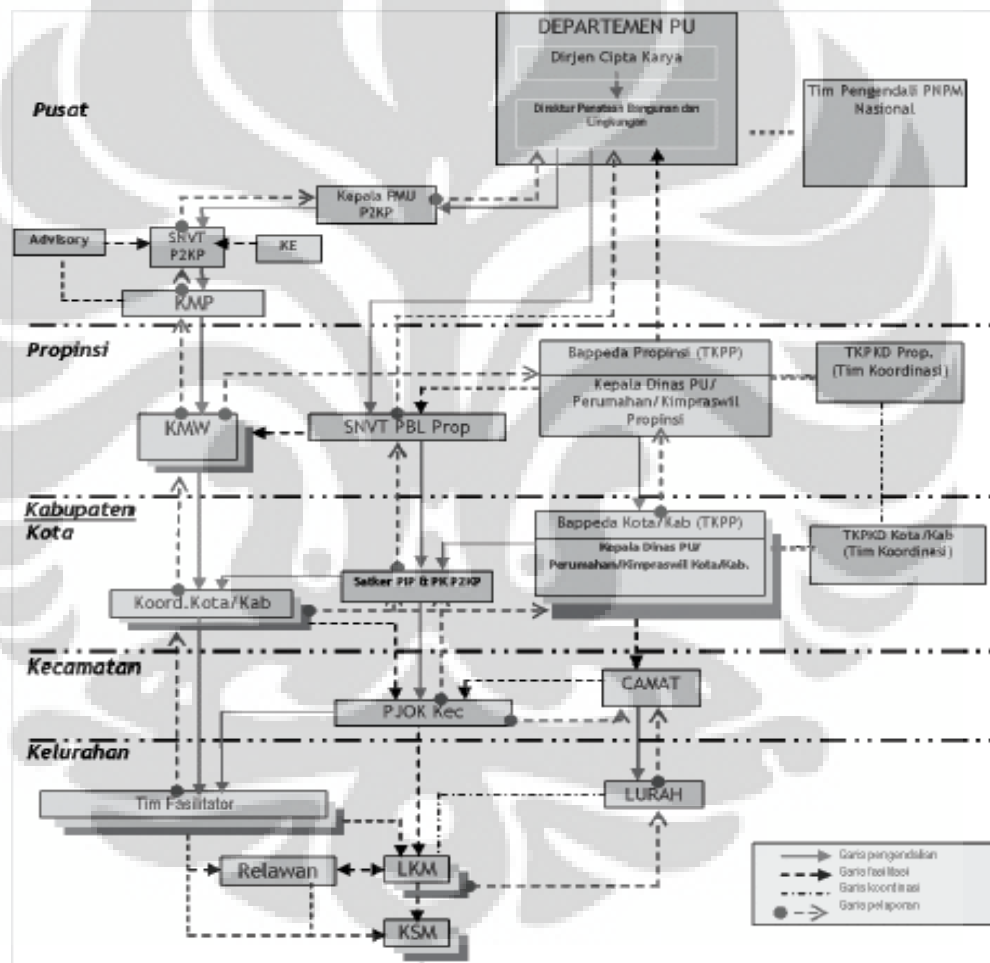
PNPM Mandiri Perkotaan secara struktur organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Sebagai penyelenggara program diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum dan menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM Mandiri Perkotaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya kemudian membentuk Unit Manajemen Proyek / PMU (*Project Management Unit*) yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit. Untuk pelaksanaan dilapangan, PMU melalui Satker mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh termasuk manajemen Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di beberapa provinsi yang membawahi beberapa *Team Leader* sesuai jumlah provinsi dampingannya. Begitu juga untuk tiap kota/kabupaten akan dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat kelurahan, tiap 7 s/d 10 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator. Tim Fasilitator akan dikontrak oleh Satker Provinsi yang dalam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Korkot. Disamping itu di tiap

kelurahan, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan (sekarang-kurangnya 30 orang /kelurahan). Para relawan ini akan dilatih secara khusus oleh KMW yang akan menjadi Kaber Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan yang akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja bersama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Adapun struktur organisasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan



Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

4.2.5.1. Konsultan Pelaksana

1. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Konsultan Manajemen Pusat berkedudukan di pusat dengan tugas utama melakukan perencanaan, koordinasi, supervisi dan monitoring

(pengendalian) terhadap tugas yang dilaksanakan oleh seluruh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) sehingga kualitas kerjanya terjamin. KMP juga bertugas membangun dan mengembangkan sistem penanggulangan permasalahan dan penanggulangan konflik secara berjenjang, membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk menjamin kelancaran dan keakuratan *entry data* dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat.

2. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

Tugas utama KMW adalah melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan koordinasi, monitoring, supervisi dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Satuan Wilayah Kerja (SWK). Jumlah KMW sebanyak 9 KMW untuk seluruh Indonesia yang dalam tugasnya bertanggungjawab langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali KMP.

3. Tim Fasilitator

Tugas utama Tim Fasilitator adalah sebagai pelaksana proyek termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM dan sebagai pendamping masyarakat termasuk mensosialisasikan masyarakat tentang PNPM Mandiri Perkotaan, melakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Rincian tugas Tim fasilitator sebagai pendamping masyarakat adalah:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, antara lain menyebarkan informasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan, mendorong peran serta keterlibatan masyarakat, membangkitkan dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, antara lain pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk praktek dan latihan serta pendampingan intensif.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain membimbing relawan dan masyarakat untuk mengenali berbagai persoalan tentang kemiskinan, memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis, mengorganisasi masyarakat untuk pembentukan KSM-KSM dan menggalang potensi yang ada di masyarakat agar dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan PNPM Mandiri Perkotaan.

4.2.5.2. Masyarakat Kelurahan

1. Relawan Masyarakat.

Relawan Masyarakat adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Peran utama relawan masyarakat adalah :

1. Pelopor perubahan;
2. Penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan yang memang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kapasitas, sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM/LKM, pengorganisasian KSM, perencanaan partisipatif, dll;
3. Pengawasan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi, kejujuran dan sebagainya. Oleh sebab itu setelah LKM terbentuk tim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga terbangun *control social* yang mantap;
4. Mitra kerja LKM

2. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)

LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu peran utama LKM adalah:

1. Mengorganisasi warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM;
2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya di tingkat komunitas;
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan;
4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
5. Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

3. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif, melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang. Tugas pokok KSM ini adalah:

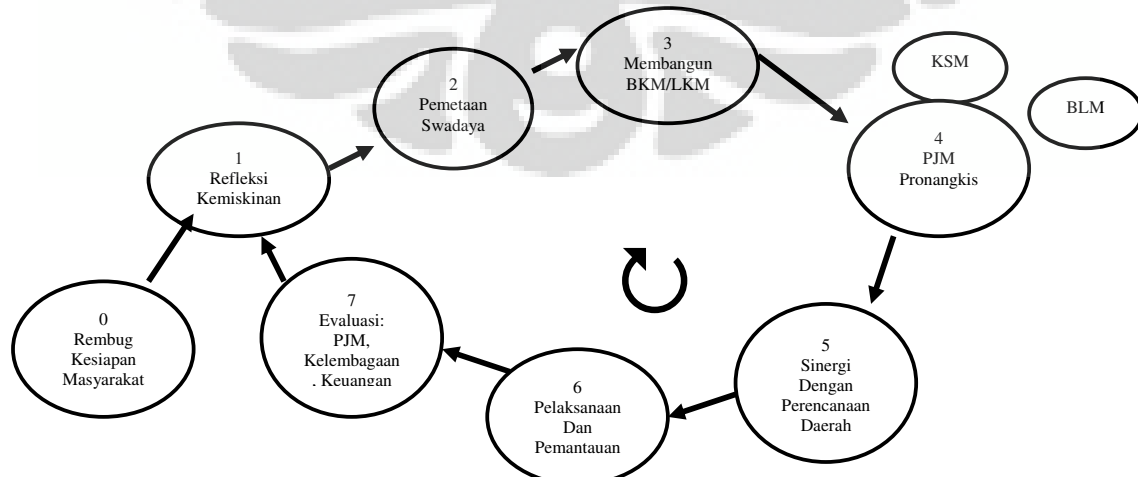
- a. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- b. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- c. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- d. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu, dsb);
- e. Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial (*control social*) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

4.2.6. Siklus Tahapan PNPM Mandiri Perkotaan

Siklus PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat berjalan terus dalam satu daur program pembangunan partisipatif sehingga tidak akan berhenti setelah PJM Pronangkis, artinya bukan hanya berhenti sebatas proyek, akan tetapi menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan melembaga di masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan hanya mengawali proses belajar masyarakat, diharapkan dari proses belajar ini masyarakat dapat mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri secara mandiri, sehingga *civil society* yang diidam-idamkan dapat terwujud yang akan berdampak pada pengurangan masalah-masalah kemiskinan. Adapun Siklus Tahapan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3

SIKLUS TAHAPAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN



Sumber : Modul Dasar PNPM Mandiri Perkotaan

Di dalam setiap tahapan siklus proses belajar tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kelompok melalui kelompok diskusi terarah, rembug-rembug dan melaksanakan refleksi-refleksi bersama. Melalui diskusi-diskusi dan refleksi dalam kelompok, maka diharapkan terjadi dialog dan saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, dan berbagi peluang. Diharapkan pada akhirnya akan menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan orang lain dan lingkungan. Pendekatan ini juga dapat menciptakan pola-pola hubungan masyarakat yang setara dan sekat-sekat sosial diharapkan dapat terbongkar.



BAB V
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
DI KELURAHAN ROA MALAKA, KECAMATAN TAMBORA
JAKARTA BARAT

5.1. Permasalahan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi, tetapi disebabkan adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup secara layak. Situasi ini bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa dilakukan dalam rangka jalan pintas mempertahankan hidup yang bila berlarut akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.

Disisi lain, upaya penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi, seperti peningkatan penghasilan, pemberian kredit lunak dll. Semua ini tidak dapat disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin, tetapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh pemerhati PNPM Mandiri yaitu Prof. Isbandi Rukminto dalam petikan wawancara berikut ini:

“Ekonomi kan yang dilihat pada perguliran dana, bukan pada perubahan kualitas hidup masyarakat miskin itu sendiri...perkotaan itu tidak bisa dikembangkan tanpa perdesaan itu...Jakarta, semakin banyak orang semakin rumit, semakin kumuh tempat-tempatnya...kalau perdesaannya nga dikuatin,yang disini percuma...fokusnya harusnya di perdesaan..... rumah tangga miskin di Jakarta juga sudah sangat familiar dengan program-program serupa, program-program bantuan, program-program penanggulangan kemiskinan.....nga ada dari pemerintah.....dari pihak lain.....jadi buat mereka justru

sangat ahli menjadi penerima bantuan” (wawancara dengan Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D pada tanggal 15 Desember 2012)

Berdasarkan persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi terhadap merupakan proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sampai kepada akarnya. Artinya, inti dari intervensi PNPM Mandiri Perkotaan adalah membangun manusia yang mempunyai sikap mental positif sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan melalui pengorganisasian masyarakat, karena itu dibutuhkan motor penggerak sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perkotaan merancang proses pendampingan masyarakat melalui tahapan siklus dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri. Tahapan proses tersebut dirangkum menjadi sosialisasi program, kelembagaan, sumberdaya dan koordinasi.

5.2. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan

5.2.1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan yang penting dalam setiap program kegiatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari program tersebut. Sosialisasi awal program PNPM Mandiri Perkotaan ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dan koordinator kota dengan pesertanya adalah perangkat desa/kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai gambaran umum PNPM Mandiri Perkotaan, program-programnya, pihak-pihak yang melaksanakan dan bagaimana program tersebut dilaksanakan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya sebagai Konsultan pada Konsultan Manajemen Pusat berikut ini :

“Ya sebenarnya kita-kita juga, konsultan...jadi kan konsultan kita ada yang di tingkat kelurahan yang namanya tim fasilitator, trus ada yang di tingkat kabupaten namanya tim korkot (tim koordinator kota) tingkat kabupaten, tus kemudian ada yang di tingkat propinsi. Tingkat propinsi ini di gawangi oleh tim KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) Propinsi. Jadi kita ada KMP (Konsultan Manajemen Pusat), KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) di tingkat propinsi. Kalau di kecamatan tidak, karena sudah melingkupi...dalam 1 kecamatan itu dilingkupi oleh oleh tim-tim tersebut” (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 mei 2011)

Sosialisasi ini menghasilkan kesepakatan rencana kerja pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di desa/kelurahan tersebut. Artinya, bahwa kelurahan tersebut bersedia melaksanakan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan di seluruh kelurahan di Indonesia dengan jumlah RW yang mendapatkan program ini sebanyak 4 atau 5 RW dalam satu Kelurahan. Penunjukan wilayah RW tersebut berdasarkan kriteria RW mana saja yang memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin yang cukup banyak.

Tahapan selanjutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat. Rembug Kesiapan Masyarakat ini merupakan bentuk sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak desa/kelurahan dan di dampingi oleh Tim Fasilitator dengan pesertanya adalah RW, RT, Tokoh Masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat dan warga miskin setempat. Materi yang disampaikan dalam Rembug Kesiapan Masyarakat ini sama seperti dalam sosialisasi awal dan hasilnya adalah kesepakatan masyarakat untuk menerima atau menolak melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya. Apabila masyarakat memutuskan untuk menolak pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, maka secara otomatis PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan dilaksanakan di wilayah tersebut, tetapi apabila masyarakat menerima, maka masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Dalam Rembug Kesiapan Masyarakat, disimpulkan bahwa hanya RW 03 saja yang bersedia untuk melaksanakan program tersebut, sedangkan untuk RW 01 dan RW 02 tidak bersedia, sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka hanya dilakukan di RW 03. Hal tersebut disebabkan karena RW 01 dan RW 02 adalah daerah perkantoran dan pergudangan sehingga tidak ada penduduk yang masuk dalam kategori KK miskin. Hal tersebut juga disampaikan bapak Denny Sanjaya, Konsultan pada KMP sebagaimana terdapat dalam petikan wawancara berikut ini;

“Lalu di tingkat kelurahan namanya RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat), artinya masyarakat mau tidak menerima program ini, kalau mau menerima konsekuensi harus mau menuruti peraturan-peraturan yang ada” (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 mei 2011).

Tahapan selanjutnya adalah pembentukan relawan. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya untuk memberikan apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan/gaji. Hasil yang diharapkan dari pembentukan relawan ini adalah bahwa relawan merupakan “agen perubahan” di masyarakat yang berfungsi mempercepat terjadinya proses penanggulangan kemiskinan. Tugas relawan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah menanggulangi kemiskinan dengan berbagai aktivitas pendampingan masyarakat, seperti peningkatan kapasitas bagi masyarakat dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan, membangun jaringan kerja dan jaringan sumber daya serta memobilisasi sumberdaya sehingga berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat secara efektif terselenggara bersama masyarakat. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Bapak Yusri Abdillah sebagai relawan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka dalam petikan wawancara berikut ini :

“ jadi disini cuma diikuti sertakan 1 RW doang...cuma di RW 3 yang ada. Jadi, waktu pembentukan relawan-relawan PNPM itu di kelurahan di adain, RW 1 dan RW 2 tidak bersedia...alasannya Kurang tau deh pada waktu itu.....jadi dia nga mau ikut.. jadi cuma 1 doang yang ada

TPP....cuma di RW 3 aja....dengan 9 RT nya”(wawancara dengan Bapak Yusri Abdillah pada tanggal 25 September 2011)

Hal yang serupa pun dikemukakan oleh Ibu Rohayati sebagai pemanfaat PNPM Mandiri Perkotaan di RW 03 berikut ini:

“ ya, waktu itu saya diundang sama pak RT, ternyata sosialisasi soal PNPM Mandiri Perkotaan itu...dijelasin soal PNPM Mandiri Perkotaan itu apa, kegiatannya apa aja, apa aja yang harus kita kerjain...yah...pokoknya tentang program itu semua dah...trus kita di tanyain siapa yang bisa jadi relawannya....saya juga nga tau kenapa RW 1 sama RW 2 nga mau....mungkin nga ada orangnya kali” (wawancara dengan ibu Rohayati tanggal 28 september 2011).

Relawan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka yang mendaftar sebanyak 25 orang. Pembentukan relawan ini tidaklah mudah, banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusri Abdillah dalam petikan wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Itulah kepedulian masyarakat, namanya ini kan PNPM sosial bu.....kadang sosial orang males lah...nga ada duitnya...makanya kita di roa malaka ini susah....satu...orang pekerja...etnis...trus banyak orang-orang perkantoran....gudang kosong...warga jarang...jadi ya sebagian juga ada yangnamanya kerja sosial...ya gitulah...kadang mau...kadang nga...nga ada duitnya...udah....karena ini PNPM sosial banget bu...kita nga ada....apa namanya....dapet bulanan...nga....kita sosial buat lingkungan wilayah pemberdayaan masyarakat. (wawancara dengan Bapak Yusri Abdillah tanggal 25 September 2011)

Ada beberapa hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini yaitu:

1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran kritis warga tentang prinsip dan nilai PNPM Mandiri Perkotaan sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.

2. Warga paham arti penting kerelawanan dalam mendorong tumbuh berkembangnya kesatuan dan solidaritas sosial, kepedulian bersama serta kemandirian dan keswadayaan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya.
3. Warga memahami hakekat peran relawan masyarakat sebagai orang yang dianggap paling dapat dipercaya, memiliki sifat kerelawanan serta komitmen yang tinggi sebagai penggerak dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Sedangkan hasil dari sosialisasi ini adalah pembentukan relawan-relawan setempat sebagai penggerak dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

5.2.2. Kelembagaan

Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (*capital social*) yang dimiliki masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan membentuk lembaga yang nantinya akan melaksanakan program tersebut dan didampingi oleh fasilitator. Adapun lembaga-lembaga yang akan melaksanakan program tersebut di tingkat kelurahan yaitu Relawan Masyarakat, LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

1. Relawan masyarakat

Relawan Masyarakat berfungsi sebagai “agen perubahan” yang akan mempercepat terjadinya proses penanggulangan kemiskinan. Relawan di Kelurahan Roa Malaka terkumpul sebanyak 25 orang, tetapi seiring waktu berjalan hanya tersisa 5 orang. Hal tersebut seperti yang

diutarakan oleh Bapak Sukiman sebagai Koordinator TPP RW 03 dalam petikan wawancara berikut ini:

“Relawan waktu itu yang terbentuk ada 25 orang bu...itu perwakilan dari seluruh RT, tapi nga semua sih bu...yang mau-mau aja...soalnya ini kan kerja sosial, nga ada gajinya...rata-rata mereka pendidikannya sampe SMP doang....ada beberapa yang sampe SMA sih bu...trus kerjanya serabutan aja..nga semua punya kerjaan tetap...tapi kok akhirnya yang aktif cuma tinggal 5 orang aja...nga tau pada kemana semua...(wawancara dengan Bapak Sukiman pada tanggal 27 september 2011)

Relawan- relawan tersebut nantinya harus membentuk TPP (Tim Pengendali Program) RW 03, lalu membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan, dan LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang mempunyai tugas untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat , seperti yang diutarakan oleh narasumber :

“Ya...penjelasan mengenai PNPM...trus pembentukan relawan. trus pertemuan lagi, langsung membentuk relawan...relawan ini mencari anggota untuk membentuk lagi TPP...TPP membentuk lagi LKM tingkat kelurahan. (wawancara dengan Bapak Yusri Abdillah, relawan PNPM Mandiri Perkotaa Kelurahan Roa Malaka tanggal 25 september 2011)

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Denny Sanjaya dalam petikan wawancara berikut ini:

“pada awalnya kita membentuk lembaga, namanya BKM/LKM...ini dari masyarakat...masyarakat yang punya masalah...masyarakat yang punya keinginan, punya rencana...masyarakat yang harus gali potensi yang ada disitu dan bagaimana mencari solusi-solusi untuk penyelesaian masalah dan membuat perencanaan-perencanaan”

2. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)

LKM merupakan suatu lembaga yang bisa disebut sebagai “pimpinan kolektif” organisasi masyarakat warga setempat. LKM ini bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Ciri-ciri LKM yang akan terbentuk adalah :

- Adanya kesetaraan
- Setiap anggota harus dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, ada ikatan kebersamaan, baik itu kebersamaan dalam hal kepentingan, kebersamaan dalam hal persoalan, kebersamaan dalam hal tujuan dll.
- Bergabungnya anggota secara sukarela, bukan karena terpaksa.
- Saling percaya dan dapat bekerjasama dalam kemitraan.
- Dapat memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan.
- Selalu menghargai keragaman dan hak asasi manusia sebagai dasar membangun sinergi.
- Menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah.
- Mampu bekerja secara mandiri.

LKM ini dipimpin oleh pemimpin kolektif yang beranggotakan antara 9 sampai 11 orang (harus ganjil). Kriteria pemimpin kolektif ini ditentukan oleh masyarakat yang dilakukan secara musyawarah. Adapun tahapan pembentukan LKM adalah sebagai berikut:

- Membentuk panitia pemilihan yang dipilih oleh warga masyarakat. Panitia menyusun mekanisme pemilihan yang akan dipilih di kelurahan. Proses pemilihan anggota LKM ini adalah rahasia, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Setiap warga yang sudah dewasa menuliskan beberapa nama yang menurut mereka memenuhi kriteria

yang telah disepakati, yaitu yang merepresentasikan nilai-nilai luhur, bukan atas dasar keterwakilan wilayah, agama, ras maupun golongan.

- Setiap warga kelurahan setempat berhak sebagai pemilih
- Mekanisme pemilihan dilakukan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan berdasarkan pada keakraban hubungan sosial diantara warga masyarakat setempat. Berdasarkan mekanisme pemilihan tersebut, di RW 03 Kelurahan Roa Malaka telah terpilih Koordinator LKM nya yaitu Bapak Ahmad Humaidi dengan 8 orang anggotanya yang merupakan keterwakilan dari masing-masing RT yang terdapat dalam RW 03 Kelurahan Roa Malaka. Tetapi dalam pelaksanaannya, anggota yang aktif hanya 3 orang saja. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sukiman dalam petikan wawancara berikut ini:

“LKM itu ada 9 orang, masing-masing RT diwakili oleh 1 orang, tetapi yang masih aktif dan mau bekerja cuma ada 3 orang aja bu...yang lain nga tau kemana bu..”
(wawancara dengan Bapak Sukiman pada tanggal 27 September 2011)

- Membentuk Tim Perumus untuk menyusun draf AD/ART LKM. Draf yang sudah disusun harus dibahas dan disepakati oleh masyarakat melalui pertemuan dengan masyarakat sebelum disahkan dan dilakukan pemilihan anggota LKM.

3. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

KSM adalah kelompok sosial pada tingkat akar rumput yang mempunyai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakata, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, diharapkan warga miskin dapat terlibat dan menerima manfaat dari kelompok ini, dengan cara menjadi anggotanya. Pengembangan KSM tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat, asalkan warga miskin mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok dan penerima manfaat

langsung adalah warga miskin. Oleh karena itu, hasil identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan dalam pemetaan swadaya menjadi dasar untuk mengelompokkan masyarakat, terutama strategi bagaimana agar warga miskin terlibat. Yang paling penting adalah, bahwa kelompok ini dibentuk atau dikembangkan bukan untuk menjadi pembenaran untuk mendapatkan bantuan uang dari PNPM Mandiri Perkotaan, akan tetapi menjadi wahana bersama untuk saling belajar memecahkan masalah, saling peduli dan menghargai di antara anggotanya.

LKM yang terbentuk dari hasil sosialisasi tersebut ada 1 lembaga dengan BKM nya sebanyak 3 lembaga sesuai dengan rencana kegiatan yang mereka ajukan. LKM tersebut bernama LKM Kota Toea yang diketua oleh Ahmad Humaidi dengan KSM nya masing-masing memiliki nama KSM Batavia yang diketua oleh Sutrisno, KSM Gantoeng diketuai oleh Dede Romjali, dan KSM Onthel diketuai oleh Sherlyanti. Adapun kegiatan fisik lingkungan yang dilakukan oleh KSM-KSM tersebut adalah:

A. LKM Kota Toea dengan KSM Batavia melakukan pekerjaan fisik lingkungan yaitu pembuatan bak sampah. Pembuatan bak sampah ini atas usul masyarakat. Alasan utama nya adalah karena banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan selain wilayah sekitar menjadi kotor juga membuat banyaknya lalat yang beterbangan. Pembuatan bak sampah ini sebanyak 9 buah yang disesuaikan dengan banyaknya RT di RW 3, yang artinya tiap-tiap RT mendapatkan jatah 1 bak sampah yang diletakkan di tempat yang mudah di jangkau oleh warga sekitarnya. Hal tersebut seperti yang ungkapkan oleh Bapak Yusri Abdullah melalui petikan wawancara berikut:

“Ya, karena disini kan mayoritas sampah paling gede ya bu...paling susah banget...warga ngeluhnya soal sampah...fasilitas tong sampah ini...kita betul-betul butuh...dulu dekel kan bikin tong sampah, itu suka ada yang hilang...suka bolong...makanya kita PNPM ini bikin tong sampah yang permanen. Kalau tong sampah juga

kita lihat karena minimnya gerobak sampah di RW, di RT...jadi yah kita bikin. Akhirnya ...sampah ini..apalagi kebersihannya bu....berapa orang di RT...gerobak dikit... Gerobak bikin 4 buah, untuk tempat sampah permanen masing-masing RT dapat 1, berarti ada 9....yang jalan 2. (wawancara dengan Yusri Abdillah pada tanggal 25 September 2011)

Sama seperti Bapak Yusri Abdillah, Bapak Sukiman sebagai Ketua TPP RW 03 Kelurahan Roa Malaka juga membenarkan hal tersebut, melalui petikan wawancara berikut ini:

“ kalau soal kegiatan fisik, masyarakat maunya bikin tempat sampah di tiap RT, biar nga jauh buangnya.....soalnya sampah banyak banget sih bu...abis warganya banyak...yang banyak warganya kan di RW 3 aja, di RW 1 sama RW 2 kan sedikit warganya....jadi yah...minta bak sampah yang bagus aja katanya.(wawancara dengan Bapak Sukiman pada tanggal 27 September 2011)

Hal tersebut dipaparkan juga oleh Ibu Rohayati sebagai pemanfaat PNPM Mandiri Perkotaan di RW 03 Kelurahan Roa Malaka melalui petikan wawancara berikut ini:

“masalahnya sampah kan penting juga...pada bertumpuk di rumah warga, nga ada yang ngambilin karena gerobaknya pada rusak, trus juga kalo ada tempat pembuangan sampah kan jadi agak enakan, warga nga perlu numpukin sampah di rumahnya, bisa buang di tempat sampah...trus ntar paginya kan ada mobil sampah yang ngambilin”. (wawancara dengan Ibu Rohayati pada tanggal 28 September 2011)

B. LKM Kota Toea dengan KSM Gantoeng melaksanakan kegiatan fisik lingkungan berupa pengadaan gerobak sampah. Pengadaan gerobak sampah diperuntukkan bagi masyarakat RW 03 khususnya di RT 1, RT 2, RT 8 dan RT 9. Hal tersebut dikarenakan gerobak sampah yang sudah ada baik yang diberikan oleh pihak Kelurahan Roa Malaka maupun yang diberikan oleh Dewan Kelurahan sudah tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Yusri Abdillah dalam kutipan wawancara berikut ini:

“ Dari kelurahan cuma berapa doang, nga begitu.....apa namanya.....kualitasnya kurang bagus...jadi mereka pada geluh...karena sampah disini kan padat banget, apalagi penduduknya disini kebanyakan warga, kalo kantor-kantor kan kertas doang.....ya kalo di RW1 dan RW2 kan kantor-kantor....(wawancara dengan Yusri Abdillah pada tanggal 25 September 2011)

Gerobak-gerobak sampah yang tersedia pun dirasa kurang karena banyaknya sampah di wilayah RW 3 Kelurahan Roa Malaka. Tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sampah membuat sampah-sampah yang ada di masyarakat tidak dapat terangkut sehingga masyarakat akhirnya mengusulkan hal tersebut. Adapun pengadaan gerobak sampah hanya 4 unit yang keseluruhannya di simpan di Pos RW 03 Kelurahan Roa Malaka.

C. LKM Kota Toea dengan KSM onthel melakukan pekerjaan fisik lingkungan berupa pengerasan jalan rabat beton. Berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui TPP, diusulkan untuk bina fisik salah satunya adalah pengerasan rabat beton pada jalan setapak di wilayah RT 3 dan RT di wilayah RW 03. Hal tersebut disebabkan karena hanya wilayah tersebut yang memiliki ruang jalan setapak yang rusak dan sedikit mengalami genangan pada saat terjadinya hujan. Volume yang diusulkan pun tidak banyak, hanya sekitar 187 M² disesuaikan dengan anggaran yang diajukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Koordinator TPP RW 03 Kelurahan Roa Malaka yaitu Bapak Sukiman dalam petikan wawancara berikut ini:

“ saya yang terjun langsung ke lapangan bu...tanya-tanya langsung ke masyarakat...mana yang lebih banyak mereka mau...rata-rata maunya tempat pembuangan sampah sama gerobak sampah, kalo RT 3 sama RT 9 maunya pengaspalan jalan karena sering banjir kalo ujan “ (wawancara dengan Bapak Sukiman tanggal 27 September 2011)

Sama seperti Bapak Sukiman, hal tersebut pun disampaikan oleh Ibu Rohayati sebagai pemanfaat bina fisik PNPM Mandiri Perkotaan

RW 03 Kelurahan Roa Malaka melalui petikan wawancara berikut ini:

“ emang kita perlunya pengerasan jalan ini...abis udah lama jalannya rusak, trus kalo ujan kan jadinya becek kemana-mana....kalo ada kendaraan lewat juga jadi nyiprat-nyiprat...nga enak diliat deh neng jalannya...tapi kalo udah di cor kan jadi bagus...nga becek lagi...anak-anak maen juga dah enak...rapi gitu loh...”(wawancara dengan Ibu Rohayati pada tanggal 28 September 2011)

Usulan kegiatan fisik yang diusulkan dari forum musyawarah tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, hal tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dan adanya skala prioritas program yang akan dilakukan. Adapun usulan-usulan yang pernah diusulkan masyarakat melalui TPP RW 03 adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki jalan setapak dengan menggunakan rabat beton, diusulkan dari RT 01, RT 03, RT 04 dan RT 07. Usulan ini diterima oleh faskel, tetapi hanya di RT 03 dan RT 09 (pengganti RT 07), karena 2 wilayah itu yang paling parah kondisi jalan setapaknya.
2. Pembuatan gerobak sampah sebanyak 9 unit, yang rencananya untuk masing-masing RT, tetapi hanya terrealisasi sebanyak 4 unit, sisanya diajukan kembali untuk tahun 2011.
3. Pembuatan bak sampah sebanyak 9 unit, dan disetujui semuanya.
4. Penerangan jalan di RT 04 dan RT 08. Usulan tidak dapat disetujui oleh faskel, kemungkinan bisa diajukan kembali tahun depan.
5. Pembuatan tutup saluran air di jl. Nelayan barat, kurang lebih sepanjang 400 m yang terletak di RT 01 dan RT 02. Usulan ini pun ditolak oleh faskel dan kemungkinan bisa diajukan kembali tahun mendatang.
6. Perbaiki MCK yang terletak di RT 01 sebanyak 2 unit. Usulan ini pun ditolak.

Tim pelaksana ini merupakan ujung tombak kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, artinya lembaga inilah yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi menanggulangi kemiskinan. Lembaga-lembaga ini

merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi suksesnya program ini.

5.2.3. Sumberdaya

Edward III menjelaskan bahwa sumberdaya merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, tetapi jika personil-personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tidak memiliki sumberdaya yang memadai, maka kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara baik. Dukungan sumberdaya merupakan aspek yang sangat krusial yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sumberdaya yang digunakan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya dana. Kedua sumberdaya ini merupakan hal yang penting karena tanpa keduanya maka kegiatan tersebut tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Denny Sanjaya sebagai Konsultan pada KMP yaitu sebagai berikut:

“sebenarnya inti dari pemberdayaan itu apa....membuat masyarakat yang tadinya tidak mampu, tidak berdaya, yang tadinya tidak punya kemampuan menjadi punya kemampuan. Nah, yang punya kemampuan itu nanti mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka minimal. (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 Mei 2011)

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dalam hal pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di RW 03 Kelurahan Roa Malaka adalah sangat penting. Tanpa sumberdaya yang baik dan potensial, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumberdaya yang digunakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah relawan-relawan yang dengan sukarela mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memajukan wilayahnya agar terlepas dari masalah kemiskinan. Relawan tersebut dibantu oleh tim-tim kecil yang masing-masing melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda, yaitu LKM dan KSM.

Refleksi kemiskinan merupakan tugas awal dari relawan, fungsinya adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ‘objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh pemerhati PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D melalui petikan wawancara berikut ini:

“untuk Jakarta itu nga akan bisa mengurangi orang miskin, karena orangnya bertambah banyak...jadi berapa pun dana yang dikeluarkan, itu akan membuat orang menjadi keenakkan...malah jadi bikin masalah, karena di Jakarta itu jumlah orangnya sudah terlalu banyak....masalahnya bukan cuma kemiskinan, kemiskinan itu merupakan kondisi....tidak memberikan dampak bagi kualitas hidupnya...nga semakin sehat juga...anaknya semakin baik nga juga.” (wawancara dengan Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D pada tanggal 15 Desember 2011)

Tujuan refleksi kemiskinan adalah agar dapat menumbuhkan kesadaran bahwa masalah kemiskinan tidak bisa didiamkan, melainkan harus ditanggulangi bersama. Dengan menemukan akar penyebab kemiskinan, maka mereka akan bisa menggulangi kemiskinan secara terorganisasi. Dalam hal ini, penanggulangan kemiskinan dapat di atasi melalui pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat menggali potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya serta bagaimana mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya sebagai Konsultan pada KMP berikut ini:

“lalu dibentuklah relawan-relawan di masing-masing RT dan RW tingkat kelurahan kemudian di gabung. Para relawan tersebut dilatih (secara umum dan secara tehnik) dan mengikuti kegiatan yang dinamakan refleksi kemiskinan. Tugas mereka adalah menentukan kriteria kemiskinan yang ada diwilayahnya. Kriteria kemiskinan ini tiap-tiap daerah berbeda-beda, tiap RW juga berbeda-beda,

selanjutnya hasilnya digabung dan di ambil kesimpulan kriteria mana yang lebih banyak terdapat di masyarakat kelurahan tersebut. (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya tanggal 13 mei 2011)

Hasil yang diharapkan dari refleksi kemiskinan yang dilakukan oleh relawan adalah:

1. Tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat bahwa:
 - a. Akar persoalan kemiskinan adalah lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan untuk berbuat kebajikan dan peduli dengan sesama.
 - b. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab kaum miskin.
 - c. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri melalui perubahan mental dan perilaku individu yang pada akhirnya menjadi perilaku kolektif.
2. Tergalinya aspirasi dan harapan warga miskin serta kelompok marjinal mengenai persoalan kemiskinan (penyebab kemiskinan, kriteria kemiskinan, profil keluarga miskin, dll) dan upaya penanggulangannya.
3. Kesepakatan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan secara kolektif melalui proses penumbuhkembangan nilai dan prinsip yang diusung oleh PNPM Mandiri Perkotaan
4. Tumbuhnya kepedulian dan kesatuan warga hasil kesadaran kritis segenap lapisan masyarakat, baik warga miskin dan kaya untuk bersama-sama membahas persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya.

Adapun pandangan PNPM Mandiri Perkotaan tentang akar penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

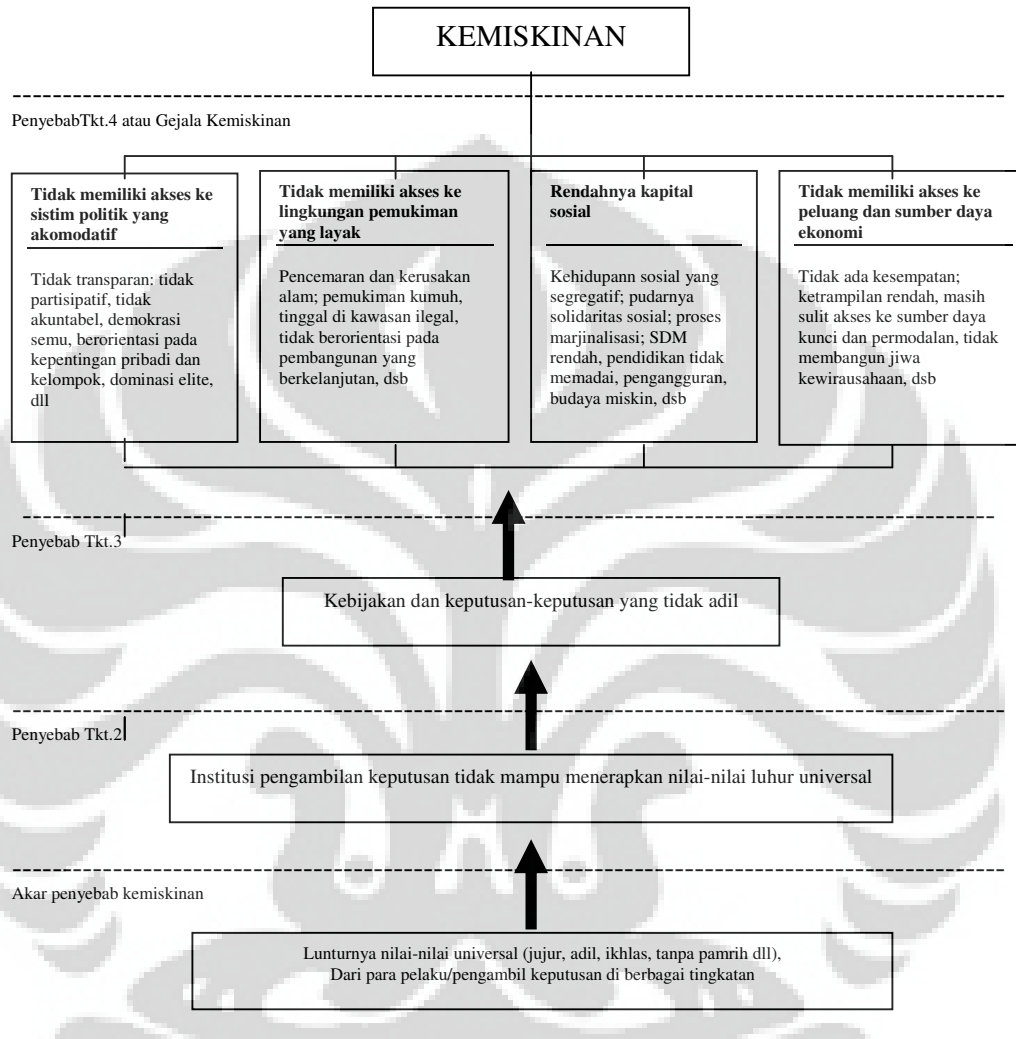


Diagram 5.1
Pandangan PNPM Mandiri Perkotaan tentang Akar Penyebab Kemiskinan
(Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan)

Refleksi kemiskinan yang dilakukan oleh relawan melalui pemetaan swadaya menghasilkan data tentang jumlah keluarga miskin, potensi wilayah baik itu ekonomi, sosial, lingkungan, sumberdaya manusia, prasarana permukiman, dll. Pemetaan swadaya mengembangkan metode dan teknik yang menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat kajian yang

dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuhan sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi dirinya dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Pemetaan swadaya bertujuan untuk menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi, menganalisis masalah dan potensi masyarakat, dalam artian bahwa relawan tersebut harus bisa melakukan survey untuk menentukan wilayah mana yang berpotensi untuk dilakukan program tersebut. Denny Sanjaya sebagai Konsultan pada KMP melalui petikan wawancara berikut ini:

“Pemetaan swadaya mendorong masyarakat untuk melakukan survey berdasarkan kriteria yang ada, berapa KK, berapa jumlah penduduk yang masuk dalam kriteria tersebut. Hasil tersebut menjadi basis data untuk membuat PJM (Program Jangka Menengah), potensi apa yang mereka miliki, kemudian mereka diajarkan mencari akar masalah, baik di tingkat ekonomi, sosial ataupun yang lainnya, potensinya apa. Lalu di gabung, dibuat perencanaan.” (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 Mei 2011)

Sama seperti yang disampaikan oleh bapak Yusri, seperti dalam petikan berikut ini;

“swadaya itu nga berupa duit juga nga....jadi makanan, berupa gorengan, kopi....kita itung juga...oh...swadaya masyarakat ini..ini..ini...kita bikin di laporan...yang penting swadaya.” (wawancara dengan Bapak Yusri Abdillah tanggal 23 september 2011)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sukiman selaku Ketua TPP RW 03 sebagai berikut:

“kita banyakkkan swadaya bu...emang sih banyak warga yang tidak mau berpartisipasi, mereka pikir ini proyek sosial...nga ada duitnya...tapi begitu kita kerjain mereka banyak kok yang bantu swadaya...ada yang ngasi kopi, cemilan.....ada juga yang ngasi pasir....sisa dari punya orang itu....tapi minimal mereka mau bantu lah bu...(wawancara dengan Bapak Sukiman pada tanggal 27 september 2011)

Dalam pemetaan swadaya ini masyarakat diharapkan mampu untuk memahami persoalan nyata mereka sendiri yang berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan, melainkan daftar kebutuhan yang bermanfaat bagi lingkungan terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hasil dari pemetaan swadaya di Kelurahan Roa Malaka ini adalah berada di RW 03 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 178 jiwa 35 KK, dibandingkan dengan RW 01 dan RW 02 yang mayoritas hanya berupa pergudangan dan perkantoran. Berdasarkan hasil dari musyawarah yang telah dilakukan masyarakat di RW 03, sehingga menghasilkan kegiatan yang memang diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tidak ada kegiatan ekonomi dan sosial karena memang selain 2 kegiatan tersebut tidak masuk dalam program PNPM Mandiri Perkotaan khusus DKI Jakarta, hal tersebut juga bukan kemauan dari masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusri Abdillah sebagai relawan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka melalui petikan wawancara berikut ini:

“ rata-rata mau peninggian jalan....pengaspalan atau di beton lah....tapi kita liat kualitasnya juga bu...apalagi anggarannya bu...anggarannya minim banget kalo di roa malaka ini...cuma satu TPP doang...satu RW doang....volumenya juga nga banyak,,makanya di RW3 ini minim banget anggarannya...jadi kita pinter-pinter kita ngolah berapa program ini. (wawancara dengan Bapak Yusri Abdillah tanggal 25 september 2011)

Kriteria penentuan masalah kebutuhan di Kelurahan Roa Malaka yang terdiri dari 3 RW dan 27 RT yang dapat di proses lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kebutuhan mendasar
2. Masalah/kebutuhan yang dianggap mendesak
3. Dirasakan oleh warga masyarakat, terutama masyarakat miskin
4. Masalah sering muncul
5. Tersedia potensi dan sumber daya
6. Rendahnya pendidikan masyarakat
7. Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung

Dan permasalahan tersebut diatas dapat dikalsifikasikan dalam 3(tiga) kategori, diantaranya:

1. Permasalahan di bidang sosial

Permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di wilayah Kelurahan Roa Malaka adalah karena banyaknya warga miskin, pendidikan masyarakat miskin/piatu yang terhambat, manula/jompo, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, rendahnya keterampilan usia produktif serta perumahan masyarakat miskin yang tidak layak huni. Selain daripada itu, masalah kesehatan pun menjadi faktor utama kemiskinan, yaitu banyaknya balita kurang gizi, polusi udara, kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil, penumpukan sampah, posyandu yang tidak layak, serta air yang sudah tercemar sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kurangnya penggalian potensi Sumber Daya Manusia (SDM), sunatan massal, kepedulian terhadap masyarakat yang terkena musibah (meninggal) kurang perhatian terhadap anak yatim piatu dan jompo merupakan salah satu permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

2. Permasalahan di bidang ekonomi

Permasalahan di bidang ekonomi di wilayah Kelurahan Roa Malaka adalah kurangnya modal usaha, pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan akses pemasaran produk rumahan seperti usaha makanan ringan, sembako, bengkel dan lain sebagainya sehingga usaha yang ada di Kelurahan Roa Malaka sulit untuk berkembang. Kenyataanya, potensi masyarakat yang ada di Kelurahan Roa Malaka cukup baik dan di dukung oleh letak geografis yang memungkinkan untuk pengembangan usaha yang bersifat usaha rumahan (home industri)

3. Permasalahan di bidang lingkungan

Permasalahan di bidang lingkungan di wilayah Kelurahan Roa Malaka adalah masih banyaknya jalan-jalan/jalan setapak/gang yang

rusak dan akan banjir apabila terjadi hujan. Saluran airnya pun tidak dapat menampung air hujan dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

Hasil dari pemetaan swadaya tersebut menjadi dasar pembuatan PJM Pronangkis. PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. PJM Pronangkis ini kemudian dijabarkan menjadi Rencana Tahunan (Ren-Ta) yang merupakan rencana investasi tahunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam suatu kelurahan. Rencana Tahunan ini juga harus dilakukan secara partisipatif dan dievaluasi setiap tahun, sedangkan PJM Pronangkis dievaluasi setiap 3 tahun sekali. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Denny Sanjaya, Konsultan pada KMP dalam petikan wawancara berikut ini:

“ Hasil pemetaan swadaya tersebut menjadi basis data untuk membuat PJM (Program Jangka Menengah), potensi apa yang mereka miliki, kemudian mereka diajarkan mencari akar masalah, baik di tingkat ekonomi, sosial ataupun yang lainnya, potensinya apa. Lalu di gabung, dibuat perencanaan. PJM ini untuk 3 tahun. Data tersebut berisi daftar KK yang bisa dibantu, dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Lingkungan pun permasalahannya misalkan banjir, daerah-daerah yang tergenang air, jalan yang belum diaspal/dibeton, lalu dibuat rabat beton, sesuai dengan keinginan mereka”.
(wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 Mei 2011)

PJM Pronangkis harus disusun secara partisipatif oleh tim inti perencana yang dibentuk oleh LKM, terdiri dari unsur LKM, relawan, warga dan secara interaktif dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat luas melalui media. PJM Pronangkis dapat terdiri dari investasi pembangunan prasarana yang sudah diidentifikasi dari awal survey yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh LKM dengan membentuk panitia pembangunan (KSM), atau kegiatan pembangunan prasarana skala

kecil yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat dan termasuk dalam sektor prasarana yang memang diprioritaskan, atau kegiatan pinjaman bergulir yang nantinya menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi kredit mikro. Saran lainnya yaitu berupa kegiatan sosial untuk membantu warga yang benar-benar tidak mampu. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bapak Denny Sanjaya sebagai Konsultan di KMP berikut ini:

“Dalam PJM yang sudah dibuat, mereka memilih anggota LKM. Anggota LKM yang sudah terbentuk ini sudah disiapkan datanya oleh para relawan-relawan tadi. PJM jadi, anggota LKM nya juga sudah terbentuk. LKM yang bertanggungjawab untuk melaksanakan PJM tersebut. LKM tidak langsung sebagai pelaksananya, ada yang namanya Unit Pengelola” (wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 Mei 2011)

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Firman Yoga, Koordinator Kota Jakarta Barat melalui petikan wawancara berikut ini:

“ PJM, Perencanaan Jangka Menengah adalah rencana-rencana apa yang akan dilakukan, sebagai rekomendasi lah, baik ke pemerintah, baik ke swasta atau masyarakat sendiri nanti yang akan melakukannya.....nah melalui swadaya, tapi dilakukan melalui sebuah perencanaan. Perencanaan ini bukan mutlak yang akan dibiayai oleh program, yang harus dikoordinasikan” yang mana yang bisa diakses...atau mana yang bisa dilakukan dalam PJM ini..seolah-olah PJM ini adalah company profilenya BKM/LMK...(Wawancara dengan Bapak Firman Yoga pada tanggal 14 Juni 2011)

Setelah 1 tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan sudah tepat tujuan dan tepat sasaran dan bagaimana hasilnya. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperbaharui data-data yang ada, sehingga kesalahan-kesalahan akan segera dapat ditemukan dan dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan program apabila diperlukan.

2. Sumberdaya Dana

Sebagian besar dana PNPM Mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, diperlukan juga dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM. PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari swasta, swadaya masyarakat dan berbagai donor baik berupa hibah maupun pinjaman. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Denny Sanjaya dalam petikan wawancara berikut ini:

“ DKI termasuk wilayah tipikal tinggi jadi APBD nya harus minimal 50%, tetapi dari tahun 2007 sampai 2010 ini belum mengalokasikan...di tahun 2010 terakhir ini itu hampir kita stop...dari Word Bank pun ada... Word Bank dari tahun 1999 sampai pertengahan tahun 2009dana yang disalurkan full dari WB langsung kepada masyarakat melalui pemerintah dengan nama Budget Anggaran IBRD, jadi beda. Sekarang berubah....untuk wilayah 1 (DKI, Kalbar, Banten dan Sumatera) sekarang penanganannya dari IDB (Islamic Development Bank), WB hanya wilayah 2 saja (Jawa Timur, Kaltim, Jawa Tengah, Jogja, Sulawesi).(wawancara dengan Bapak Denny Sanjaya pada tanggal 13 Mei 2011)

Senada dengan pendapat Bapak Denny Sanjaya, Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D sebagai pemerhati PNPM Mandiri mengemukakan mengenai pengalokasian dana PNPM Mandiri yang harus disalurkan secara efektif agar tidak sia-sia, berikut adalah petikannya:

“lebih efektif dikembangkan di daerah asal migran....dananya bisa dialihkan...dengan pengalihan itu justru akan mengurangi jumlah penduduk di Jakarta.....nanti kan malah pada jadi transmigran...seharusnya di lokasi migran lebih banyak anggarannya, sekitar 20% bisa dialihkan dananya, jadi wilayah sendiri bisa berkembang...jadi nanti akan muncul keahliannya...apa pengelolaan keuangan..menyiapkan tenaga-tenaga di tingkat lokal sehingga mereka bisa menggunakan teknologi yang tepat guna...kalau sudah berhasil nanti akan banyak yang kembali ke daerahnya

masing-masing dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan yang di dapat di Jakarta. Jadi pertama, mencegah orang untuk masuk ke Jakarta, dengan cara mengembangkan daerah asalnya, yang ke 2 bisa dengan meng-transmigrasikan orang Jakarta ke daerah lain ...untuk pengembangan wilayah harus seperti itu, jangan terkonsentrasi ke satu tempat...nga akan sanggup...masih bisa dikembangkan lah..”(wawancara dengan Prof.Isbandi Rukminto Adi,Ph.D pada tanggal 15 Desember 2011)

Penyaluran dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ke rekening masyarakat dan pemanfaatannya dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan dan jenis bantuannya. Pembukuan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan LKM (karena LKM yang mengelola keuangan dari semua kegiatan). Dengan demikian semua transaksi keuangan harus dicatat dengan benar agar dapat disusun suatu Laporan Keuangan Bulanan dengan benar.

Dalam rangka mempersiapkan tertib administrasi LKM, khususnya dalam masalah administrasi keuangan, maka KMW memberikan pelatihan tentang penatabukuan kepada LKM dan Unit-Unit Pengelola. KMW melalui Tima Fasilitator dan Relawan masyarakat akan membantu LKM dalam memproses penatabukuan LKM sehingga pada akhir tahun buku pihak LKM sudah siap dalam menerima audit yang akan dilakukan oleh akuntan independen.

Tiap KSM wajib menatabukukan kegiatannya maupun keuangannya dengan cara yang cukup sederhana yang akan disiapkan oleh KMW. Penatabukuan ini akan dijadikan bahan laporan kepada anggota LKM pada pertemuan bulanan sekaligus menjadi alat pantau secara dini terhadap kedisiplinan pengembalian pinjaman anggota (untuk bina ekonomi). Dengan kata lain, fasilitator beserta relawan masyarakat harus membantu KSM yang di dampingiya agar pengurus KSM tersebut pada masa berikutnya mampu mengerjakannya secara mandiri. Jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan BLM, maka satuan kerja PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan rekomendasi

dari konsultan pendamping maupun pemerintah setempat dimungkinkan untuk membatalkan penyaluran dana BLM sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusri Abdillah melalui petikan wawancara berikut ini:

dia langsung....diperiksa, diproses, dilihat...trus pembukuan juga dilihat semua, per-bank-an juga dilihat...jadinya semua...trus apa namanya...rekening juga dilihat, bener apa nga kita menyalurkan dananya...ada bonnya semua...kompli...wah...di cek semua dah bu PNPM ini... ribet banget kayaknya...(wawancara dengan Yusri Abdillah pada tanggal 25 September 2011)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di RW 03 Kelurahan Roa Malaka, 3 macam kegiatan fisik yang dilakukan dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan swadaya masyarakat. Adapun besarnya anggaran untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar Rp.30.000.000 yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam kegiatan yang disesuaikan dengan usulan yang disampaikan, yaitu:

1. Pembuatan Bak Sampah

Untuk pembuatan bak sampah ini, berdasarkan LPJ KSM Lingkungan yang peneliti terima, banyaknya bak sampah yang diusulkan yaitu sebanyak 9 unit dengan volume untuk masing-masing bak sampah adalah 1,25 m x 1 m x 0,80 m yang diperuntukan untuk masing-masing RT yang ada di RW 03 Kelurahan Roa Malaka.

Pelaksanaan pembuatan bak sampah ini selama 18 hari kerja dengan total anggaran Rp.10.506.000,-. Dana tersebut diperoleh dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak Rp.9.000.000,- dan rencana swadaya sebanyak Rp.1.500.000,- tetapi yang diperoleh lebih besar, sebanyak Rp.1.560.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Penyaluran Dana-Lingkungan (SPPD-L) tentang cara pembayaran disebutkan bahwa:

- a. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan dalam 3 tahap melalui rekening bank Pihak Kedua (Bapak Sutrisno, Ketua KSM) oleh Pihak Pertama (Bapak Sukiman, Koordinator TPP RW 03).

- b. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai yang disetujui sebagai uang muka, yaitu Rp.9.000.000,- tetapi baru dilakukan penarikan tahap I sebesar Rp.4.500.000,- sehingga masih tersisa Rp.4.500.000,-.
- c. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 50% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun penarikan tahap II yang digunakan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga masih tersisa dana Rp.900.000,-
- d. Tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 90% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun dana yang ditarik sebanyak Rp.900.000,- sehingga tidak ada dana lagi yang disalurkan untuk kegiatan ini. Berikut ini adalah hasil PNPM Mandiri Perkotaan dari pembuatan tempat sampah di wilayah RW 03 Kelurahan Roa Malaka.



Gambar 5.1 Tempat Pembuangan Sampah
Sumber : Gambar di ambil oleh penulis pada tanggal 16 Oktober 2011

2. Pengadaan Gerobak Sampah

Banyaknya gerobak sampah yang diusulkan yaitu sebanyak 4 unit dengan volume untuk masing-masing gerobak sampah adalah 160 m x 1,02 m x 0,80 m yang diperuntukan bagi RT 01, RT 02, RT 08 dan RT 09 yang ada di RW 03 Kelurahan Roa Malaka.

Pelaksanaan pembuatan gerobak sampah ini selama 10 hari kerja dengan total anggaran Rp.8.000.000,-. Dana tersebut diperoleh dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak Rp.6.500.000,- dan rencana swadaya sebanyak Rp.1.500.000,- dan yang diperoleh pun sama, yaitu sebesar Rp.1.500.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Penyaluran Dana-Lingkungan (SPPD-L) tentang cara pembayaran disebutkan bahwa:

- a. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan dalam 3 tahap melalui rekening bank Pihak Kedua (Bapak Dede Romjali, Ketua KSM) oleh Pihak Pertama (Bapak Sukiman, Koordinator TPP RW 03).
- b. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai yang disetujui sebagai uang muka, yaitu Rp.6.500.000,- tetapi baru dilakukan penarikan tahap I sebesar Rp.3.250.000,- sehingga masih tersisa Rp.3.250.000,-
- c. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 50% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun penarikan tahap II yang digunakan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga masih tersisa dana Rp.650.000,-
- d. Tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 90% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana

dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun dana yang ditarik sebanyak Rp.650.000,- sehingga tidak ada dana lagi yang disalurkan untuk kegiatan ini. Inilah hasil pembuatan gerobak sampah dari program PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka.



Gambar 5.2. Gerobak Sampah
Sumber : Gambar diambil oleh penulis pada tanggal 16 Oktober 2011

3. Perkerasan jalan rabat beton

Pekerjaan perkerasan jalan rabat beton berdasarkan volume yang diusulkan yaitu 187,5 m dengan rincian 125 m x 1,5 m yang diperuntukan bagi RT 03 dan RT 09 yang ada di RW 03 Kelurahan Roa Malaka.

Pelaksanaan perkerasan jalan rabat beton ini dilakukan selama 6 hari kerja dengan total anggaran Rp.15.612.000,-. Dana tersebut diperoleh dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak Rp.13.000.000,- dan rencana swadaya sebanyak Rp.2.500.000,- dan ternyata dana yang diperoleh lebih besar, yaitu sebesar Rp.2.612.000

Berdasarkan Surat Perjanjian Penyaluran Dana-Lingkungan (SPPD-L) tentang cara pembayaran disebutkan bahwa:

- a. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan dalam 3 tahap melalui rekening bank Pihak Kedua (Ibu Sherlyanti, Ketua KSM) oleh Pihak Pertama (Bapak Sukiman, Koordinator TPP RW 03).

- b. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai yang disetujui sebagai uang muka, yaitu Rp.13.000.000,- tetapi baru dilakukan penarikan tahap I sebesar Rp.6.500.000,- sehingga masih tersisa Rp.6.500.000,-
- c. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 50% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun penarikan tahap II yang digunakan sebesar Rp.5.200.000,- sehingga masih tersisa dana Rp.1.300.000,-
- d. Tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) maupun Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah tercapai sebesar 90% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti berupa nota dan kuitansi. Adapun dana yang ditarik sebanyak Rp.1.300.000,- sehingga tidak ada dana lagi yang disalurkan untuk kegiatan ini



Gambar 5.3. Pengerasan Rapat Beton
Sumber: Dokumentasi PNPM Mandiri Kelurahan Roa Malaka

Setelah semua masing-masing kegiatan tersebut selesai, selanjutnya dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) yang dikerjakan oleh masing-masing ketua LKM yang selanjutnya diserahkan kepada faskel. LPJ KSM Lingkungan ini terdiri dari:

- a. Surat Perjanjian Penyaluran Dana-Lingkunga (SPPD-L),
- b. Berita Acara Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) atau Pre Construction Meeting (PCM),
- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2),
- d. Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Sumber-sumber dana tersebut harus dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh lembaga yang mengerjakannya. Apabila KSM maupun LKM tidak mempergunakan dana tersebut dengan baik dan tidak ada nya transparansi, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang penggunaan dana tersebut. Informasi yang masyarakat dapatkan bukan hanya mengenai dana saja, tetapi juga mengenai orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga tersebut. Para relawan tersebut apabila tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik maka masyarakat berhak meminta untuk diganti dengan anggota yang baru. Begitupun dengan masalah pendanaan, masyarakat berhak mengetahuinya dan apabila ada terjadi penyelewengan dana, maka dapat diajukan ke jalur hukum atau dapat melalui jalan kekeluargaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak awal dipantau terus menerus untuk melihat apakah rencana yang telah disusun bersama dilaksanakan dan apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan dipelajari dan diperbaiki agar tetap dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

5.2.4. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan (G.R.Terry). Koordinasi hanya mungkin dilakukan apabila terdapat kesadaran dan kesediaan sukarela dari individu-individu di dalam unit organisasi unit kegiatan yang memiliki pekerjaan yang saling bergantung. Dalam koordinasi dilakukan hubungan 2 atau lebih individu atau unit organisasi, sehingga dalam koordinasi sangat dibutuhkan peran komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang efektif diharapkan tidak akan timbul kesalahpahaman diantara pelaku-pelaku koordinasi.

Dengan demikian komunikasi penting keberadaannya dalam suatu koordinasi, sebab komunikasi merupakan jalinan yang dapat menimbulkan pengertian antar pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga apapun yang disampaikan baik berupa perintah, saran maupun petunjuk dapat dipahami dan dilaksanakan. Ada beberapa cara melakukan koordinasi, yaitu:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
2. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri.
3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, dll.
4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

Koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah koordinasi prosedural. Koordinasi prosedural adalah koordinasi yang dilakukan antar orang-orang atau antar unit sesuai dengan struktur organisasi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini koordinasi yang dilakukan yaitu antara relawan, dengan KSM dan LKM. Koordinasi tersebut berupa mengecek dilapangan bersama

dengan fasilitator kelurahan, dari mulai pengerjaan rancangan gambar sampai dengan selesainya kegiatan tersebut. Karena adanya pembagian kerja dalam organisasi, maka individu atau kelompok merupakan bagian dari organisasi dan mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan tersebut harus dapat diarahkan guna mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip dari koordinasi adalah:

1. Prinsip kesatuan arah dan tujuan

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka, arahnya adalah bagaimana memberdayakan potensi yang ada di masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami pentingnya program ini dan manfaat yang dapat dirasakan dari program ini.

2. Prinsip tentang kesepakatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya. Jadwal pelaksanaan kegiatan ini harus dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diusulkan, apabila terjadi keterlambatan pengerjaan maka pencairan dana pada tahap selanjutnya pun akan terlambat.

3. Prinsip ketaatan / loyalitas

4. Prinsip saling tukar informasi tentang kegiatan, hasil yang dicapai dan masalah yang dihadapi.

5. Prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu.

6. Prinsip profesionalitas.

7. Prinsip saling dapat dipercaya.

8. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi.

9. Prinsip efisiensi.

10. Prinsip adanya koordinator atau pimpinan yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Adanya koordinasi yang baik ini dalam menjalankan program yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini menghasilkan tujuan dan sasaran yang tepat sesuai dengan yang diharapkan.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kelurahan Roa Malaka secara umum maupun gambaran dan bahasan secara khusus tentang siklus tahapan PNPM Mandiri Perkotaan dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mengerjakannya, baik itu relawan, LKM, KSM maupun TPP RW 03 Kelurahan Roa Malaka. Keberhasilan program ini merupakan kerjasama antara lembaga-lembaga yang terbentuk dengan stakeholder yang ada, sehingga masyarakat merasa puas dengan hasil dari kegiatan ini. Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut, ada hal yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki pada masa yang akan datang, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Berperan aktifnya tidak hanya melalui swadaya dananya saja, tetapi bisa berupa tenaga maupun pikiran yang dapat di tuangkan dalam usulan-usulan program ke depannya. Hal tersebut menjadi sangat penting karena berkembang atau tidaknya suatu wilayah tergantung dari tingkat kepedulian masyarakatnya untuk membangun wilayah tersebut untuk menjadi lebih baik lagi.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat penulis sampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka mengoptimalisasikan program PNPM Mandiri Perkotaan di RW 03 Kelurahan Roa Malaka pada tahun mendatang, yaitu bagaimana menumbuhkembangkan peran serta aktif masyarakat sehingga program ini dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang, karena PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan program yang dibuat berdasarkan usulan dari masyarakat, hasilnya untuk masyarakat, dan dikerjakan oleh masyarakat.

Rekomendasi lain yang dapat penulis berikan yaitu bentuk sosialisasi yang lebih mendalam sehingga masyarakat lebih memahami tentang program yang akan dilaksanakan baik dari segi pendanaan maupun tahapan-tahapan pelaksanaannya sehingga prinsip transparansi lebih dapat di kedepankan. Fungsi dari fasilitator sendiri hanya sebagai pendamping, dan memberikan saran serta memantau sampai sejauh mana program ini dapat dikerjakan dengan baik dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahab, S. : *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*; Bumi Aksara, Jakarta 1997
- Agustino, Leo, S.Sos: *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*; Alfabeta; Bandung; 2008
- Arikunto, Suharsimi: *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*; PT. Rineka Cipta; Jakarta; 2002
- Bungin, Burhan: *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktialisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2008
- Conyers, Diana: *An introduction to social planning in the third world*; Terjemahan; Gajah Mada University Press; 1993
- Dunn, William M, terj, Muhadjir Darwin. *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta; PT. Hanindita, 1988
- Dwidjowijoto, Riant,N: *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*; PT.Alex Media Komputindo; Jakarta; 2006
- Edwards III, George C: *Implementing Public Policy*: Congressional Quarterly Press; Washington DC; 1980
- Grindle, Merilee. S: *Politics and Policy Implementation in Third World*; Prinseton University Press; New Jersey; 1980
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta; Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI, 2006
- Islamy, M.Irfan: *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*; Bumi Aksara; Jakarta; 2007
- Kountur, Ronny: *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*; Penerbit PPM; Jakarta; 2003
- Lawrance W. Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach* ; Boston: Allyn & Bacon. 2000
- Moleong, J Lexy: *Metodologi Penelitian Kualitatif* : PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1993

- Nugroho, Riant, Dr: *Public Policy*; PT. Alex Media Komputindo; Jakarta; 2009
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, Lina; *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*; Jakarta Grafindo; 2005
- Parsons, Wayne; *Public Policy: An Introduction To The Theory and Practice of Policy Analysis*; Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme, US; 1997
- Parsons, Wayne; *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*; Kencana Predana Media Group, Jakarta; 2008
- Pasolong, Harbani: *Teori Administrasi Publik*; Alfabeta; Bandung; 2007
- Rahardjo, M. Dawam: *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Historis Era Orde Baru*; Khanata-Pustaka LP3S Indonesia dan yayasan dana Sejahtera Mandiri.; Jakarta; 2006
- Tim Penulis Enni Iriani; *Kajian Kebijakan Good Local Governance dalam Optimalisasi Pelayanan Publik: Suatu Evaluasi Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota di Indonesia*; PKP2AI-LAN; 2007
- Subarsono, AG: *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*; Pustaka Pelajar; Yogyakarta; 2008
- Suharto, Edi. PhD: *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*; Alfabeta Bandung; 2008
- Suharto, Edi. PhD: *Analisis Kebijakan Publik*; Alfabeta Bandung 2005
- Syafie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung dan Supardan Modeong: *Ilmu Administrasi Negara*; PT. Rineka Cipta; Jakarta; 1999
- Umar, Husein: *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*; Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; 1999
- Usman, Husaini: *Metodologi Penelitian Sosial*; Bumi Aksara; Jakarta; 2006
- Widodo, Joko; *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*; Jakarta; Bayumedia; 2007
- Winarno, Budi: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*; Pressindo; Yogyakarta; 2004
- Wrihatnolo, Randy R dan Dwidjowinoto, Riant. N; *Manajemen Perberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*; PT. Gramedia, Jakarta 2007

ARTIKEL/PUBLIKASI INTERNET;

Kartasmita, Ginandjar: *Pemberdayaan Masyarakat , Konsep Pembangunan yang berakar pada rakyat*: www.ginandjar.com; diunduh pada tanggal 08-Maret-2011 jam 21.00 WIB

Berita Resmi Statistik BPS Propinsi DKI Jakarta: *Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2010*; www.bps.com

Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang diunduh pada tanggal 20 Februari 2010; www.pnpm-mandiri.org

PNPM Mandiri Perdesaan, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.pnpm-perdesaan.or.id

PNPM Mandiri PISEW, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.pnpm-pisew.org

PNPM Mandiri Generasi, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.generasi.or.id

PNPM Mandiri Lingkungan Mandiri Perdesaa, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.green-pnpm.com

PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.deptan.go.id

PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.kp3k.kkp.go.id

PNPM Mandiri Pariwisata, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 melalui www.budpar.go.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SK No.25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

SUMBER LAIN:

Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Kementerian Pekerjaan
Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Modul Dasar Pembangunan Partisipatif PNPM Mandiri Perkotaan, Departemen
Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pedoman Operasional Baku Perencanaan Jangka Menengah, PNPM Mandiri
Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta
Karya

Laporan Bulanan Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi
Jakarta Barat tahun 2010



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuli Susilowati
Alamat : Jl. Jembatan Besi III Rt.05 Rw. 01 No.11A Jembatan Besi,
Tambora, Jakarta Barat 11320
Telepon : 021.99177944 / 08159961740
E-Mail : yuli_marchia@yahoo.com
Agama : Islam
Status : Menikah

PENDIDIKAN FORMAL

2007 – 2011 : FISIP UI Program Studi Ilmu Administrasi Negara
1997 – 2000 : D3 FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
1993 – 1996 : SMAN 23 Tomang, Jakarta Barat
1990 – 1993 : SMPN 69 Tanjung Duren, Jakarta Barat
1984 – 1990 : SDN 05 Pagi Grogol, Jakarta Barat

PENGALAMAN ORGANISASI

2006 – 2010 : Anggota Dewan Kelurahan di Kelurahan Jembatan Besi
Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA MENDALAM

Tim Konsultan Manajemen Pusat

Nama : Denny Sanjaya
Jabatan : Pengaduan Masyarakat
Tanggal : 13 Mei 2011
Waktu : Jam 09.30 – 11.00
Alamat : Kantor Konsultan Manajemen Pusat
Jl. Administrasi Negara, Pejompongan, Jakarta Pusat

YS : Bisa ceritakan soal PNPM Mandiri pak.

DS : Wilayah 1 itu di DKI Jakarta, Banten, Kalbar dan Sumatera...PNPM Perkotaan di wilayah 1 termasuk DKI, cuma masalahnya kalau untuk implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, kalau untuk pelaksanaannya kita hanya memiliki data umum, kan di Jakarta pelaksanaan PNPM dari tahun 1999, trus kemudian tahun 2000 di stop. Pada waktu itu Gubernurnya Pak Sutiyoso tidak mau (pada sat itu namanya P2KP, bukan PNPM) nga mau masuk ke DKI karena mereka punya program juga yang sama yang namanya Dekel pada waktu itu.....nah terus akhirnya kebentur.....nga masuk.....nga bisa dilaksanakan kegiatan pemberdayaan di DKI semua... khusus di DKI tuh...sampai tahun 2001, 2002, 2003, 2004 vakum tuh...trus tahun 2007 baru masuk.

YS : Berarti tahun 2007 baru mulai lagi?

DS : ya, tahun 2007 baru mulai lagi...tapi dengan nama PNPM langsung...PNPM Perkotaan....memang nama PNPM Perkotaan baru dirubah di tahun 2007, dari namanya P2KP.....nah..coba DKI dimasukkan kembali dan penerimaan di pemerintah daerah sudah boleh masuk....dipersilahkan...tapi implementasinya nga di dukung gitu...kurang di dukung gitu sama pemerintah. PNPM Perkotaan itu cuma masih setengah-setengah, sampai saat inipun masih ada 2 kelurahan yang secara resmi..yang dari pemerintah daerah pun nga mau karena sudah menolak, yang di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kalau yang di Jakarta Selatan kebetulan daerah Pertamina....perumahan Pertamina jadi nga mungkin.... dia nga ada orang miskinnya...perumahan orang elit disitu....lupa namanya kelurahan apa....saya sempat juga menanggapi juga....saya sebetulnya disini menanggapi pengaduan masyarakat...kebetulan saya sempet datang kesana...pokoknya 2 kelurahan itu sampai saat ini menolak.

YS : Alasannya?

DS : Alasannya karena....yang satunya BKMnya merasa tidak mau sistemnya diganti, kalau dulu tahun 1999 itu sistem struktur organisasi yang dibentuk ada ketua, sekretaris dan bendahara dan bantuan pada saat itu pun besar...1 milyaran lebih lah untuk 1 kelurahan...pokoknya milyaranlah di DKI itu...tahun 2001 tuh hancur semua...ada penyelewengan...pokoknya paling bermasalah deh di DKI tuh...ada yang bagus juga, tapi jadi berubah...jadi yayasan, jadi koperasi, jadi perusahaan...pokoknya macam-macam

deh....berubah bukan jadi yang sesuai dengan keinginan kita atau tujuan awal. Trus tahun 2007 ini jalan tuh sampai sekarang tahun 2010, hanya di PNPM Perkotaan ini ada heng antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dari dana APBN kemudian dari dana APBD. Karena DKI termasuk wilayah tipikal tinggi jadi APBD nya harus minimal 50%, tetapi dari tahun 2007 sampai 2010 ini belum mengalokasikan...di tahun 2010 terakhir ini itu hampir kita stop....sudah lah kalau.....menurut pemerintah....direktur apa dirjen....jadi kalau misalkan ada lokasi atau daerah yang tidak menyediakan dana untuk program ini yah maka akan dikeluarkan.

YS : Alasan mereka tidak mau mengeluarkan dana tersebut apa pak? Apa tidak dianggarkan dalam APBD?

DS : Tiap daerah, tidak hanya di DKI saja, hampir beberapa daerah di propinsi lain pun punya alasan yang sama....kayak di Jawa Barat...di Bandung...mereka menolak, alasannya karena tidak adanya MOU atau perjanjian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang dana sharing itu.....DDUB itu.....dana daerah untuk bersama....mereka mempertanyakan itu...mana MOU nya....kalau ada pemerintah pusat harus memperlihatkan itu.

YS : Tetapi sebenarnya MOU itu ada apa tidak?

DS : Tidak ada

YS : Jadi secara lisan saja?

DS : Sebetulnya ada surat keputusan, karena ini di bawah departemen pekerjaan umum ada surat keputusan tentang ya....daerah harus mengalokasikan dana itu.

YS : Berarti yang di bawah Departemen Pekerjaan Umum adalah Tim Pengendalinya, sedangkan Tim Pelaksananya bagaimana? Kalau yang di bawah Kemenkokesra?

DS : Kita tuh sebetulnya gini ya....P2KP itu yang sekarang PNPM Perkotaan itu eksekutif agencynya departemen pekerjaan umum, kalau yang PPK, tingkat kecamatan, itu kan eksekutif agencynya departemen dalam negeri, itu kan masing-masing punya program pengentasan kemiskinan....nah trus daripada masing-masing jalan, ini digabungi aja...di bawah satu atap, dibawah koordinasi menteri kesejahteraan rakyat, trus kemudian menjadi program nasional, jadi perencanaannya perencanaan nasional, masuk ke perencanaan Bapennas, trus jadi PNPM tuh 2007... mulai jalan semua, tapi tetap perencanaan langsungnya di lapangan departemen masing-masing, tapi dibawah langsung kendali menkokesra, makanya ada tim pengendali.

YS : Karena tidak ada MOU, apa yang menjadi dasar Tim Pengendali ini untuk turun ke lapangan? Apakah ada surat perintah atau sejenisnya?

DS : Awalnya kalau secara penugasan sebetulnya ada MOU dengan masing-masing pemerintah daerah, program perkotaan pada awalnya... mereka mengusulkan...tiap daerah itu akhirnya mengusulkan...mereka juga mau....ok, ini hanya suatu pembelajaran, jadi masyarakat yang melaksanakan kegiatan tanpa ada campur tangan dari pemerintah, jadi ini sebetulnya dalam rangka itu sih...awalnya MOU itu nga dibuat karena bantuan yang diberikan langsung dari pusat itu masuk ke rekening masyarakat, tidak melalui siapa pun lagi, tidak ada campur tangan aparat

pemerintah. Nah....kita langsung dampingi, konsultan yang dampingi. Sebetulnya di awal pun program ini sudah jadi bisa diperkenalkan oleh masing-masing departemen menjadi program unggulan masing-masing, melalui dinas masing-masing. Nah cuma, karena sekarang makin meluas, makin banyak, kemudian sekarang programnya makin...intervensinya makin tinggi, trus pemerintah daerahnya juga harus kokoh buggeting, segala macam kepada siklus perkotaannya pun akhirnya mau nga mau muncullah disitu ada MOU, ada DDUB. Nah, kalau kita temen-temen akan melakukan kegiatan dilapangan, kita kulonuwun nya mulai dari gubernur, mereka tau ini program dari departemen pekerjaan umum, tentang pemberdayaan masyarakat. Rata-rata awalnya mereka...ya..haknya diterima..tapi nga full, sekarang mah udah full semua, gubernur dan presiden udah beberapa kali memonitor program kemiskinan ini. Sudah menasional, sudah besar ya sudah tidak monitor dilapangan. Kalau dulu awal-awal ya gitu...hanya pada level gubernur ijin, mulai turun ke bappeda, dari bappeda turun ke bawah lintas sektoral karena dari departemen pekerjaan umum, turun ke masing-masing kelurahan.....nah di kelurahan itu kadang-kadang ada beberapa daerah yang tidak menggunakan surat dari propinsinya.....jadi masuk aja..... tapi kelurahannya diberitahukan oleh camat dari departemen pekerjaan umum tentang pemberdayaan masyarakat.

YS : Siapa yang berhak mensosialisasikan program tersebut? Apakah orang lain atau kalian?

DS : Ya sebenarnya kita-kita juga, konsultan...jadi kan konsultan kita ada yang di tingkat kelurahan yang namanya tim fasilitator, trus ada yang di tingkat kabupaten namanya tim korkot (tim koordinator kota) tingkat kabupaten, tus kemudian ada yang di tingkat propinsi. Tingkat propinsi ini di gawangi oleh tim KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) Propinsi . Jadi kita ada KMP (Konsultan Manajemen Pusat), KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) di tingkat propinsi. Kalau di kecamatan tidak, karena sudah melingkupi...dalam 1 kecamatan itu dilingkupi oleh oleh tim-tim tersebut.

YS : Apakah ada sanksi untuk wilayah yang tidak mengikuti program ini?

DS : Tidak ada, itu tergantung masing-masing daerah.

YS : Apakah ada pemotongan anggaran daerah?

DS : Kalau yang kemarin-kemarin, mereka sebetulnya mempertanyakan tentang tata kelola atau legal formalnya seperti apa....karena mereka tidak tau...dulu di Bandung tahun 1999 itu seperti di Jakarta, sempat bermasalah....kita konsultannya bubar....sama...ditolak, karena alasan sama...merasa daerah yang kaya...yang mampu...anggapannya seperti itu...walikotanya juga nga jelas...setelah di nasionalkan, mereka nga *nggeh*, mau nga mau, mereka dipaksa oleh pemerintah pusat...dari gubernurnya juga...ini program bener...dan itu sudah teruji di beberapa daerah bagus ...akhirnya mereka mau menerima, cuma nga ikut pengalokasian dana cair itu kadang-kadang masing-masing daerah punya alasan...karena budgetnya nga cukup...kalau perkapita daerahnya tingkat nasional, pengalokasiannya bukan untuk itu, mereka belum peduli. Nah....yang belum peduli itu tugas kita sebagai konsultan di tingkat propinsi untuk meyakinkan. Kalau ada program padat...di daerah kan punya program masing-masing..kantor dinas

punya program...kesehatan punya...di masing-masing dinas punya ..kota kabupaten tuh punya...nah itu mending di satu-in, tugas kita untuk meyakinkan itu dengan membuat ekspektasi yang mendorong itu...membuat strategi penanggulangan daerah. Yang menerima...yang akhirnya mereka ngeh itu....oh ya ini perlu juga, walaupun bagaimana dikota-kota besar, di DKI, di Bandung, di Surabaya...yang notabene kota-kota yang cukup maju, cukup tercover, tetapi banyak daerah-daerah kumuh yang belum tersentuh, nah ini harus ada strateginya untuk bagaimana wilayah-wilayah tersebut bisa dibangun juga dengan berprinsip pada pembangunan partisipatif, karena kita mendorong juga harus dari bawah...yah, merubah paradigma pemerintah dari yang dulunya top down (biasanya mereka ada duit dulu baru bikin program, jarang-jarang bikin program dulu) menjadi bottom up...kalo kegiatan di masyarakat paling cuma 60 juta an.

YS : Ada pembagian keuntungan tidak dalam program ini?

DS: : Nga ada...kita nga bisa...nga bisa masuk mereka...karena ya tadi...karena pada awalnya kita membentuk lembaga, namanya BKM/LKM...ini dari masyarakat...masyarakat yang punya masalah...masyarakat yang punya keinginan, punya rencana...masyarakat yang harus gali potensi yang ada disitu dan bagaimana mencari solusi-solusi untuk penyelesaian masalah dan membuat perencanaan-perencanaan. Jadi, sifatnya tidak ada bantuan-bantuan melalui pemerintah, pada awalnya, tetapi baru sekarang bergeser mau mendekati...ya lurah di dekati melalui perencanaan PJM (Program Jangka Menengah) BKM melalui Musrebang, trus masuk lagi ke tingkat kabupaten.

YS : Ada biaya operasional untuk Tim tidak? Untuk Lurah sebagai penanggung jawab misalnya?

DS : Tidak ada....pernah ada, namanya Biaya Operasional...di beberapa daerah harusnya diadakan...memasukkan dana alokasi dari APBD nya...3% sampai 5% dari total APBD yang di sediakan...biaya operasional itu yang nanti digunakan oleh aparat pemerintah dari jajaran yang namanya TKPKD sampai ke bawah ...penanggung jawabnya sebenarnya di level lurah, kalau di kecamatan penanggungjawabnya kalau nga sekcem/kasi. Lurah hanya sebagai penanggungjawab, mereka tidak dibebani apa-apa, tetapi mereka harus tau, dan harus mengerti penggunaan dana di masyarakat dan persoalan yang nantinya akan timbul di masyarakat. Kadang-kadang Lurah tidak mau tahu apabila ada permasalahan di masyarakat karena merasa tidak pernah terlibat secara langsung. Padahal program ini sangat mudah, dana sudah tersedia hanya tinggal membuat programnya saja, daripada masyarakat hanya membuat program-program yang entah sampai kapan dananya tidak pernah turun. Makanya, LKM ini tidak bisa bekerja sendiri, mereka harus bermitra dengan lembaga-lembaga yang ada disitu.

YS : Berarti dana dulu yang ada baru membuat program atau membuat program dulu baru dana turun?

DS : Program dulu, tetapi dana sudah tersedia.

YS : Tahapannya seperti apa sih pak?

- DS : Kita ada siklus, namanya siklus masyarakat. Keegiatannya dari sosialisasi awal, dari tingkat propinsi sampai tingkat kelurahan (instansi). Lalu di tingkat kelurahan namanya RKM (Rebug Kesediaan Masyarakat), artinya masyarakat mau tidak menerima program ini, kalau mau menerima konsekuensi harus mau menuruti peraturan-peraturan yang ada, lalu dibentuklah relawan-relawan di masing-masing RT dan RW tingkat kelurahan kemudian di gabung. Para relawan tersebut dilatih (secara umum dan secara tehnik) dan mengikuti kegiatan yang dinamakan refleksi kemiskinan. Tugas mereka adalah menentukan kriteria kemiskinan yang ada diwilayahnya. Kriteria kemiskinan ini tiap-tiap daerah berbeda-beda, tiap RW juga berbeda-beda, selanjutnya hasilnya digabung dan di ambil kesimpulan kriteria mana yang lebih banyak terdapat di masyarakat kelurahan tersebut. Setelah kriteria di dapat, masuk kepada siklus yang ketiga, yaitu pemetaan swadaya. Pemetaan swadaya mendorong masyarakat untuk melakukan survey berdasarkan kriteria yang ada, berapa KK, berapa jumlah penduduk yang masuk dalam kriteria tersebut. Hasil pemetaan swadaya tersebut menjadi basis data untuk membuat PJM (Program Jangka Menengah), potensi apa yang mereka miliki, kemudian mereka diajarkan mencari akar masalah, baik di tingkat ekonomi, sosial ataupun yang lainnya, potensinya apa. Lalu di gabung, dibuat perencanaan. PJM ini untuk 3 tahun. Data tersebut berisi daftar KK yang bisa dibantu, dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Lingkungan pun permasalahannya misalkan banjir, daerah-daerah yang tergenang air, jalan yang belum diaspal/dibeton, lalu dibuat rabat beton, sesuai dengan keinginan mereka. Tugas kita sebagai konsultan hanya memberikan masukan saja secara tehnik, misalnya kalau jalan hanya di aspal saja maka akan cepat rusak, lalu saya usulkan di rabat beton saja biar awet. Dalam PJM yang sudah dibuat, mereka memilih anggota LKM. Anggota LKM yang sudah terbentuk ini sudah disiapkan datanya oleh para relawan-relawan tadi. PJM jadi, anggota LKM nya juga sudah terbentuk. LKM yang bertanggungjawab untuk melaksanakan PJM tersebut. LKM tidak langsung sebagai pelaksana, ada yang namanya Unit Pengelola. Pada awalnya program ini tidak melalui jalur pemerintah, tetapi ada permissinya ke pemerintah.
- YS : Perbedaan antara Tim Pelaksana dengan Tim Pengendali (di tingkat pusat)
- DS : Kita sebetulnya sebagai Tim Pengendali kegiatan, kalau yang di Kemenkokesra, itu Tim Pengendali dari berbagai macam kegiatan (ada 5 program), kalau yang di tingkat pusat (kita) khusus Tim Pengendali PNPM Mandiri Perkotaan. Program PNPM itu ada 5 macam, Infrastruktur Pedesaan, PISEW, P2DTK, PNPM Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan.
- YS : Wewenang Tim Pengendali sejauh mana? Kalau ada masalah bagaimana?
- DS : Tim Pengendali ini sebagai substansinya...kita konsultan di khususkan mengendalikan kegiatan program dan bagaimana pemanfaatan dananya sesuai dengan sasaran. Program ini harus tepat sasaran, kemudian masyarakat sebagai penerima langsung, kemudian juga program ini harus

betul-betul partisipatif, dari bawah dan benar-benar melibatkan stakeholder yang ada di wilayah. Jadi kita pengendaliannya yang berkaitan dengan masalah program secara umum bisa sampai pada masyarakat, secara substansi masyarakat tau, mengerti, memahami dan melaksanakan yang nanti ujung-ujungnya mereka akan menjadi terbiasa.

YS : Apa yang diharapkan setelah program ini selesai pada tahun 2015 seperti yang dicanangkan?

DS : Intinya kita mengarahkan kepada pengurangan kemiskinan. Dengan jumlah KK miskin itu diharapkan di tahun 2015 yang sekarang jumlahnya mencapai 13 sekian persen nanti bisa turun lagi. Nah, minimal itu...tapi susah diukur ya....untuk mencapai itu susah diukur...itu kan kuantitatif. Sebagai contoh adalah, misalkan dalam 1 kelurahan terdapat 100 orang yang kita bantu, apakah nantinya jumlah kemiskinan akan berkurang? Itu kita nga tau...karena susah diukur, karena hasil kajian kemarin Tim konsultan evaluasi dari Bank Dunia tidak bisa mengkaji secara kuantitatif jumlah KK yang miskin berkurang apa tidak.

YS : Kalau untuk bina sosial apakah ada penyaluran bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan?

DS : Itu dia...kemarin sudah saya wanti-wanti agar program yang usulkan bisa berkelanjutan, misalnya pelatihan montir...trus nanti yang dilatih ini mau diapain nih nantinya? Ada dibberapa kelurahan yang tim pendampingnya kurang ngeh terhadap proses pemberdayaan, sebenarnya inti dari pemberdayaan itu apa...membuat masyarakat yang tadinya tidak mampu, tidak berdaya, yang tadinya tidak punya kemampuan menjadi punya kemampuan. Nah, yang punya kemampuan itu nanti mereka bisa meningkatkan perekonomian mereka minimal. Secara substansi, kita meminta dari tim pendamping kalau melakukan kegiatan harus ada penyalurannya, misalkan pelatihan montir, ada bengkel nga disana? Bisa nga melakukan pelatihan? Jadi bekerjasama dengan pemilik bengkel. Apabila bagus, bisa nga mereka menerima beberapa orang peserta tersebut? Untuk yang pelatihan komputer, apabila LKM butuh ya kita tarik masuk ke LKM atau ditarik masuk ke UPK. Untuk swadaya masyarakat, ada beberapa masyarakat di beberapa kelurahan yang tidak mampu menyumbang tenga tetapi mereka menyumbang material, misalnya mereka punya pasir atau semen yang tidak terpakai. Secara kuantitatif, memang susah untuk mengukur tingkat kemiskinan, tetapi menurut data BPS ada pengurangan jumlah kemiskinan....signifikan atau tidak dengan kegiatan kita ini.

YS : Target yang diharapkan dalam program ini oleh pemerintah pusat apa sih pak?

DS : Berkelanjutan....bisa membangun wilayah mereka sendiri....sebenarnya bantuan yang kita berikan sifatnya adalah simulasi...tantangan...tantangan bagi warga miskin yang mau membuka diri, mau bergerak, mau keluar dari kemiskinan yang selama ini menghimpitnya, trus orang-orang yang mampu, yang kaya, bisa peduli dengan orang-orang tersebut....mereka dari berbagai bidang harus bisa menyalurkan potensi yang mereka miliki dan keluar dari kemiskinan itu.

- YS : Berdasarkan info yang saya terima, dana operasional tim berasal dari Bank Dunia...itu untuk apa saja? Dan besarnya berapa persen karena kan sudah ada dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD?
- DS : World Bank dari tahun 1999 sampai pertengahan tahun 2009dana yang disalurkan full dari WB langsung kepada masyarakat melalui pemerintah dengan nama Budget Anggaran IBRD, jadi beda. Sekarang berubah....untuk wilayah 1 (DKI, Kalbar, Banten dan Sumatera) sekarang penanganannya dari IDB (Islamic Development Bank), WB hanya wilayah 2 saja (Jawa Timur, Kaltim, Jawa Tengah, Jogja, Sulawesi). Masalah operasionalnya sebetulnya pada awalnya disediakan oleh pemerintah kita ...jadi pemerintah yang menyediakan dulu, baru diganti ..kalau bantuan masyarakatnya full dari mereka. Biaya operasional ada di BLM...yah sekitar 5% lah dari total BLMnya. BOP itu bukan untuk honor, itu untuk membeli ATK, untuk transportasi, biaya pertemuan-pertemuan, hal-hal yang operasional aja. Ada beberapa yang pernah menanyakan biaya intensif yang nanti mereka akan dapatkan, tetapi memang tidak ada...lalu apa bedanya dengan program-program pemerintah yang lalu apabila ada biaya intensifnya? Karena kebanyakan abis di biaya operasionalnya saja. Intinya, kita dorong masyarakat untuk peduli, mereka mau membangun daerahnya sendiri dan harus bisa menjaga dana tersebut agar tidak disalah gunakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pelaksanaan apabila ada yang pengangguran dan mau melakukan pekerjaan tersebut, mereka akan dibayar 50% dari harga biasanya, misalnya biaya tukang 60 ribu sehari, maka mereka kita bayar 30 ribu saja, yang 30 ribu adalah swadaya dari masyarakat.
- YS : Apabila pekerjaan fisik ada yang melebihi dari jadwal yang telah ditentukan apakah ada sanksinya?
- DS : Untuk infrastruktur, dana yang kita berikan secara bertahap....ada 3 tahap dana yang kita turunkan...pertama 30% dari total biaya yang diusulkan, kedua 60% lagi, baru tahap ketiga sisanya. Untuk waktunya, mereka yang menentukan, berapa dananya....kita hanya mengontrol aja, survey lokasi, melihat dari usulan dana berapa yang mereka butuhkan...mereka juga harus survey ke 3 toko mana yang harganya paling rendah...kemudian melaporkan kepada fasilitator, ada monitoring minggunya, material apa saja yang dibeli, berapa lama pengerjaannya....setelah selesai pada tahap awal (dana yang turun 30%), lalu mereka meminta permohonan lagi untuk tahap selanjutnya (turun lagi dana 60%) yang sebelumnya diserahkan dulu LPJ nya dengan semua bon-bon pembeliannya. Yang mengecek langsung adalah UPL, bukan fasilitator. Untuk tahap kedua, apabila mereka tidak bisa menyelesaikannya dan tidak sesuai materialnya dengan proposalnya, maka tahap ketiga akan kita pending...mereka harus menyelesaikannya terlebih dahulu, kecuali ada faktor eksternal, misalkan ada kenaikan barang-barang (semen)...itu bisa di tolerir. Apabila ada perubahan karena molornya waktu pengerjaan, maka harus dibuat lagi RAB nya...berita acaranya...dll...baru bisa dilanjutkan lagi programnya.
- YS : Siapa saja sih pihak-pihak yang tidak merespon program ini? Pemerintah Daerah kah? Alasannya apa?

DS : Iya....salah satunya karena otak atik anggaran mereka....mengurangi jatah mereka...proyek APBD untuk jalan misalnya...mereka juga merasa tidak mendapatkan apa-apa...banyakin sih secara individu, bukan secara lembaga. Pada awalnya susah, tapi kita tidak tinggal diam, kita terus mencoba dengan berbagai macam upaya...kadang-danag melalui jalur anggota DPR...kadang-kadang melalui jalur sekda...kadang-kadang secara personil mereka tuh cuek ya...kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

YS : Kalau untuk di DKI pelaksanaannya bagaimana pak?

DS : Ya...hampir sama lah, tapi kalau sudah pekerjaannya jalan, mereka ikut memantau, lama-lama akhirnya merespon juga. Berbeda dengan yang diluar pulau jawa, mereka lebih senang jika dilibatkan langsung dengan program tersebut...pamor mereka akan naik dimata masyarakat...kadang-kadang mereka juga mengeluarkan dana pribadi mereka.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA MENDALAM

Tim Koordinator Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Nama : Firman Yoga

Jabatan : Ketua Tim Koordinator Kota Jakarta Barat

Tanggal : 14 Juni 2011

Waktu : Jam 13.00 – 14.20

Alamat : Kantor Koordinator Kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Jl. Palem Raya No.11 Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan

YS : Yuli Susilowati

FY : Firman Yoga

YS : Mau tanya pak, apasih yang menjadi acuan untuk menyatakan bahwa kelurahan tersebut terbaik pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaannya?

FY : Banyak indikator penilainnya

YS : Tapi yang menjadi acuannya apa pak?

FY : Lebih cenderung kepada progress siklus (partisipasi masyarakat) sama pemanfaatan. Kalau di kita melihat rankingnya dari pendampingannya...lebih cenderung pada pendampingannya, sudah berapa kelurahan yang selesai...kalau kelurahan ngeliatnya dari indikator keberdayaan...kelurahan mana yang berdaya..yang mandiri...bisa dilihat dari keterlibatan masyarakatnya...dari pelaksanaan kegiatannya...atau dari pelaksanaan siklusnya...trus kalau sudah terbentuk semua, ada indikator pelaksanaannya...kalau dari pelaksanaan, sejauh mana mereka bisa menyerap pelaksanaannya...mereka merencanakan, dananya sudah kita bayarkan....sejauh mana mereka bisa memanfaatkan itu.

- YS : Untuk wilayah Tambora, di tahun 2010 bagaimana?
 FY : Untuk Tambora, kecuali Roa Malaka, itu tidak ada pencairan, karena Roa Malaka itu pencairan yang tertunda di tahun 2009, sehingga menjadi kelurahan terburuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaannya karena tidak bisa menyerap anggaran 2009 di tahun 2009...baru bisa terrealisasi di tahun 2010itu dari indikator keterlibatan partisipasi masyarakatnya.
- YS : kalau untuk siklus, indikatornya apa?
 FY : Ya itu...seberapa persen keterlibatan masyarakatnya bisa melaksanakan tahapan-tahapan apa yang ada di siklus tersebut...Roa malaka merupakan kelurahan yang paling terlambat progress keterlibatan masyarakatnya, indikatornya tidak terfasilitasinya BLM yang harusnya terserap di tahun 2009...baru dikerjakan tahun 2010, karena yang lain sudah cair, mereka masih ribut untuk pembentukan lembaganya...di Roa Malaka per tanggal 30 desember saja belum terbentuk kelembagaannya, sedangkan bantuan yang harus diberikan melalui lembaga yang terbentuk dan nanti melalui notaris pengesahannya.
- YS : Berarti tidak bermasalah apabila dikerjakannya tahun depan?
 FY : Sebenarnya bermasalah, karena itu kan bantuan dari pemerintah, jadi harus dilakukan tepat waktu.
- YS : Kalau untuk penyerapan anggaran bagus pak?
 FY : Iya, bagus semua kalau untuk penyerapan anggaran, partisipasi dan kepedulian yang sulit itu.
- YS : PJM itu bagaimana sih pak?
 FY : PJM, Perencanaan Jangka Menengah adalah rencana-rencana apa yang akan dilakukan, sebagai rekomendasi lah, baik ke pemerintah, baik ke swasta atau masyarakat sendiri nanti yang akan melakukannya.....nah melalui swadaya, tapi dilakukan melalui sebuah perencanaan. Perencanaan ini bukan mutlak yang akan dibiayai oleh program, yang harus dikoordinasikannanti disini ada penguatan BKM/LKM..untuk apa BKM di bentuk...untuk apa BKM dikasi pelatihan-pelatihan, ada pelatihan relawan...ada pelatihan penguatan lembaga..dan kita akan kasi sebuah alternatif-alternatif ...yang mana yang bisa diakses...atau mana yang bisa dilakukan dalam PJM ini..seolah-olah PJM ini adalah company profilnya BKM...
- YS : Berarti hasil PJM ini bisa dilakukan di luar PNPM Mandiri dong pak?
 FY : Boleh..makannya PJM ini merupakan benar-benar milik masyarakat, siapa saja boleh menggunakan PJM itu dan terlepas yang mengerjakan siapa, yang penting pemanfaatnya adalah masyarakat setempat, artinya PJM ini sudah terrealisasi. Intinya kan kalo yang sudah terrealisasi kan artinya kerjaan yang telah dikerjakan oleh mereka. Pertama; bukan siapa yang melakukan, Kedua; bukan yang semua direncanakan itu harus dibiayai, karenakan harus mencari nantinya, adapun BLM dari kita itu sebatas media pembelajaran aja...dengan beberapa penguatan-

pengutan bagaimana BLM ini dapat berfungsi dengan melaksanakan aktifitas-aktifitas ke LKM annya di masyarakat dan jadilah BLM...mampu nga....nanti LKM ini akan mempelajari bagaimana membuat proposal yang baik, bagaimana cara menyajikan sebuah pelaporan pertanggungjawaban yang baik, dan bagaimana pula melakukan pekerjaannya dengan baik, tanpa harus ada ketergantungan dari pihak luar, seperti peninngian jalan...tau-tau masyarakatnya diam aja deh..jadi pada dasarnya program ini adalah dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri...PJM ini setiap tahun di update...ada perbaikan-perbaikan dari segi kebutuhan ini, apa ini sudah dilaksanakan apa belum...yang melaksanakan APBD apa APBN atau swasta...setiap tahun itu ini di monitoring dan di evaluasi...PJM ini tidak mutlak harus dilakukan oleh BLM.

Untuk sinergi dengan perencanaan daerah, ini nanti masuk kepada musrembang di kelurahan, untuk mengsinergikannya.

Untuk pelaksanaan dan pemantauan dilakukan oleh masyarakat.....masyarakat harus terlibat aktif...makanya ada yang namanya papan proyek....prasasti...nah nanti yang memantau masyarakat...apakah semuanya sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat.

YS : Lalu hasil pemantauannya diserahkan kepada siapa

FY : Melalui LPJ...kan yang membuat LPJ kan KSM.....KSM melaporkan kepada LKM, BSM menjadikan hasil inisebagai bahan acuan. Lalu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini merupa tinjauan partisipatif, yaitu tinjauan yang dilakukan oleh masyarakat....itu masyarakat disuruh meninjau bareng-bareng...mana perwakilan dari masyarakat...dibentuk tim, namanya Tim Tinjauan Partisipatif..nanti masyarakat akan melihat laporan keuangannya...apa hasil kegiatannya, di lihat, di cek ke lapangan...berapa biayanya, sesuai apa tidak dengan kualitas yang dihasilkan...makanya evaluasi ini meliputi PJM, artinya apakah sudah dilakukan apa belum...trus kelembagaan, apakah sudah menjalankan amanahnya apa belum sebagai lembaga...LKM yang melakukannya, ...untuk keuangan ini nanti di tanyakan dari dana bantuan berapa... swadaya berapa...trus pengelolaannya bagaimana...trus laporannya bagaimana...bukan hanya tau saja tapi juga memantau...mana bukti-buktinya...harus ada bukti bon-bonna...kuitansinya...atau bukti transaksi lainnya....dan mereka berkewajiban setiap bulannya memberikan laporan keuanganbisa dipajang di papan-papan pengumuman yang letaknya strategis...

Untuk refleksi, pemetaan swadaya dan BKM di evaluasi selama 3 tahun sekali...kebanyaknya dari sesudah evaluasi kita kembali ke siklus PJM lagi...ke orientasi lagi...BKM itu kan masa kerjanya 3 tahun sesuai dengan anggaran dasarnya..PJM walaupun ada masa berlakunya, tapi setiap tahunnya di update....renta nya di update, tetapi secara keseluruhan tidak berubah, hanya rentanya aja.

- YS : Berarti untuk tahun depan tidak perlu lagi dibuat refleksi kemiskinannya?
- FY : Tidak usah...langsung ke PJMnya...kalo ada perubahan kan nanti ada yang namanya reorientasi lagi....dikembalikan lagi...ini udah sesuai belum sih...outputnya di PJM ini...di Roa Malaka ini paling minim PJM nya
- YS : Hasil dari evaluasi bagaimana pak?
- FY : Setiap tahun buat daftar...namaya rembug warga tahunan...isinya tentang rekomendasi dari hasil tinjauan partisipatif masyarakat....dalam berita acara...rekomendasinya nanti kalau PJM nya tidak sesuai ya berarti harus di update kembali...kalau kelembagaannya misalnya lembaga konsistensinya kurang baik, dan itu bisa diganti...kelambagannya misalnya lagi keaktifannya kurang...ya harus diaktifkan kembali.....keuangannya misalnya jangan sampai telat untuk penulisan laporannya...kalau ada transaksi harus cepat dicatat...kalau ada pelanggaran dana....bisa di tindak lanjuti secara hukum atau secara kekeluargaan....pokoknya semua dikembalikan kepada warga...kita hanya memberikan opsinya.....kita tidak terlalu intervensi ke dalam.
- YS : Kalau sinergi dengan perencanaan daerah itu bagaimana pak?
- FY : Biasanya melalui musrembang....PJM itu kan bagian dari musrembang, di musrembang itu mencakup kegiatan menyeluruh yang ada di masyarakat, kalau di PJM hanya penanggulangan kemiskinan saja. Tetapi pada kenyataannya kita jarang diundang apabila ada musrembang...ke khawatiran mereka kita tau dapurnya mereka..
- YS : Untuk refleksi kemiskinan outputnya apa pak?
- FY : Outputnya bermuara di PJM semuanya tapi indikatornya adalah kriteria miskin, harapan masyarakat, sasaran untuk pemanfaat, daftar kebutuhan dan akar permasalahan yang akan dipecahkan oleh tim.

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA MENDALAM

Relawan PNPM Mandiri Kelurahan Roa Malaka

Nama Responden : Yusri Abdillah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat informan : Jl. Tiang Bendera Raya

Tanggal wawancara : 25 September 2011
Jam : 19.00 – 21.00 WIB

YS : Yuli Susilowati
YA : Yusri Abdillah

YS : Berdasarkan informasi yang saya terima dari KMW Jakarta Barat, Roa Malaka menduduki peringkat terakhir dari 11 kelurahan di Tambora berdasarkan rendahnya partisipasi masyarakatnya, bagaimana menurut abang? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

YA : Sebenarnya bukannya rendah, tapi warga di Roa Malaka ini kan ada 3 RW, karena PNPM ini dari LKM kan...tingkat kelurahannya namanya.....Lembaga Keswadayaan Masyarakat.....jadi disini cuma diikuti sertakan 1 RW doang...cuma di RW 3 yang ada. Jadi, waktu pembentukan relawan-relawan PNPM itu di kelurahan di adain, RW 1 dan RW 2 tidak bersedia.

YS : Alasannya?

YA : Kurang tau deh pada waktu itu.....jadi dia nga mau ikut...jadi di tingkat kelurahan namanya LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), trus punya bentuk lagi di RW, namanya TPP RW...Tim Program...tim apa namanya.....pokoknya TPP RW aja...ada ketuanya juga....jadi Cuma 1 doang yang ada TPP....cuma di RW 3 aja dengan 9 RT nya.

YS : Berarti hanya 9 RT aja ya?

YA : Ya

YS : Berarti untuk yang di RW 1 dan RW 2 tidak?

YA : Nga

YS : Untuk sosialisasi awal bagaimana bang?

YA : Waktu itu tahun 2009....ini kegiatan tahun 2010

YS : Tapi baru dikerjakan kemarin (2011)?

YA : Ya, anggaran 2010, tapi baru dikerjakan januari tahun 2011 kemarin.....anggaran 2010, dikerjakan 2011...karena kita akhir....tujuan kita bikin laporan, bikin LKM, TPP itu akhir 2010 lah kita terbentuk...dana cair bulan desember lah....mau akhir....

YS : Kenapa seperti itu sih? Apa mencari orangnya susah?

YA : Itulah kepedulian masyarakat, namanya ini kan PNPM sosial bu.....kadang sosial orang males lah...nga ada duitnya...makanya kita di roa malaka ini susah....satu...orang pekerja...etnis...trus banyak orang-orang perkantoran....gudang kosong...warga jarang...jadi ya sebagian juga ada yangnamanya kerja sosial...ya gitulah...kadang mau...kadang nga...nga ada duitnya...udah....karena ini PNPM sosial banget bu...kita nga ada....apa namanya....dapet bulanan...nga....kita sosial buat lingkungan wilayah pemberdayaan masyarakat.

YS : Perlu waktu berapa lama untuk mencari orang-orang itu bang?

YA : Lama ya waktu itu...ada faskelnya...namanya bu tri...dia juga yang menyemangati harus ada di roa malaka ini...harus ada...makanya dia sebenarnya udah putus asa sih....tapi berhubung dia laporan lagi sama pak lurah...dia minta sama pak lurah untuk mengundurkan diri....di sini...di roa malak nga ada, akhirnya pak lurah menyetujui melalui

- RW...jadi RW 3 aja bu...RW 1 dan RW 2 nga ada...nga sanggup...karena kerja PNPM ini berat banget emang...berat banget.
- YS : Yang lebih banyak penduduknya di RW 3 ya bang?
- YA : Iya...RW 2 kebanyakan toko...otomatis di RW 3 emang fokusnya...apa aja kegiatan pasti di RW 3....banyak kegiatan di RW 3...PNPM ini baru ada tahun kemarin...anggaran 2010.
- YS : Kegiatan PNPM Mandiri ini berupa apa aja bang?
- YA : Kita bikin gerobak sampah, bak sampah permanen.....tuh di depan ada tuh....sama rabat beton....kalo gerobak sampah ada di pos RW.
- YS : Rabat beton itu seperti pengaspalan jalan ya bang?
- YA : Ya, tapi di cor....peninggian jalan.
- YS : Volumena bang?
- YA : Aduh...berapa ya...saya lupa...tapi ada di LPJ....tapi volumenya tidak besar...di gang doang...volumena nga begitu besar...itu doang programnya ada 3.
- YS : Itu termasuk dalam kategori fisik ya? Untuk sosial ekonominya tidak ada?
- YA : Sosial ekonomi untuk di Jakarta ini tidak ada....yang ada cuma fisik doang...kalo di daerah udah pasti ada...kalo di jakarta udah pasti nga ada. Dulu kan kayaknya di dewan kelurahan ada sosial sama ekonomi....makanya PNPM ini nga ada di Jakarta, adanya di daerah.
- YS : Tapi tidak berbenturan dengan program Dewan Kelurahan kan bang?
- YA : Nga...nga...kita nga benturan dengan program dewan kelurahan
- YS : Kalau boleh tahu anggaran yang kemarin berapa bang? Untuk 3 kegiatan ini?
- YA : 30 juta untuk 3 macam kegiatan itu.
- YS : Prosentasi pembagian bagaimana? Apakah masing-masing kegiatan anggarannya 10 juta atau bagaimana?
- YA : Tergantung usulannya.
- YS : Bagaimana sosialisasi awalnya? Apa yang dijelaskan kepada peserta?
- YA : Ya...penjelasan mengenai PNPM...trus pembentukan relawan.
- YS : Berapa kali pertemuannya bang?
- YA : Hanya hari itu saja...trus pertemuan lagi, langsung membentuk relawan...relawan ini mencari anggota untuk membentuk lagi TPP...TPP membentuk lagi LKM tingkat kelurahan.
- YS : Itu kira-kira bulan apa bang?
- YA : Tahun 2009 lah...awal 2009...itu terbentuk dulu...jadi awalnya ini orang-orang tau kerjanya berat begitu...udah....vakum bu.
- YS : Tapi kan anggaran belum turun?
- YA : Memang....itu dipercepat maunya turun, tapi....terbentuknya relawan ini nga buru-buru ngebentuk TPP....saya nga tau ada apa....tau-taunya pada vakum gitu....belum terbentuk TPP sama LKM...makanya dana itu nga di turuin...karena yang disini belum terbentuk, cuma relawan doang.
- YS : Berarti pemerintah pusat maunya pembentukan relawan, TPP dan LKM dulu serta apa yang akan di usulkan baru anggaran diturunkan?
- YA : Ya...jadi tahun 2010 mereka meminta lagi...trus kita membentuk lagi...TPP, LKM...tapi TPP ini punya KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)...mereka yang kerja.

- YS : KSM nya siapa?
- YA : KSM nya namanya pak sutrisno...nanti di LPJ juga ada.
- YS : Kalau soal data tentang kemiskinan bagaimana pak?
- YA : Waktu itu sudah pernah buat, tapi akhirnya nga kepake....abis sempet lama vakum karena orang-orangnya pada menggundurkan diri....
- YS : Mereka memang maunya gerobak sampah?
- YA : Ya, karena disini kan mayoritas sampah paling gede ya bu...paling susah banget...warga ngeluhnya soal sampah...fasilitas tong sampah ini...kita betul-betul butuh...dulu dekel kan bikin tong sampah, itu suka ada yang ilang...suka bolong...makanya kita PNPM ini bikin tong sampah yang permanen. Kalau tong sampah juga kita lihat karena minimnya gerobak sampah di RW, di RT...jadi yah kita bikin. Akhirnya ...sampah ini..apalagi kebersihannya bu....berapa orang di RT...gerobak dikit...
- YS : Dari kelurahan bukannya sudah dibuatkan gerobak sampah?
- YA : Dari kelurahan cuma berapa doang, nga begitu.....apa namanya.....kualitasnya kurang bagus...jadi mereka pada ngeluh...karena sampah disini kan padat banget, apalagi penduduknya disini banyakan warga, kalo kantor-kantor kan kertas doang.....ya kalo di RW1 dan RW2 kan kantor-kantor....paling banyak penduduk di RW 3, di banding RW 2, padahal RW 2 ada 12 RT.
- YS : Pada waktu pertemuan ada yang mengusulkan lain nga?
- YA : Nga ada, mayoritas itu, karena itu awal program kita. Kalau kita bikin apa-apa kan dewan kemarin juga ada, takutnya benturan sama program dewan.
- YS : Rata-rata program PNPM sama ya? Contohnya peninggian jalan, tutup got
- YA : Iya....memang udah di usulin, tapi maunya itu...yang bener-bener untuk masyarakat, itu yang penting untuk masyarakat, yang lain nga penting....penting sih penting, tapi yang lebih penting itu yang kita adain.
- YS : Kalau sosial berupa pelatihan-pelatihan, ada yang mengusulkan nga?
- YA : Belum ada bu....disini juga nga ada sosial, dari awal memang tidak ada sosial, cuma fisik doang. Untuk anggaran 2012 kita udah bikin PJM (Program Jangka Menengah).
- YS : Untuk tahun 2012 kapan realisasinya?
- YA : Kurang tahu, saya cuma disuruh bikin doang....bikin PJM (Program Jangka Menengah) fisik sama sosial sama ekonomi, tapi kan sosial sama ekonomi nga mungkin ada di jakarta, tapi siapa tau ada kita udah punya programnya.
- YS : Yang bikin PJM siapa? Apa mengumpulkan masyarakat lagi?
- YA : Mengumpulkan masyarakat lagi
- YS : Di PNPM ini ada pemantaunya nga sih? LSM misalnya?
- YA : LSM? Nga ada....
- YS : ; Setelah kegiatan selesai?
- YA : Biasanya dari PNPM yang memantau...memantau bagaimana mereka bekerja...langsung dari PNPM pusat...
- YS : Tidak ada dari pihak luar?

- YA : Nga ada...kita di pantau langsung dari atas ya bu ya...ini pekerjaan juga di cek.
- YS : Artinya penilaian baik buruknya langsung dari PNPM Pusat?
- YA : Iya...kita di cek langsung...ukuran-ukuran kita harus bener-bener dikerjakan langsung sama kita, diikuti sama mereka...memantau langsung bener apa tidaknya...trus misalnya kayak gerobak sampah kita bikin ini...ini...ini...di cek sama dia, bener apa nga....disitu PNPM bu.
- YS : Berarti nga langsung jadi aja trus baru di cek sama mereka ya?
- YA : Nga...dia langsung....diperiksa, diproses, dilihat...trus pembukuan juga dilihat semua, per-bank-an juga dilihat...jadinya semua...trus apa namanya...rekening juga dilihat, bener apa nga kita *ngituin* dananya...ada bonnya semua...kompli...wah...di cek semua dah bu PNPM ini... ribet banget kayaknya...
- YS : Artinya mereka beneran memantau dan nga hanya terima beres aja ya?
- YA : Yah...cuma kita nih...nih jadi...kadang ada program itu nga mau dilihat lagi...ya udah...tapi ya turun langsung...ada bertingkat-tingkat lah...dia ada yang lihat lapangan.
- YS : Itu orangnya dia aja apa ganti-ganti?
- YA : Ganti-ganti...
- YS : Apa ibu tri itu?
- YA : Bukan, dia faskel kita, cuma mendampingi aja.
- YS : Kalau untuk menyusun rencana kegiatannya bagaimana?
- YA : Pada awalnya faskel dulu yang menjelaskan tentang apa programnya, misalkan apa...apanya...misalnya...apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ...kayak posyandu boleh....berupa renovasi bisa...
- YS : kalau pembuatan posyandu yang baru?
- YA : Oh...itu nga boleh...harus yang udah ada...renovasi-renovasi bentuknya....yang penting untuk kepentingan masyarakat
- YS : Kalau untuk skala prioritasnya ada?
- YA : Ada, rata-rata mau peninggian jalan....pengaspalan atau di beton lah....tapi kita liat kualitasnya juga bu...apalagi anggarannya bu...anggarannya minim banget kalo di roa malaka ini...cuma satu TPP doang...satu RW doang...volumenya juga nga banyak,,makanya di RW3 ini minim banget anggarannya...jadi kita pinter-pinter kita ngolah berapa program ini.
- YS : Dengan anggaran 30 juta ini bagaimana pembagiannya? Untuk gerobak sampah berapa banyak?
- YA : Gerobak bikin 4 buah, untuk tempat sampah permanen masing-masing RT dapat 1, berarti ada 9....yang jalan 2.
- YS : Kalau untuk peninggian jalan?
- YA : Hanya ada di 2 wilayah, di RT 3 dan RT 9...untuk gerobak di pusatkan di pos RW3...karena di RW yang menanggapi masalah kebersihan, di RT nga...tapi paling cuma orang dari RW aja yang jalan untuk kebersihan.
- YS : Kalau untuk pemeliharaan tanggung jawab siapa?
- YA : Dari KSM ini kita...
- YS : Untuk dananya darimana?

- YA : Dananya yang dari kemaren itu...untuk swadaya kan kita harus dicari...dari masyarakat untuk pemeliharaan ini...paling ada warga dari RT 1 dan RT 2 yang ada bulanan, nga masuk ke kita.
- YS : Artinya untuk pemeliharaannya?
- YA : Untuk pemeliharaan ini, apabila rusak atau apa ...belum ada jangka waktu...kan kita ada jangka waktunya bu...jadi...kayak apa namanya...pokoknya apa namanya....kalau kerusakan dia memantau...kayak 2 tahun misalkan, nanti dia memantau lagi...kualitasnya lah...kalau udah rusak ya harus kita kerjain lagi...harus kita bagusin lagi..
- YS : Anggarannya dari mereka?
- YA : Nga...anggaran dari yang kita punya...yang kemaren...yang swadaya yang udah di cairkan itu...uang pemeliharaan namanya...makanya kita disitu ada buat nyari swadaya...swadaya itu untuk merawat...
- YS : Kalau tidak ada swadaya bagaimana?
- YA : Kalau nga ada swadaya ya...kita ada BOP....BOP (Biaya Operasional) kita...kan ada BOP nya....ya itulah yang kita pakai...ya itulah tanggung jawab kita, karena kita ada BOP...untuk uang pemeliharaan...uang perawatan...swadaya itu nga berupa duit juga nga....jadi makanan, berupa gorengan, kopi....kita itung juga...oh...swadaya masyarakat ini..ini..ini...kita bikin di laporan...yang penting swadaya...
- YS : Apa selama ini sudah ada perbaikan?
- YA : Belum
- YS : Saya lihat di laporan dari korkot bahwa Roa Malaka masuk dalam kelompok di kecamatan Tamansari, walaupun rekapannya masuk wilayah Tambora, kenapa seperti itu pak?
- YA : Karena Roa Malaka ini tertinggal bu...dan dalam satu kelompok terdiri dari 10 kelurahan, sedangkan Tambora kan ada 11 kelurahan...jadinya Roa Malaka masuk di kelompok Tamansari yang cuma ada 8 kelurahan, tapi untuk pelaporannya tetap ke Kecamatan Tambora...laporannya juga ke PU jalan.
- YS : Berarti pelaporannya diserahkan kemana saja?
- YA : Faskel tingkat kelurahan....pak lurah blm dilaporkan, paling kecamatan aja.
- YS : Ada campur tangan dri pihak kelurahan tidak?
- YA : Nga, cuma bentuk pelaporannya aja yang saya laporkan...dari awal program kita cuma laporan ke lurah aja...laporan hasil akhir...emang sih saya baru laporan lisan, belum secara tertulis... tidak harus turun ke lapangan.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA MENDALAM

Koordinator TPP RW 03 PNPM Mandiri Kelurahan Roa Malaka

Nama Responden : Sukiman
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat informan : Jl. Tiang Bendera Raya
Tanggal wawancara : 27 September 2011
Jam : 20.00 – 21.00 WIB

YS : Yuli Susilowati
S : Sukiman

YS : Menurut bapak PNPM Mandiri ini bagaimana?

S : Menurut saya bagus, kita jadi bisa mandiri, karena kita disini diajarkan cara-caranya.....cara nyari siapa aja yang tergolong miskin...cara bikin apa aja yang kita butuhin...trus baru kita ajuin ke faskel...itu juga yang mau kan masyarakat, bukan kita

YS : Waktu itu sosialisasinya bagaimana pak?

S : Ya begitulah bu..udah agak lupa yah...dah lama sih...tp kayaknya tentang PNPM Mandiri itu apa...apa yang bisa diusulkan masyarakat...bagaimana ngusulinnya.....trus siapa-siapa aja yang mengerjakannya...oh iya..waktu itu ada pembentukan relawan...itu yang ngerjain programnya katanya...kita disuruh nyari orang buat relawannya.

YS : Ada berapa orang yang diminta pak?

S :Relawan waktu itu yang terbentuk ada 25 orang bu...itu perwakilan dari seluruh RT, tapi nga semua sih bu...yang mau-mau aja...soalnya ini kan kerja sosial, nga ada gajinya...rata-rata mereka pendidikannya sampe SMP doang....ada beberapa yang sampe SMA sih bu...trus kerjanya serabutan aja..nga semua punya kerjaan tetap...tapi kok akhirnya yang aktif cuma tinggal 5 orang aja...nga tau pada kemana semua...

YS : Kalau LKMnya bagaimana pak?

S :LKM itu ada 9 orang, masing-masing RT diwakili oleh 1 orang, tetapi yang masih aktif dan mau bekerja cuma ada 3 orang aja bu...yang lain nga tau kemana bu.

YS : Kalau untuk pemetaan swadaya bagaimana pak?

S : Saya yang terjun langsung ke lapangan bu...tanya-tanya langsung ke masyarakat...mana yang lebih banyak mereka mau...rata-rata maunya tempat pembuangan sampah sama gerobak sampah, kalo RT 3 sama RT 9 maunya pengaspalan jalan karena sering banjir kalo ujan

YS : Mayoritas kegiatan yang masyarakat butuhkan apa sih pak?

S : Kalau soal kegiatan fisik, masyarakat maunya bikin tempat sampah di tiap RT, biar nga jauh buangnya.....soalnya sampah banyak banget sih bu...abis warganya banyak....yang banyak warganya kan di RW 3 aja, di RW 1 sama RW 2 kan sedikit warganya....jadi yah...minta bak sampah yang bagus aja katanya.

YS : Susah nga pak nyari orang untuk menjalankan program ini?

S : Kita banyakkan swadaya bu...emang sih banyak warga yang tidak mau berpartisipasi, mereka pikir ini proyek sosial...nga ada duitnya...tapi begitu kita kerjain mereka banyak kok yang bantu swadaya...ada yang ngasi kopi,

cemilan.....ada juga yang ngasi pasir....sisa dari punya orang itu....tapi minimal mereka mau bantu lah

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA MENDALAM

Pemanfaat Bina Fisik PNPM Mandiri Kelurahan Roa Malaka

Nama Responden : Rohayati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Tiang Bendera Rt.03 Rw.03 Kel. Roa Malaka
Tanggal : 28 September 2011
Jam : 13.00 – 14.10 WIB

YS : Yuli Susilowati
RY : Rohayati

YS : Ibu tahu soal PNPM Mandiri
RY : Tau neng, tp cuma sedikit....PNPM itu yah kayak PPMK yang di dekel, cuman ini yang ngerjain warga....semacam program pemberdayaan untuk warga, jadi memberdayakan warga supaya mau mengerjakan proyek ini.

YS : waktu itu sosialisasinya seperti apa?
RY : “ ya, waktu itu saya diundang sama pak RT, ternyata sosialisasi soal PNPM Mandiri Perkotaan itu...dijelasin soal PNPM Mandiri Perkotaan itu apa, kegiatannya apa aja, apa aja yang harus kita kerjain...yah...pokoknya tentang program itu semua dah...trus kita di tanyain siapa yang bisa jadi relawannya....saya juga nga tau kenapa RW 1 sama RW 2 nga mau....mungkin nga ada orangnya kali”.

YS : Kalau untuk pembentukan pengurusnya ibu tau?
RY : Kalau untuk pembentukannya saya nga tau...tapi orang-orangnya saya tau...tapi nga tau sebagai apa....pokoknya pas bikin jalan mereka pada ada aja....yah..kita sih seneng-seneng aja jalan jadi bagus....walaupun nga bisa bantu apa....palingan juga ngasi kue atau kopi...itu juga kalo ada kuenya.

YS : Ada yang bantu selain itu nga bu? Misalnya tenaganya?
RY : Ada sih....tapi yah dibayar juga, walaupun saya denger-denger katanya setengah harga tukang.....setengahnya swadaya masyarakat katanya....kasian sih...tapi yah gimana lagi, namanya juga kerja sosial, yang penting lingkungan terutama jalan jadi baguslah.

YS : Ibu tau program-program PNPM Mandiri di Roa Malaka?
RY : Yang saya tau bikin jalan ini, trus gerobak, trus bikin bak sampah...kalo jalan katanya cuma di 2 RT aja, RT 3 sama RT 9...kalau yang bikin

tempat sampah katanya di tiap RT ada, tapi kalau gerobaknya katanya cuma 4 aja...ada tuh di pos RW 3....campur sama yang dari dekel sama kelurahan...tapi kayaknya dah pada rusak semua dah.

YS : Menurut ibu, kalau kita bicara kebutuhan, memang 3 program itu yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat?

RY : Kayaknya kalau ngomongin kebutuhan mah banyak neng...tapi kayaknya yah nga bisa semuanya di bikin, mungkin anggarannya nga ada, jadi yah yang penting-penting aja dulu kali.....masalahnya sampah kan penting juga...pada bertumpuk di rumah warga, nga ada yang ngambilin karena gerobaknya pada rusak, trus juga kalo ada tempat pembuangan sampah kan jadi agak enakan, warga nga perlu numpukin sampah di rumahnya, bisa buang di tempat sampah...trus ntar paginya kan ada mobil sampah yang ngambilin.

YS : Menurut ini program ini bagus nga?

RY : Yah...bagus-bagus aja sih neng...kan uangnya juga bukan dari masyarakat.....jadi yah nga ada beban...paling juga nyediain kopi aja...

YS : Ibu tau anggaran PNPM Mandiri ini berapa?

RY : Nga tau

YS : Kalau untuk yang bikin jalan ini?

RY : Nga tau juga...

YS : Untuk gerobak sampah sama bak sampah juga?

RY : Nga tau juga...yang penting saya mah dikerjain aja...masalah anggaran saya nga tanya-tanya.....yang penting nga pada korupsi aja...tapi sih kayaknya nga

YS : Ada warga yang mengeluh nga bu soal program ini?

RY : Ada juga sih, katanya wilayah dia kok nga dikerjain....mungkin tahun depan kali ya neng?

YS : Tergantung usulannya nanti bu.

RY : Oh.....

YS : Kalau soal program pengerasan jalan rapat beton ini yang kebetulan di daerah ibu bagaimana?

RY : Bagus...emang kita perlunya pengerasan jalan ini...abis udah lama jalannya rusak, trus kalo ujan kan jadinya becek kemana-mana....kalo ada kendaraan lewat juga jadi nyiprat-nyiprat...nga enak diliat deh neng jalannya...tapi kalo udah di cor kan jadi bagus...nga becek lagi...anak-anak maen juga dah enak....rapi gitu loh...

YS : Trus ada yang keberatan nga? Misalnya karena pengerjaan rapat beton ini jadinya debu lah...atau apalah.

RY : Yah awalnya ada...tapi cuma sebentar...mereka senang-senang aja tuh...kan bukan cuma PNPM Mandiri aja yang bikin ginian, dekel juga pernah ngerjain rabat beton juga, tapi di wilayah lain...yang disini sebagian dari PNPM Mandiri.....sama aja kan ya neng?

YS : Ya..pada prinsipnya sama aja bu.....trus waktu mau bikin rapat beton ini relawan PNPM Mandiri sosialisasi ke warga nga sih bu? Atau cukup pak RT aja yang memberi tahu?

RY : Sosialisasi ke warga...sama pak RT juga, tapi yah nga semua warga, cuma yang dilalui proyek ini aja...kan nanti efeknya ada...yah jadi berisik lah...jadi berdebu lah...yang punya motor jadi nga bisa lewat

- lah...tapi warga nerima aja kok bu.....abis kalau nga dibenerin jalanya pada becek kalo ujan...kalau udah di beton kan jadi nga becek lagi.
- YS : Ada yang mengawasi proyek ini nga bu?
- RY : Waduh....saya nga tau yah neng....tanya aja sama relawannya...atau sama pak RT nya.
- YS : Menurut ibu nantinya ada pemeliharaan nga? Artinya kalau ada yang rusak bagaimana?
- RY : Harusnya sih ada ya neng...kan sayang kalau dah rusak nga di perbaiki....yah kalau ada yang bolong kan bisa di tambal-tambal sedikit....tapi kayaknya yang udah-udah kalau di beton atau di cor mah agak awetan yah...kalau di aspal aja mungkin cepet rusak.
- YS : Kalau bicara pelaksanaan, mereka pada dateng mengontrol kerjaan nga selama proyeknya dikerjain?
- RY : Nga tiap hari saya ada di rumah sih neng...tapi setahu saya tiap hari mereka ngontrol kerjaan tukang...sampai selesai deh...semingguan yah kalo nga salah.
- YS : Menurut ibu program ini tepat sasaran nga? Artinya mengurangi angka kemiskinan?
- RY : Kalau untuk sasaran lokasi kayaknya tepat, lokasinya kan di gang...trus warganya huga banyak...jadi jalannya banyak yang pake...jadinya cepet rusak...tapi kalau mengurangi kemiskinan kayaknya nga dah...kalau untuk sementara iya, karena yang negerjain kan pengangguran. Tapi setelah proyeknya selesai kan mereka jadi nganggur lagi...jadi kayaknya nga bisa ngurangi kemiskinan, cuma sementara aja...mestinya mereka disalurkan lagi...entah itu ke kontraktor atau apalah.
- YS : Jadi menurut ibu pemerintah harus menyiapkan lapangan kerjanya?
- RY : Kalau bisa sih...kan percuma juga kalau kerjanya seminggu doang trus mereka nganggur lagi....iya kalau tahun depan bikin ginian lagi...kalau nga?
- YS : Rencana pemerintah PNPM Mandiri ini kan berakhir tahun 2015...menurut ibu dilanjutkan lagi atau bagaimana?
- RY : Menurut saya program ini bisa dilanjutkan lagi sesudah tahun 2015, tapi kalau bisa mungkin anggarannya di perbesar biar wilayah yang dikerjain juga luas, nga cuma segini...kasian nga lain nga sebagian...trus kalau bisa...ini juga kalau bisa...pemerintah nyiapin lapangan kerjanya, biar yang negrjain proyek ini nantinya masih bisa lanjut kerjanya, nga cuma di proyek ini aja.
- YS : Ada saran untuk pemerintrah mengenai PNPM Mandiri ini?
- RY : Saran saya kalau bisa PNPM berlanjut, trus anggaran di gedein, trus di sediain lapangan kerja...itu aja kayaknya.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA MENDALAM

Pemerhati PNPM Mandiri Perkotaan

Nama : Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D
Jabatan : Ketua Program Sarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Masyarakat Universitas Indonesia
Tanggal : 15 Desember 2011
Waktu : Jam 13.10 – 14.00
Tempat : Ruang Kerja Informan

YS : Yuli Susilowati
Prof. IR : Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D

YS : Menurut Bapak, PNPM Mandiri Perkotaan itu seperti apa?
Prof. IR : Relatif ya....sebenarnya bukan yang baru, itu kan terusan dari yang dulu yang P2KP....jadikan polanya masih banyak mirip-mirip aja, cuma sekarang lebih terkoordinir lah....lebih baik dibandingkan dulu....di tingkat nasional ada, dananya juga lebih besar, cuma kalau sistem relatif sejauh ini masih banyak kemiripan dengan P2KP, pendekatannya masih sama...perekonomiannya....polanya masih sama.....untuk perkotaan memang pergantian nama aja, tapi kan sekarang ada PNPM Mandiri Perdesaan....untuk PNPM Mandiri Perkotaan sih mirip-mirip aja, cuma ada beberapa yang kayak perekonominya bisa berupa koperasi, kalau di bina sosialnya nga banyak berubah.

YS : Berarti harus berkelanjutan untuk bidang ekonominya ya pak?
Prof. IR : Ekonomi kan yang dilihat pada perguliran dana, bukan pada perubahan kualitas hidup masyarakat miskin itu sendiri...perkotaan itu tidak bisa dikembangkan tanpa perdesaan itu...Jakarta, semakin banyak orang semakin rumit, semakin kumuh tempat-tempatnya...kalau perdesaannya nga dikuatin, yag disini percuma...fokusnya harusnya di perdesaan...itu yang lebih bagus...harusnya yang dikota-kota besar harus bekerjasam dengan daerah migrannya kalau nag begitu Jakarta ini udah nga bisa menanggung beban masyarakat yang begitu banyak.

YS : Berarti program ini kurang tepat sasaran?
Prof. IR : Karena kan kriteria kemiskinannya yang berbeda...kebutuhan di daerah dengan di Jakarta juga berbeda..banyak orang yang dapat raskin dan dapat BLT ternyata juga punya motor...meskipun sebenarnya tidak boleh...trus untuk pembaharuan data kemiskinan juga tidak ada yang baru, masih menggunakan data yang lama...di Jakarta tuh lain lagi...yang dimaksud rumah tangga miskin di Jakarta juga sudah sangat familiar dengan program-program serupa, program-program bantuan, program-program penanggulangan kemiskinan...nga ada dari pemerintah...dari pihak lain....jadi buat mereka justru sangat ahli menjadi penerima bantuan. Tapi berdasarkan beberapa kriteria, ada perubahan pada data kemiskinan, tapi dampak untuk kualitas hidup nga terasa,

karena peningkatan pendapatannya ini sangat sedikit. Kalau dibilang nga tepat sasaran juga tidak, ada masyarakat miskin, tapi itu nga bisa mengangkat mereka dari kemiskinan itu, belum lagi kalo nga punya usaha...lebih sulit lagi...

YS : Ada timpang tindih dengan program lain kan pak?
Prof. IR : Ada. Misalnya dengan Dewan Kelurahan...bina ekonominya kan menjadi koperasi...untuk Jakarta itu nga akan bisa mengurangi orang miskin, karena orangnya bertambah banyak...jadi berapa pun dana yang dikeluarkan, itu akan membuat orang menjadi keenakkan...malah jadi bikin masalah, karena di Jakarta itu jumlah orangnya sudah terlalu banyak....masalahnya bukan cuma kemiskinan, kemiskinan itu merupakan kondisi....tidak memberikan dampak bagi kualitas hidupnya...nga semakin sehat juga...anaknya semakin baik nga juga...

YS : Kalau untuk fisik kan kebanyakan dikerjakan oleh kuli bangunan, menurut bapak bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

Prof. IR : Abis banyak hal serupa...tahun ini jalanan ini di aspal...tahun depan di aspal...tahun depannya lagi juga diaspal... jadi udah nga efektif, lebih efektif dikembangkan di daerah asal migran....danaya bisa dialihkan...dengan pengalihan itu justru akan mengurangi jumlah penduduk di Jakarta...nanti kan malah pada jadi transmigran...seharusnya di lokasi migran lebih banyak anggarannya, sekitar 20% bisa dialihkan dananya, jadi wilayah sendiri bisa berkembang...jadi nanti akan muncul keahliannya...apa pengelolaan keuangan...menyiapkan tenaga-tenaga di tingkat lokal sehingga mereka bisa menggunakan teknologi yang tepat guna...kalau sudah berhasil nanti akan banyak yang kembali ke daerahnya masing-masing dan mengembangkan daerahnya sesuai dnegan kemampuan yang di dapat di Jakarta. Jadi pertama, mencegah orang untuk masuk ke Jakarta, dengan cara mengembangkan daerah asalnya, yang ke 2 bisa dengan meng-transmigrasikan orang Jakarta ke daerah lain ...untuk pengembangan wilayah harus seperti itu, jangan terkonsentrasi ke satu tempat...nga akan sanggup...masih bisa dikembangkan lah...peran menakertrans kurang bagus...wilayah harus diminta lagi untuk berkembang...

YS : PNPM Mandiri ini kan direncanakan sampai tahun 2015, menurut bapak bisa diperpanjang?

Prof. IR : Bisa diperpanjang lagi... bersambung atau nga nanti tergantung Presidennya siapa..harusnya bisa lebih berkembang lagi, intinya kan sama, melakukan pengembangan di kota dan di daerah, tapi kalau bisa lebih di fokuskan pada pengembangan daerah...daerah-daerah tertinggal....mereka soalnya sudah terbiasa menunggu...terbiasa dapat proyek bantuan....jadi nga ada mentalitas untuk membangun tuh jadi kurang....trus sering yang mendapatkan bantuan saudara-saudara nya siapa....malah orang-orang yang di pinggir kali nga dapat bantuan..jadi masalahnya dari mulai atas sampe bawah...tapi proses pemberdayaan masih bisa

berjalan sampe tahun 2012....kan kalau pendapatan meningkat pasti pengeluaran juga meningkat....itu tetap nga mengurangi kemiskinan...tapi berdasarkan data BPS penduduk miskin berkurang...tapi indikatornya mana?

YS : Ada limit pengurangan jumlah kemiskinan dari pemerintah tidak dengan diterapkannya program ini?

Prof.IR : Sebagai program nasional bisa, tetapi sebagai program lokal belum lah...Sebagai program nasional, terkait masalah kemiskinan, itu tetap ada....Untuk negara yang sedang berkembang pun masih ada yang namanya kemiskinan, jadi harus bisa berkurang...tapi kalau untuk skala lokal, program ini masih bisa dikembangkan terus...termasuk pengalokasian dana...banyak kan di lokal atau nasionalnya....tentang pengembangan dana...nga semuanya berhasil, ada daerah yang tidak berhasil... PNPM kalau kembali ke lokal pola akan sama, dan masyarakatnya tidak akan berubah, akan tetap seperti itu...akan semakin pintar...akan tetap saja menunggu bantuan...prinsip ketidakberdayaan tetap aja, karena prinsip pemberdayaannya tidak berkembang dengan baik.

YS : Kalau untuk penyediaan lapangan pekerjaan bagi yang sudah mendapatkan pelatihan bagaimana pak?

Prof.IR : Kalau untuk setiap wilayah disediakan lapangan pekerjaan, trus bukannya persaingan semakin ketat?

YS : Kalau untuk penyaluran daya ekonomi, menurut bapak ada penyimpangan nga?

Prof.IR : Ada yang ada, tetapi banyak yang nga kok...banyak yang dipergunakan dengan baik...untuk beli bahan-bahan produksi misalnya...pendamping/fasilitator hanya sebagai pendamping bukan pengawas, sehingga nga tau ini berlanjut apa nga..hanya sekedar memasarkan aja....untuk pendidikan anak juga nga bagus-bagus amat...untuk keluarga juga nga begitu bagus.

YS : Menurut Bapak tujuan pemerintah tercapai tidak?

Prof.IR : Harus ada evaluasi tahunan...masalahnya bukan tujuannya tercapai atau tidak tapi sasarannya udah pas belum...kalau masalah dana yang bergulir trus kembali iya tercapai....

YS : Kalau untuk pengurangan kemiskinannya pak?

Prof.IR : Kalau untuk pengurangan kemiskinan kan berarti pendapatan meningkat....kesehatan terjaga...kalau ada usaha kan berarti udah ada uang.. buaknya berkurang sama sekali, tetapi kan orang yang benar-benar sehat...sudah punya modal...banyak sekali yang nga pas...

YS : Saran bapak untuk PNPM Mandiri Perkotaan ke depan bagaimana?

Prof.IR : 1. Mesti dibedakan antara dki dan daerah, artinya harus ada keseimbangan antara dki dengan wilayah migran
Yang kedua hanya dilihat sebagai mata ekonomi, padahal pengendalian penduduk itu lebih penting...yng pasti harus ada pengendalian jumlah penduduk.....lebih memaksimalkan undang-undang...bagaimana meningkatkan kualitas hidup mereka

Gambar 1
Prasasti PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka
Kegiatan Perkerasan Jalan Rabat Beton



Gambar 2
Prasasti PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Roa Malaka
Kegiatan Pembuatan Bak Sampah



Lampiran 2 : Output Pemetaan Swadaya

Tabel I: Analisa Masalah dan Potensi Lingkungan

Masalah Utama Lingkungan	Lokasi	Hubungan Sebab Akibat		Kebutuhan Penyelesaian Masalah	Potensi Sumber Daya Lokal	Manfaat Bagi Masyarakat
		Faktor Penyebab	Akibat yang Ditimbulkan			
Jalan rusak	RW 03	Jalan rusak karena banyak lubang	akses jalan sulit dilalui kendaraan karena becek	Pembuatan jalan lingkungan dengan rabat beton	tersedianya swadaya dalam bentuk tenaga, bahan baku, dll	Tersedia prasarana jalan yang memadai sehingga memudahkan mobilitas warga
Saluran air tidak berfungsi dgn baik	RW 03	Tidak ada saluran air, penumpukan lumpur & sampah saluran air tidak memadai	Pada saat hujan terjadi banjir karena saluran tidak mampu menampung luapan air	Pembangunan saluran air/drainase dan pengerukan lumpur	tersedianya swadaya dalam bentuk tenaga, bahan baku, dll	Lancarnya saluran air, tidak ada penumpukan sampah, & lumpur sehingga tidak terjadi banjir jika hujan turun
Lingkungan kumuh	RW 03	MCK sudah tidak layak pakai	Adanya bibit penyakit dan bau tidak sedap sehingga lingkungan kotor dan tidak sehat	Renovasi MCK	Tersedianya swadaya dalam bentuk tenaga, bahan baku dll	Lingkungan lebih bersih dan sehat
Sampah berserakan	RW 03	Kurang gerobak sampah dan tempat pembuangan sampah	Sampah berserakan menimbulkan bau dan bibit penyakit, lingkungan menjadi kotor kumuh dan kurang sehat	Pengadaan gerobak sampah dan tempat pembuangan sampah	Tersedianya swadaya dalam bentuk tenaga, bahan baku dll	Lingkungan lebih bersih dan sehat

Tabel 2 : Analisa Masalah dan Potensi Sosial

Masalah Utama Lingkungan	Lokasi	Hubungan Sebab Akibat		Kebutuhan Penyelesaian Masalah	Potensi Sumber Daya Lokal	Manfaat Bagi Masyarakat
		Faktor Penyebab	Akibat yang Ditimbulkan			
Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya keahlian yang dimiliki	RW 03	Tingkat pendidikan rendah	Rendahnya keterampilan, pemahaman dan tidak punya pekerjaan	pemberian pelatihan keterampilan	Adanya lembaga kursus keterampilan	Dapat membuat usaha baru atau lapangan kerja

Masalah Utama Lingkungan	Lokasi	Hubungan Sebab Akibat		Kebutuhan Penyelesaian Masalah	Potensi Sumber Daya Lokal	Manfaat Bagi Masyarakat
		Faktor Penyebab	Akibat yang Ditimbulkan			
Perbaikan gizi ibu hamil dan balita	RW 03	Pengetahuan ibu hamil rendah	Masyarakat kurang minat datang ke posyandu dan konsultasi tentang kehamilan	Pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk bayi	Pelatihan bagi kader posyandu	Terbinanya kesehatan masyarakat dan balita kurang gizi bisa berkurang
Rendahnya pendidikan	RW 03	Kurangnya biaya untuk pendidikan	Buta huruf dan tingkat pendidikan rendah	Program paket A, B dan C	Adanya kursus	Status sosial meningkat

Tabel 3 : Analisa Masalah dan Potensi Ekonomi

Masalah Utama Lingkungan	Lokasi	Hubungan Sebab Akibat		Kebutuhan Penyelesaian Masalah	Potensi Sumber Daya Lokal	Manfaat Bagi Masyarakat
		Faktor Penyebab	Akibat yang Ditimbulkan			
Banyaknya pedagang kecil yang kurang modal	RW 03	Terbatasnya akses kegiatan ekonomi	Banyak pedagang yang bangkrut karena kekurangan modal	Pemberian bantuan pinjaman modal ekonomi bergilir	Adanya kegiatan usaha produktif	Usulan kegiatan produktif dapat berkembang dengan baik
Banyaknya kegiatan usaha yang tidak melakukan pengelolaan dengan baik	RW 03	Tingkat pengetahuan kewirausahaan masih kurang	Pengelolaan usaha tidak dilakukan dengan manajemen usaha yang baik dan benar	Pemberian pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha	Adanya potensi usaha produktif, tingkat kemauan cukup tinggi	Dapat melakukan kegiatan usaha dengan pengelolaan manajemen yang baik

**PERENCANAAN JANGKA MENENGAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PJM PRONANGKIS)
TAHUN 2009 - 2011
KELURAHAN ROA MALAKA KECAMATAN TAMBORA KOTA JAKARTA BARAT**

NO.	PROGRAM	RINCIAN KEGLATAN	LOKASI	VOLUME	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DANA				PENERUKAN MANEPAAT		
						TOTAL	BLM PNPB-MP	APBD	SWASTA	SWADAYA	L	P
RENCANA TAHUN PERTAMA												
1	MCK	Pembuatan MCK Umum	RT 04	1 Unit	UPL	26.000.000	20.000.000	-	-	6.000.000	80	50
TOTAL RENCANA TAHUN PERTAMA						26.000.000	20.000.000			6.000.000		
RENCANA TAHUN KEDUA												
1	Sampah	Pengadaan Bak Sampah Rumah Tangga	Rt 001-008/Rw 03	9 Unit	UPL	10.500.000	9.000.000			1.500.000	345	34
2	Sampah	Pembuatan Gerobak Sampah	Rw 03	4 Unit	UPL	8.000.000	5.500.000			1.500.000	359	46
3	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan rabat	Rt 09 & 03/Rw 03	125 x 1.5m	UPL	15.500.000	13.000.000			2.500.000	345	36
TOTAL RENCANA TAHUN KEDUA						34.000.000	28.500.000			5.500.000		
RENCANA TAHUN KETIGA												
1	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan rabat	RT 01, 02, 03, 04, 05 & 08	400m2	UPL	54.080.000	41.600.000	-	-	12.480.000	250	300
2	Posyandu	Renovasi Posyandu	RW 03	1 Unit	UPL	32.500.000	25.000.000	-	-	7.500.000	250	300
3	Posyandu	Pembuatan Awning	RT 02	30m2	UPL	9.750.000	7.500.000	-	-	2.250.000	321	347
4	PAUD	Pembuatan Sarana Olahraga/bermain untuk PAUD	RW 03	1 Unit	UPS	19.500.000	-	15.000.000	-	4.500.000	250	150
5	Saluran	Pembuatan Plat Deuker/tutup saluran	RT 01	75m	UPL	31.200.000	24.000.000	-	-	7.200.000	234	342
6	Sampah	Pembuatan Bak Sampah	RT 06	2 Unit	UPL	2.600.000	2.000.000	-	-	600.000	300	200
7	Penerangan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	RT 01, 02, 04, 07 & 08	21 titik	UPL	27.300.000	21.000.000	-	-	6.300.000	320	348
8	Gedung Sekolah	Renovasi Gedung Sekolah SDI Al Hurriyah	RW 03	1 Unit	UPL	32.500.000	-	25.000.000	-	7.500.000	200	100
9	Sarana Sekolah	Pengadaan Sarana Sekolah SDI Al Hurriyah	RW 03	1 Paket	UPS	19.500.000	-	15.000.000	-	4.500.000	231	234
10	PKK	Pengadaan Seragam PKK	RW 03	15 orang	UPS	4.875.000	-	3.750.000	-	1.125.000	89	178
TOTAL RENCANA TAHUN KETIGA						216.180.000	121.100.000	58.750.000	-	36.330.000		
GRAND TOTAL KEBUTUHAN DANA PJM PRONANGKIS (TAHUN KE I - III)						276.180.000	169.600.000	58.750.000		47.830.000		



LPJ KSM LINGKUNGAN

JAYA RAYA



PROVINSI DKI JAKARTA

BLM TAHAPI.....TAHUN ANGGARAN.....2010.....

Nama KSM : BATAVIA
Nama TPP-RW : RW 03
Nama BKM/LKM : KOTA TOEA
Kelurahan : ROA MALAKA
Kecamatan : JAMBORA
Kotamadya : JAKARTA BARAT

Nama Kegiatan	: <u>PEMBUATAN BAKSAMPAH.</u>
Volume Rencana	: <u>9 UNIT</u>
Volume Realisasi	: <u>9 UNIT</u>
Lokasi Kegiatan	: <u>R4.001.002.003.004.005.006.007.008.009.</u>
Waktu Pelaksanaan (Realisasi)	: <u>18. HARI</u>

Nilai BLM PNPMP	: Rp <u>9.000.000.</u>
Nilai Rencana Swadaya	: Rp <u>1.500.000</u>
Nilai Realisasi Swadaya	: Rp <u>1.506.000.</u>
Total Dana	: Rp <u>10.506.000</u>

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELAYAKAN LPJ KEGIATAN LINGKUNGAN

Pada hari ini Selasa..... Tanggal 14..... Bulan Juni..... Tahun 2011..... telah dilaksanakan verifikasi kelayakan LPJ kegiatan KSM Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas, Rentu PJM pronangkis, dan disepakati sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN		REKOMENDASI
1. NAMA PEKERJAAN	: <u>PEMBUATAN BAK SAMPAH</u>	<p align="center">LAYAK / LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN / TIDAK LAYAK</p> <p align="center">(Pilih sesuai hasil verifikasi)</p>
2. LOKASI	: <u>R4001002003004045007008009</u>	
3. VOLUME	: <u>756K (425T)</u>	
4. NILAI KEGIATAN		
a. Swadaya (Reallsasi)	: Rp <u>1506 000</u>	
b. BLM PNPMP	: Rp <u>9.000 000</u>	
c. APBD/Lainnya	: Rp <u>-</u>	
d. TOTAL (a+b+c)	: Rp <u>10.506.000</u>	
5. NAMA KSM	: <u>BATA VIA.</u>	

Hasil verifikasi tersebut didasarkan pada tabel sebagai berikut :

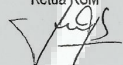
No	ASPEK YANG DIVERIFIKASI	KELAYAKAN		CATATAN (PENYEMPURNAAN)
		YA	TIDAK	
A ASPEK ORGANISASI				
1	Apakah Tim O&P sudah terbentuk dan memiliki alamat domisili yang jelas ?	✓		
2	Apakah jumlah anggota Tim O&P dari perempuan minimal 30%?		✓	
3	Apakah Tim O&P telah Mendaftar pada BKMLKM?	✓		
4	Apakah Tim O&P Merupakan Pemanfaat Sarana & Prasarana?	✓		
5	Adakah kontribusi Swadaya masyarakat ?	✓		
B ASPEK MANAJEMEN, TEKNIS KEGIATAN				
1	Apakah kegiatan yang telah dibangun Penerima Manfaat dominan adalah warga miskin (minimal 80% adalah warga miskin) ?	✓		
2	Apakah kegiatan yang telah dibangun tidak berpotensi menimbulkan Dampak Negatif (merusak) Lingkungan?	✓		
3	Apakah kegiatan yang telah dibangun tidak berpotensi menimbulkan Dampak Sosial terkait dengan penggunaan lahan ?	✓		
4	Apakah kegiatan yang telah dibangun tidak bertentangan dengan Daftar Kegiatan Terlarang ?	✓		
5	Laporan Pelaksanaan Kegiatan:			
a)	Adakah dilakukan MP2K sebelum Pelaksanaan Kegiatan ?	✓		
b)	Adakah Penandatanganan SPPD-L sebelum Dana dimanfaatkan?	✓		
c)	Adakah dilakukan Monitoring pada saat Pelaksanaan Kegiatan ?	✓		
d)	Adakah Buku Bimbingan Lapangan ?	✓		
e)	Adakah Daftar Absensi Tenaga Kerja ?	✓		
f)	Adakah Daftar Penerimaan Material ?	✓		
g)	Adakah Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) ?	✓		
h)	Adakah Realisasi Penggunaan Dana (RPD) ?	✓		
i)	Adakah Buku Kas & Buku Swadaya ?	✓		

No	ASPEK YANG DIVERIFIKASI	KELAYAKAN		CATATAN (PENYEMPURNAAN)
		YA	TIDAK	
	j) Adakah Nota-Nota yang lengkap sesuai realisasi ?	✓		
C ASPEK KELAYAKAN TEKNIK				
1	Apakah sudah dilakukan Sertifikasi / Pemeriksaan Akhir ?	✓		
2	Apakah Kegiatan yang dibangun layak secara teknis? (Keamanan Pemakai, Umur Prasarana/Kualitas Bahan Utama, Pencapaian Manfaat, dan Rencana Kerja Pemeliharaan).	✓		
3	Apakah sudah dilakukan penandatanganan BAP2 setelah dilakukan Sertifikasi / Pemeriksaan Akhir dan dinyatakan Layak ?	✓		
4	Apakah BASTP2 sudah ditandatangani sebagai bentuk kemampuan masyarakat untuk dapat melaksanakan pemeliharaan ?	✓		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

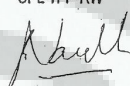
Jakarta, tgl. 8 Juli 2011

Pengusul:
Ketua KSM



(SUTRISNO)

TIM Verifikasi:

UPL TPP-RW


(NASRUDIN)

BKM / LKM


(AHMAD HUMAIDI)

Mengetahui:

Senior Fasilitator

(.....)

KORKOT

(.....)

- Sesuai SOP infrastruktur bahwa Kegiatan yang nilai BLMnya > Rp 30jt diVerifikasi oleh Askot Infrastruktur
- Bila Kegiatan yang nilai BLMnya < Rp 30jt Tahap Verifikasi cukup sampai ditingkat fasilitator

DAFTAR ISI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	JENIS KELENGKAPAN	Hal	KETERANGAN
1.	COVER		
2.	LEMBAR VERIFIKASI KELAYAKAN LPJ KSM LINGKUNGAN		
3.	DAFTAR ISI		
4.	COPY SURAT PERJANJIAN PENYALURAN DANA (SFPD-L)		
5.	COPY BERITA ACARA MP2K / PCM		
6.	BA HASIL PEMERIKSAAN AKHIR (SERTIFIKASI) KEGIATAN LINGKUNGAN		Untuk diperbanyak/konsumsi keluar KSM (Dokumen persyaratan pemanfaatan dana tahap berikutnya)
7.	BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAP2)		
8.	BA SERAH TERIMA PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN (BASTP2) & BERITA ACARA PEMBENTUKAN TIM O&P		
9.	REALISASI PENGGUNAAN DANA (RPD)		
10.	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (LKP)		
11.	BERITA ACARA PEKERJAAN TAMBAH KURANG (DIGUNAKAN BILA VOLUME KEGIATAN BERUBAH DARI PROPOSAL +/-)		
12.	GAMBAR REALISASI (AS BUILD DRAWING)		
13.	PHOTO 0%, 50%, 100%		
14.	PHOTO PAPAN NAMA KEGIATAN & PRASASTI		
15.	BUKU KAS		
16.	BUKU SWADAYA		
17.	LAMPIRAN :		
	- BUKU BIMBINGAN LAPANGAN		
	- ABSENSI & UPAH TENAGA KERJA		
	- DAFTAR PENERIMAAN BAHAN/ALAT/KONSUMSI		
	- NOTA-NOTA		

Catatan :

1. Dokumen Surat Rekomendasi Pemanfaatan BLM menjadi Arsip KSM & BKM/TPP-RW
2. Dokumen Pemeriksaan Akhir (Sertifikasi), Cek List Pengamanan Dampak, dan Kontrak Sosial menjadi Arsip KSM & BKM / TPP-RW



**SURAT PERJANJIAN PENYALURAN DANA - LINGKUNGAN
 (SPPD · L)**

Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
 Perkotaan(PNPM-MP)Tahun Anggaran 2009
 Paket Perjanjian Penyaluran Dana : Pekerjaan/ Kegiatan PEMBUATAN BAK-SAMPAH
 No. Perjanjian Penyaluran Dana : 003 / S.PPD-L / TPP RW 03 / RT 1 / 2010

Berdasarkan :

1. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Sementara Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Nomor : tanggal
2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara BKM dengan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan, Kab/ Kota, Nomor, tanggal
3. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) BKM DAN TPP-RW No. : 003 / SPPB/BKM KOTA TANGERANG / RT 1 / 2008

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SUKIMAN
 Jabatan : Koordinator Tim Pengendali Program (TPP) RW 03
 Kelurahan Rea Malaka Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat
 Provinsi DKI Jakarta
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SUPLISNO
 Jabatan : Ketua KSM BATAVIA
 Kelurahan Rea Malaka Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat
 Provinsi DKI Jakarta
 Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) dan disyahkan /dicatatkan pada buku register TPP tentang KSM dengan No.Induk : Alamat: Jl. Tiang Bendera Raya RT: 001/03
 Selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut, hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
 LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu :
 Nama: Jenis Pekerjaan : PEMBUATAN BAK-SAMPAH
 Lokasi : RT 01 / RW 01 / 009
 Ukuran : 1.25 m x 1.7 m x 0.80 m
 Volume : 9 CU.M



**SURAT PERJANJIAN PENYALURAN DANA - LINGKUNGAN
 (SPPD · L)**

Proyek : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
 Perkotaan(PNPM-MP)Tahun Anggaran 2009
 Paket Perjanjian Penyaluran Dana : Pekerjaan/ Kegiatan PEMBUATAN BAK-SAMPAH
 No. Perjanjian Penyaluran Dana : 003 / S.PPD-L / TPP RW 03 / RT 1 / 2010

Berdasarkan :

1. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Sementara Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Nomor : tanggal
2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara BKM dengan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kecamatan, Kab/ Kota, Nomor, tanggal
3. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) BKM DAN TPP-RW No. : 003 / SPPB/BKM KOTA TANGERANG / RT 1 / 2008

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SUKIMAN
 Jabatan : Koordinator Tim Pengendali Program (TPP) RW 03
 Kelurahan Rea Malaka Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat
 Provinsi DKI Jakarta
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SUPLISNO
 Jabatan : Ketua KSM BATAVIA
 Kelurahan Rea Malaka Kecamatan Tambora Kodya Jakarta Barat
 Provinsi DKI Jakarta
 Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) dan disyahkan /dicatatkan pada buku register TPP tentang KSM dengan No.Induk : Alamat: Jl. Tiang Bendera Raya RT: 001/03
 Selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut, hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
 LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu :
 Nama: Jenis Pekerjaan : PEMBUATAN BAK-SAMPAH
 Lokasi : RT 01 / RW 01 / 009
 Ukuran : 1.25 m x 1.7 m x 0.80 m
 Volume : 9 CU.M



KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Jl. Raya Taktakan No. 55 RT 01 RW 010, Lontar Baru, Klati Serang, Provinsi Banten - 42115, Telp/Fax : (024) 722885
e-mail : kmw_banten@yahoo.com, Saran : pengaduan_p2ptkbanterndki@yahoo.com, SMS : 0813 3453 1800



- 5.3 Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) atau Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah mencapai sebesar 50% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) & Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti (nota & kuitansi). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Total bantuan yang disetujui (a)	Rp ... 9.000.000
2.	Penarikan Tahap I (satu) sebesar 50% (b)	Rp ... 4.500.000
3.	Penarikan tahap II (dua) sebesar 40% (c)	Rp ... 3.600.000
4.	Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-c)	Rp ... 900.000

- 5.4 Tahap Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai SPPD-L dengan ketentuan salah satu dari progress capaian baik Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) atau Realisasi Penggunaan Dana (RPD) telah mencapai sebesar 90% dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) & Realisasi Penggunaan Dana (RPD) serta Realisasi Dana dan tanda bukti (nota & kuitansi). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Total bantuan yang disetujui (a)	Rp ... 9.000.000
2.	Penarikan Tahap I (satu) sebesar 50% (b)	Rp ... 4.500.000
3.	Penarikan tahap II (satu) sebesar 40% (c)	Rp ... 3.600.000
4.	Penarikan tahap III (tiga) sebesar 10% (d)	Rp ... 900.000
5.	Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-c-d)	Rp ... 0

PASAL 6
PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 6.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan Konsultah untuk melakukan Pemeriksaan Pekerjaan (Kontrak Sosial) & Sertifikasi.
- 6.2 Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP 2)

PASAL 7
SANKSI - SANKSI

- 7.1 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan kualitas yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pemberian Pekerjaan atau dalam waktu yang disetujui, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7.2 Bilamana dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan ditempuh cara musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh Fasilitator, dan bila tidak ada titik temu tentang permasalahan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.



KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Jl. Raya Taktakan No. 55 RT 01 RW 010, Lontar Baru, Kola Serang, Provinsi Banten- 42115, Telp/Fax : (024) 222685
e-mail : kmw_banten@yahoo.com, Saran : pengabdian_pzkbantendi@yahoo.com, SMS : 0813 8453 1800



Syarat-syarat Umum Perjanjian Pekerjaan

Tanggung-jawab BKM:

1. BKM menjamin bahwa akan selalu menepati janji terutama dalam tahapan pencairan dana KSM sesuai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dimaksud.
2. BKM menjamin kelancaran tahapan pencairan dana KSM asalkan dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan sesuai ketentuan.
3. BKM akan selalu memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dimaksud dan mengadakan evaluasi perkembangan dan hasil kegiatan.

Tanggung-jawab TPP-RW:

1. Menjamin bahwa anggota KSM adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan PNPMP-MP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri;
2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh Seksi Keuangan dan kemudian disetujui TPP RW adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif (baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis dan RTPK) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat.
3. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman PNPMP-MP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPMP-MP Pusat;
4. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM telah dinyatakan layak oleh Seksi Keuangan /UPL/UPS dan hasil penilaian kelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh Askorkot / Korkot;
5. Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional dan pengendalian oleh TPP RW, tidak melebihi alokasi dana RW;
6. Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM adalah sesuai dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat Berita Acara pertemuan KSM bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota TPP RW serta diverifikasi oleh Askorkot atau Korkot;
7. Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan TPP RW, minimal satu kali satu tahun dengan biaya TPP RW. Selain itu, TPP RW juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.
8. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh TPP RW, maka TPP RW wajib mengembalikan dana yang dimaksud.
9. TPP RWM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan PNPMP -MP selama jangka waktu 5 tahun.
10. Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke BKM dan Askorkot / Korkot; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta



KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

Jl. Raya Taklakan No. 55 RT.01 RW.010, Lontar Baru, Kota Serang, Provinsi Banten- 42115, Telp./Fax: (024) 222885
e-mail: kmw_banten@yahoo.com, Saran: pengaduan_p2kpbantendi@yahoo.com, SMS: 0813 3453 1800



mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, TFR RW berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada BKM dan Askorkot / Korkot.

11. Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai PNPM-MP secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM, UP dan TPP RW.
12. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan PNPM-MP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
13. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM PNPM-MP adalah bukan kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di PNPM-MP (*negatif list*).
14. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan.

Tanggung-jawab KSM :

1. Mensosialisasikan program PNPM-MP, melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).
2. Menyiapkan Struktur Organisasi & Pengurus Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana yang dibangun termasuk aturan mainnya.
3. Menyediakan kontribusi /mendorong masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun diwilayahnya dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan.
4. Menyusun Perencanaan Teknis Pembangunan sarana & prasarana dan menyediakan tenaga lapangan yang paham bangunan seperti mampu membaca gambar kerja atau tahu masalah teknis bangunan (tukang, mandor, dll).
5. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan.
6. Menyediakan Bahan/peralatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana fisik yang telah dipercayakan kepadanya.
7. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.
8. Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPL-TPP dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM.



KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
 PNP MANDIRI PERKOTAAN
PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

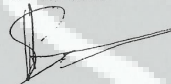
Jl. Raya Taktakan No. 55 RT 01 RW 010 Lontar Baru, Kota Serang, Provinsi Banten- 42115, Telp/Fax : (024) 222885
 e-mail : kmw_banten@yahoo.com, Saran : pengabdian_p2@bantenmandiri@yahoo.com, SMS : 0813 8453 1800



9. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumsi, dipinjamkan kembali dll), maka KSM penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan PNP MANDIRI Perkotaan selama jangka waktu 3 tahun.
10. Menjamin bahwa usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan BLM adalah bukan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di PNP M-MP (negatif list).

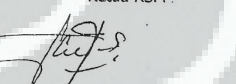
Jakarta, 24 DES - 2010.

Pihak Pertama,
 TPP-RW 02


 (..... SUEIMAN))

Pihak Kedua,
 Ketua KSM




 (..... SATRISNO))

Mengetahui,

Koor. LKM KOTA TCEA



(..... AHMAD HUMAIDI))

Senior Fasilitator

(.....))

Fasilitator Teknik



(..... RULI UNGKANA))

Catatan :

- Bila besar pagu dana kegiatan KSM > Rp. 15.000.000 maka Proposal KSM harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Askorkot Infrastruktur



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (MP2K) ATAU
PRE CONSTRUCTION MEETING (PCM)

Pada hari ini JUM'AT tanggal 24 bulan Desember tahun 2010 bertempat di SEKRETARIAT RW-08 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil verifikasi kelayakan usulan kegiatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini mewakili dan atas nama warga masyarakat kelurahan menyatakan bersedia untuk melaksanakan kegiatan secara tranparan dan akuntabel dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan kegiatan di dalam program PNPM-MP baik kualitas maupun kuantitas serta persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Adapun hasil dari Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) atau Pre Construction Meeting (PCM) sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang dimusyawarahkan antara lain:

1. Memastikan lokasi kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan.
2. Memastikan pelaksana kegiatan memiliki gambar kerja dan memahami petunjuk kerja sesuai gambar proposal (DED: Detail Engineering Design) yang telah diverifikasi.
3. Memastikan Papan Nama Proyek sudah terpasang sebelum pelaksanaan atau minimal pada saat pekerjaan dimulai.
4. Memastikan Uji Lab dilakukan untuk kegiatan pengadaan air bersih.
5. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak melanggar Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List).
6. Dalam proses pemanfaatan dana BLM harus melampirkan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Dana (sesuai dengan termin pencairan yang tertuang didalam SP3).
7. Selama proses pelaksanaan diwajibkan membuat administrasi harian (Buku Bimbingan Lapangan, Absensi Tenaga Kerja, Daftar Penerimaan Bahan/Alat/Konsumsi).
8. Memastikan pelaksana kegiatan membuat LKP (Laporan Kemajuan Pekerjaan) & RPD (Realisasi Penggunaan Dana) yang sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Konstruksi di lapangan yang mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan.
9. Jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dan hal-hal terkait dengan jadwal seperti penetapan hari kerja dan kondisi cuaca
10. Proses pengadaan bahan/material/alat (sumber dan pola pengangkutan menuju lokasi harus jelas)
11. Proses pengadaan tenaga kerja (memastikan pengadaan tukang dan pembantu tukang/pekerja) termasuk kesepakatan pengadaan peralatan kerja utama (disediakan oleh tukang atau masyarakat)
12. Memastikan pelaksanaan Pemeriksaan Akhir (Sertifikasi) sebelum penandatanganan BAP2 (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan).
13. Memastikan pada saat Pasca Konstruksi membuat Laporan Akhir KSM (LPJ KSM) sesuai dengan ketentuan PNPM-MP serta menyerahkan hasil kegiatan kepada Tim Operasional & Pemeliharaan (O & P)



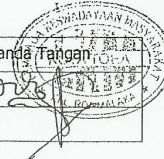
KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
 PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA
 Jl. Cut Meutia Blok B No 26, Perumahan Ciri Indah, Serang - 42118, Telp/Fax : (024) 209109
 e-mail : kmw_banten@yahoo.com, Saran : penjaduan_p2@banten.dki@yahoo.com, SMS : 0813 8453 1800



Jakarta, 24 DES 2010

Dibuat oleh :

No	LKM/TPP-RW/UPL	Nama	Tanda Tangan
1	Koordinator LKM	A. HUMAIDI	
2	Koordinator TPP-RW	SUKIMAN	



Mengetahui,

Lurah

Tim Faskel

NURHARYANTO, S.Sos.
 (NP.197309191993031004/119002)

(Tim Faskel)

Data Anggota KSM yang hadir,

No	Nama Anggota KSM	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	SURRIENGO	WILAYAH	II Tiang Bendera	
2.	RAN GENDR	WILAYAH	II Tiang Bendera	
3.	ANIKHY	WILAYAH	II Tiang Bendera	
4.				
5.				
6.				

**BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN AKHIR / SERTIFIKASI KEGIATAN LINGKUNGAN**

Pada hari ini SELASA tanggal 7 bulan JUNI tahun 2011 telah dilaksanakan Pemeriksaan Akhir / Sertifikasi kegiatan KSM Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Proposal Layak.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Akhir (Sertifikasi) maka dinyatakan bahwa kegiatan berikut:

Uraian Kegiatan	Rekomendasi Kelayakan
1. Jenis Prasarana/Sarana : <u>PEMBUKTAN BAKSAMPAH</u>	<p align="center">TIDAK LAYAK / LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN / LAYAK</p> <p align="center">(Pilih sesuai hasil Pemeriksaan Akhir / Sertifikasi)</p>
2. Ukuran : <u>1.00 x 1.20 x 0.8</u>	
3. Volume : <u>9 UNIT</u>	
4. Lokasi : <u>RT.05.1.02.03.04.05.06.08.09</u>	
5. Nilai Kegiatan	
a. Swadaya : <u>Rp. 1.500.000</u>	
b. BLM P2KP : <u>Rp. 9.000.000</u>	
c. APBD/Lainnya : <u>Rp.</u>	
d. TOTAL (a+b+c) : <u>Rp. 10.500.000</u>	
6. Nama KSM : <u>B.A.T.A.U.A.</u>	
7. Nama TPP-RW : <u>Rw. 03</u>	
8. Nama BKM : <u>KOTA TOEA</u>	
9. Kelurahan : <u>ROA MALAKA</u>	

Secara lengkap hasil Pemeriksaan Akhir (Sertifikasi) terlampir (Form S.1, S.2 dan KS).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

JAKARTA, tgl. 07 JUNI 2011

Tim Sertifikasi :

Ketua UPL,
NASRULLOH

Ketua KSM,
SUTRISNO

Faskel Teknik
(EDSON MAGFOLLUS)

Senior Fasilitator
(.....)

Mengetahui
Askorkot Infrastruktur

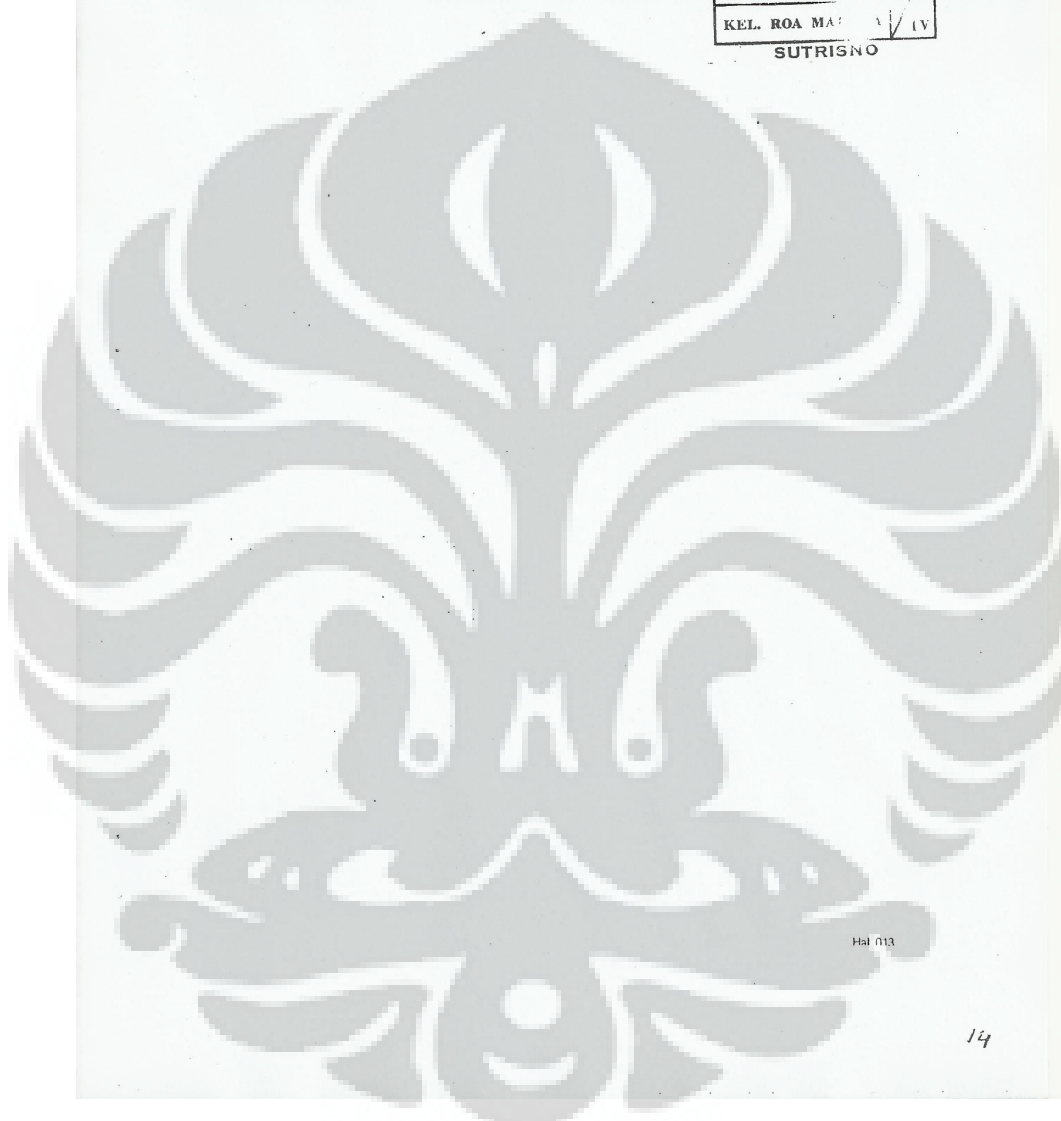
(.....)

Hal 02

Mengetahui/Saksi-saksi:

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	HURHARYANTO S. Spt.	Lurah/Kades	<i>[Signature]</i>
2	SUAEB	Ketua RW	<i>[Signature]</i>
3	SUTRISNO	Ketua RT	<i>[Signature]</i>
4	DULAMIN	To Mas/Mewakili	<i>[Signature]</i>

B.W. 03/11 JB
 KEL. ROA MA...
 RT. 001 SUA...
 KEL. ROA MA... IV
 SUTRISNO



Hal 013

SERTIFIKASI INFRASTRUKTUR

Form : S.1

Nama KSM : BATAVIA Desa/Kelurahan : ROA MALAKA
 Jenis Kegiatan : PEMBUKTIAN/BAKSAMPAN Kecamatan : TAMBORA
 Volume : 9.441T Kota/Kabupaten : Jakarta Barat
 Progres Fisik saat ini : 100 % KMW/Provinsi : DKI Jakarta

Berilah tanda (√) pada Kolom "Ya/Tidak" yang sesuai

No	BUTIR SERTIFIKASI	PENILAIAN		CATATAN
		YA	TIDAK	
A. CAPAIAN KUALITAS PROSES & PEMANFAATAN				
1	Apakah KSM sudah memperoleh penjelasan mengenai cara perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan ?	✓		
2	Apakah kelayakan Teknik Kegiatan KSM telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim KMW ?	✓		
3	Apakah KSM melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian bahan yang diterima dengan spesifikasi teknik/contoh yang disetujui konsultan ?	✓		
4	Apakah pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja/tukang yang memahami cara melakukan pekerjaan?	✓		
5	Apakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikan keamanan/kenyamanan bagi pemakai ?	✓		
6	Apakah bangunan dapat berfungsi/bermanfaat ?	✓		
7	Apakah prosedur penanganan dampak telah dilaksanakan dengan baik/terpenuhi? (Jawaban pertanyaan ini berdasarkan hasil ceklist pengaman dampak/Form S.2)	✓		
8	Apakah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana dari KSM ?	✓		
9	Apakah KSM telah membentuk dan menyepakati Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana (termasuk aturan main pengelolaan O & M) ?	✓		
10	Apakah KSM telah membuat dan menyepakati Rencana Kerja Pemeliharaan?	✓		

B. CAPAIAN KESESUAIAN VOLUME & KUALITAS PEKERJAAN

Total Realisasi Volume Pekerjaan s.d saat ini adalah 9.441T dan hasil Pemeriksaan Kegiatan sbb :

No	URAIAN KEGIATAN	KESESUAIAN VOLUME	CACAT & KEKURANGAN	REKOMENDASI PERBAIKAN
1	PAPAN PROYEK	YA		
2	GALIAN PONDASI	YA		
3	PASANG PONDASI IPEKRS	YA		
4	PASANG BATA MERAH	YA		
5	PLESTERAN TEBAL ISIRAN	YA		
6	COR LANTAI	YA		
7	TUTUP BAK SAMPAH	YA		
8	CAT DINDING	YA		
9	PEJAS TIKES'ATAN	YA		
Dst				

Hal. 07

C. PEMANFAATAN DANA BLM & CAPAIAN SWADAYA MASYARAKAT

- a. Nilai BLM (SP3 s.d perubahan, terakhir (bila ada)) : Rp. 9.000.000
b. Jumlah dana SP3 yang telah terserap dari BKM : Rp. 9.000.000
c. Sisa dana SP3 (a-b) : Rp. 0
d. Jumlah Nilai Target Swadaya : Rp. 1.500.000
e. Jumlah Nilai Realisasi Swadaya : Rp. 1.500.000
f. Prosen Raelalisasi Swadaya terhadap total nilai Kegiatan (dx100/e) : 100 %

Kesimpulan & Rekomendasi :

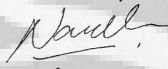
TIDAK LAYAK / LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN / LAYAK

Demikian hasil Serifikasi ini dibuat dalam keadaan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ada ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SPPB BLM & SP3.

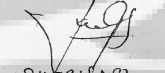
JAKARTA, 9 Juni - 2011.

Tim Serifikasi :


Ketua UPL,


(W.A.S. GALLOH)

Ketua KSM


(SUTRISNO)

Faskel Teknik


EDWIN MAFRIELIARD

Senlor Fasilitator

(.....)

Mengetahui

Askorkot Infrastruktur

Catatan : Lampirkan Copy Pernyataan KSM (Kontrak Sosial) & Ceklist Prosedur Pengamanan Dampak

Hal. 08

CEKLIST PENGAMANAN DAMPAK

Nama KSM : BATAVIA Desa/Kelurahan : ROA MALAKA
 Jumlah Anggota (Org) : 3 (L: 2..P: 1...) Kecamatan : JAMBARA
 Jenis Kegiatan : 1. PEMBUKTAN BAKSAMI Kota/Kabupaten : Jakarta Barat
 2. PAH KMW/Provinsi : DKI Jakarta

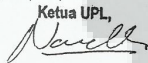
Berilah tanda (✓) pada pernyataan "Ya/Tidak" yang sesuai

No	Butir Pertanyaan	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	a. Apakah ada Dampak Negatif terhadap Lingkungan ?		✓
	b. Jika ada dampak (poin 1.a), Apakah Dibuat dan dilakukan Pemeriksaan terhadap Tindakan Penanganan Dampak yang diperlukan?	✓	
2	a. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan tanah/tanaman produktif penduduk		✓
	b. Jika ada dampak (poin 2.a), Apakah tanah/tanaman tersebut telah dimusyawahkan dan disepakati untuk dihibahkan (Ada-BAny) ?		
	c. Jika tidak dihibahkan (poin 2.b), Apakah telah dimusyawahkan dan disepakati bentuk ganti rugi dan ada orang yang bertanggungjawab membiayai biaya ganti rugi tanah/tanaman tersebut?		
3	a. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk atau pemukiman kembali penduduk ?		✓
	b. Jika ada dampak (poin 3.a), Apakah telah dimusyawahkan dan disepakati bentuk kompensasi/ganti rugi dan orang yang bertanggungjawab membiayai biaya ganti rugi tersebut ?		
4	a. Apakah ada dampak negatif terhadap social-budaya dan adat istiadat masyarakat setempat?		✓
	b. Jika ada dampak (poin 4.a), Apakah telah dimusyawahkan dan disepakati rencana penanganan-nya?	✓	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa hasil penilaian tersebut di atas adalah sah dan benar. Bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SPPB BLM & SP3.

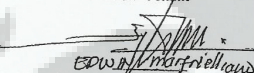
JAKARTA, 7 - JUNI - 2011...

Tim Sertifikasi :

Ketua UPL,

 (N. S. RULLOH)

Ketua KSM

 (S. R. KASO)

Faskel Teknik

 EDWIN MATARIELAUD

Senior Fasilitator

Mengetahui
 Askorkot Infrastruktur

**PERNYATAAN KSM
(Kontrak Sosial)**

Form : KS

Nama KSM : *BATADIA* Desa/Kelurahan : *ROAMACAKA*
 Jumlah Anggota (Org) : *5* (L: *3*, P: *2*) Kecamatan : *TAMBORA*
 Jenis Kegiatan : 1. *PEMBUATAN BAK. SAMPAH* Kota/Kabupaten : *Jakarta Barat*
 2. KMW/Provinsi : *DKI Jakarta*

Berilah tanda (✓) pada pernyataan "Ya/Tidak" yang sesuai

No	Butir Pernyataan	Checklist	
		Ya	Tidak
1	Desain teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Disetujui oleh fasilitator (Tim KMW).	✓	
2	Dilakukan Musyawarah KSM untuk : Penetapan Harga Satuan, Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K), Pengadaan Bahan/Alat, Pembentukan Tim Pengelola Pemeliharaan (sesuai ketentuan P2KP).	✓	
3	KSM sudah mendapat penjelasan (atau pelatihan) dari fasilitator kelurahan mengenai teknik & administrasi perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun pemeliharaan yang benar.	✓	
4	Dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran kesesuaian spesifikasi teknik (jenis, ukuran, kualitas, volume) dari tiap jenis material/alat dan hasil pekerjaan (opname) dilapangan	✓	
5	Melaksanakan prosedur penanganan dampak sesuai ketentuan program.		
6	Bersedia membongkar atau memperbaiki pekerjaan yang sedang/sudah dibangun atas biaya sendiri bila ternyata tidak sesuai dengan persyaratan teknik yang diwajibkan.	✓	
7	Membuat dan mengarsipkan laporan-laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dipersyaratkan P2KP dan kebenarannya diperiksa/Disetujui oleh UPL dan Fasilitator Kelurahan.	✓	
8	Melakukan Musyawarah Pertanggungjawaban untuk melaporkan hasil kegiatan dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan bersama UPL/TPP-RW, BKM dan Anggota KSM.	✓	
9	Tidak ada Indikasi penyalahgunaan dana BLM	✓	
10	Organisasi Pemanfaatan & Pemeliharaan (Tim Pengelola) sudah siap mengambil alih Pengelolaan Pemeliharaan sarana & prasarana yang dibangun.	✓	

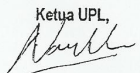
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut di atas adalah sah dan benar. Bila ternyata kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SPPB BLM & SP3.



[Signature] JAKARTA, 7 2011.....
[Signature] QUTRISASO

Ketua KSM :
 Anggota 1 (L) : *R.A.A. QADINIS*
 Anggota 2 (L) : *A.N.P.R.Y.*
 Anggota 3 (L) : *MUBAKIR*
 Anggota 4 (P) : *MURAH ASIH*
 Anggota 5 (P) : *RATIAN*

Tim Sertifikasi :


Ketua UPL,

(S.A.RULLAH.)

Ketua KSM

(S.U.R.I.S.A.O.)

Faskel Teknik

Senior Fasilitator


EDWIN MARFRIELIAN

Mengetahui
Askorkot Infrastruktur

Hal. 011

19



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAP2)

Nomor :007/BAP2/TPP.R.W.03/VI/2011

Pada hari ini, SELASA tanggal 7 bulan JULI tahun 2011, kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : SUKLIMAN
Jabatan : Koordinator Tim Pengendali Program (TPP) RW: 03
Kelurahan ROAMALAKA, Kecamatan TAMBORA, Kota JAKARTA BARAT
Alamat Jln. TIANG BENDERA RAYA RT.001/03 ROAMALAKA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : SUTRIKNO
Jabatan : Ketua KSM : BATAVIA
Kelurahan ROAMALAKA, Kecamatan TAMBORA, Kota JAKARTA BARAT
Alamat Jln. TIANG BENDERA RAYA RT.001/03 ROAMALAKA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian Penyaluran Dana- Lingkungan (SPPD-L)/Perubahan terakhir
Nama Pekerjaan : PEMBUATAN BAK SAMPAH
Volume (sesuai perubahan terakhir) : 9 UNIT
Nomor : 007/SPPD-L/TPP RW 03/VI/2011
Tanggal : 21 DESEMBER 2010
- b. Laporan Bulanan/Akhir Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (Sertifikasi & Kontrak Sosial) yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pihak Pertama dibantu LKM dari Pihak Kedua, dan Konsultan Manajemen Wilayah (TA Infrastruktur/Askot Infrastruktur/Senior Fasilitator/Faskel Teknik *), disepakati :

1. Pihak Kedua (KSM) telah membentuk organisasi (Pengelola) Pemanfaatan & Pemeliharaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun;
2. Status Penyelesaian Fisik Pekerjaan oleh Pihak Kedua (KSM) adalah *):
 - a. Realisasi Fisik seluruh pekerjaan telah selesai 100 %;
 - b. Realisasi Fisik seluruh pekerjaan telah selesai 100 %; sesuai dengan hasil Sertifikasi & Kontrak Sosial dinyatakan 'Layak' (terlampir).



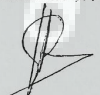
3. Status pencairan dana BLM pada saat pemeriksaan sebagai berikut :
- Nilai SPPD-L (s/d Perubahan Terakhir (Bila ada)) : Rp. 7.000.000.....
 - Jumlah dana SPPD yang telah terserap dari TPP-RW: Rp. 3.000.000.....
 - Sisa dana SPPD-L (a-b) : Rp. 0.....
4. Capaian atas kemanfaatan/fungsi infrastruktur yang dibangun terhadap tujuan awalnya *)
- Tercapai Tidak Tercapai
5. Umur rencana pemanfaatan bangunan *) :
- Kurang Dari 3 Tahun Antara 3 – 5 Tahun Lebih Dari 5 Tahun
6. Data sisa bahan/alat kerja*):

No.	Jenis Bahan / Alat	Sat	Vol	Kondisi (Layak Pakai/Tidak Layak)*
	CAT TEMBOK	Kg	3	
	EMBER	Biji	5	
	KWAR.	Bh	4	
	PACUL	Bh	2	

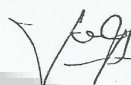
Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini Kami buat rangkap 2 (dua) dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak maupun, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Jakarta, 2 - JUN 2011

PIHAK PERTAMA
 Koordinator TPP-RW 3


 (SUKIMAN.....)

PIHAK KEDUA
 Ketua KSM BATAVIA


 (SUTRISNO.....)



KONSULTAN MANAJEMEN WILAYAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PMM MANDIRI PERKOTAAN OC-3
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 Telp/Fax : (021) 7238542
e-mail : krmw.jakarta@yahoo.com



Mengetahui :

Koordinator LKM

(*AWA Huma, E. D. I.*)

Disetujui Oleh:
Konsultan Manajemen Wilayah

Faskel Teknik

Senior Fasilitator

Askoel Infrastruktur

(*Edo M. Marriadi*)

(.....)

(.....)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN
(BASTP2)**

Nomor : 002/BASTP2/TPP RW 03/VI/2011

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal 7.....bulan Juni tahun 2011 kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : OUKIMAN
Jabatan : Koordinator Tim Pengendali Program (TPP) RW: 03
Kelurahan ROAMALAKA, Kecamatan JEMBARA, Kodya JAKARTA BARAT
Alamat JUNTAH BENDERA RAYA PAD. RW. 03 ROAMALAKA
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : SUTIKNO
Jabatan : Ketua KSM : ROAMALAKA
Kelurahan ROAMALAKA, Kecamatan JEMBARA, Kodya JAKARTA BARAT
Alamat JUNTAH BENDERA RAYA PAD. RW. 03 ROAMALAKA
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) :
Nama Pekerjaan : PEMBUATAN BAK SAMPAH
Volume Realisasi : 9 UNIT
Nomor : 002/BAP2/TPP RW 03/VI/2011
Tanggal : 7 JUNI - 2011
- b. Sertifikasi Infrastruktur :
Tanggal : 02 - JUNI - 2011
- c. Struktur Organisasi Operasional dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Infrastruktur yang telah di bentuk (copy terlampir)

PIHAK PERTAMA menyerahkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Infrastruktur kepada **PIHAK KEDUA** secara rutin maupun berkala agar sarana & prasarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tugas Pengelola :

1. Menyusun rencana pemanfaatan sarana & prasarana.
2. Menyusun rencana penerimaan dan belanja pengelola setiap tahun.
3. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbalkan dan peningkatan pembangunan sarana & prasarana.
4. Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbalkan dan peningkatan pembangunan sarana & prasarana.



5. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelola Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun metode Pemanfaatan dan Pemeliharaan yang direncanakan sebagai berikut :

1. Sistem Pemeliharaan

a. Metode Pemeliharaan :

- Gotong Royong Semi Gotong Royong Kerjasama Pihak Ketiga

b. Jadwal Pemeliharaan :

- Setiap Minggu Setiap Bulan Triwulan

2. Sistem Perbaikan

a. Metode Konstruksi :

- Gotong Royong Semi Gotong Royong Kerjasama Pihak Ketiga

b. Sumber Dana :

- Iuran Warga Bantuan dari Pemerintah Desa/Kel
 Pihak Lain (tidak mengikat) Usaha lain dari pengurus yang sah

Demikian Berita Acara ini kami buat rangkap (.....) dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun; untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PIHAK KEDUA
KSM

[Signature]
(.....)

PIHAK PERTAMA
Koordinator TPP-RW-23

[Signature]
(.....)

Mengetahui :
Konsultasi Manajemen Wilayah

Faskel Teknik

Senior Faskel

Askot Infrastruktur

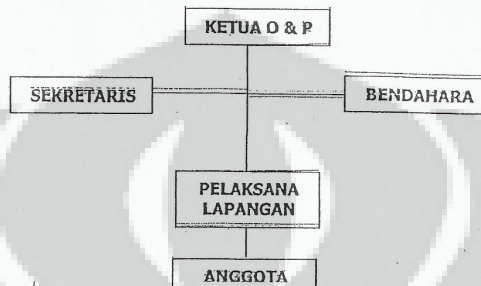
[Signature]
(.....)

(.....)

(.....)



STRUKTUR ORGANISASI
OPERASIONAL dan PEMELIHARAAN (O & P)



SUSUNAN TIM O & P:

No	NAMA	POSISI
1.	SUTRI SAND	Ketua/Penanggungjawab
2.	RAN OBING	Sekretaris
3.	ANDRY	Bendahara
4.	MU DAKIR	Pelaksana Lapangan
5.	PARMIN	Logistik/Pengadaan

Susunan Organisasi O & P dapat disesuaikan dengan kondisi Lapangan/SDM O & P

Tugas-tugas dari setiap unit kerja tersebut, adalah :

- 1) **Ketua**, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas :
 - > Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P
 - > Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah
 - > Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.
 - > Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana.
 - > Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola;



- > Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat;
 - > Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya).
- 2) **Sekretaris atau bagian administrasi**, melaksanakan kegiatan administrasi umum/ketatausahaan O&P, antara lain mencakup :
- > Menyiapkan surat menyurat
 - > Mengarsip surat masuk dan surat keluar
 - > Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan
 - > Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat
 - > Menginventarisasi anggota atau warga pemanfaat
- 3) **Bendahara atau bagian Keuangan**, melaksanakan :
- > Menerima dan menyimpan uang/dana O&P;
 - > Mengeluarkan uang dengan persetujuan ketua
 - > Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran
 - > Mencatat pembukuan keuangan O&P
 - > Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- 4) **Petugas Lapangan atau bagian Teknik**, melakukan :
- > Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana,
 - > Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana,
 - > Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga;
 - > Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.
- 5) **Anggota :**
- > Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan;
 - > Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola
 - > Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan
 - > Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan
 - > Memikirkan dan mengusahakan pengembangan organisasi O&P
 - > Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

REALISASI PENYUNGGAN DAN BANGUNAN

Mulai Tanggal : 01/01/2011

Kota Administrasi : Jakarta Barat
 Kecamatan : Tambora
 Kelurahan : Roa Malaka
 Nama KSM : Batavia

Jenis Kegiatan : Pembangunan Sak Sampah
 Volume : 8 Unit
 No. SPPD-L :
 Lokasi : RW 03 Roa Malaka

No	Rincian Penggunaan (Tenaga Kerja/Bahan/Alat/Adm)	Satuan	Total Rencana			Termin I (50%)			Termin II (40%)			Termin III (10%)			Total		
			Volume	Jumlah Biaya	(Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)		
A. Tenaga Kerja																	
1	Ketua Lapangan	Hok	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tukang	Hok	18,32	1.282.050	9,00	630.000	9,00	630.000	9,00	630.000	9,00	630.000	9,00	630.000	9,00	630.000	1.260.000
3	Pengraji	Hok	20,00	959.775	11,00	550.000	11,00	550.000	11,00	550.000	11,00	550.000	11,00	550.000	11,00	550.000	1.100.000
4	Bongkar	Hok	1,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,911,825,00		1,130,000												2.660.000
B. Bahan																	
1	Nutpaks 5 mm	Lbr	1,00	100,000	1,00	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
2	Kaso Meranti uk. 4/6	Btg	1,00	20.000,00	1,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
3	Digital Printing	Ls	1,00	50.000,00	1,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4	Beton Tumbuk	Ls	2,00	20.000,00	2,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
5	Bata Merah	Bh	6.636,00	1.860.875,00	2.000,00	840.000	840,00	336.000	840,00	336.000	840,00	336.000	840,00	336.000	840,00	336.000	1.176.000
6	Semen 30 kg	Zbk	34,88	1.881.792,00	13,00	715.000	5,00	275.000	5,00	275.000	5,00	275.000	5,00	275.000	5,00	275.000	990.000
7	Plaster 30 kg	Zbk	10,00	200.000,00	4,00	80.000	2,00	40.000	2,00	40.000	2,00	40.000	2,00	40.000	2,00	40.000	120.000
8	Pasir Kasan	m3	2,11	421.200,00	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	400.000
9	Spatul uk. 1/2	ms	3,52	704.000	2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	400.000	800.000
10	Plester	Kg	6,40	54.000,00	3,00	270.000	3,00	270.000	3,00	270.000	3,00	270.000	3,00	270.000	3,00	270.000	540.000
11	Cat Dinding Tertutup 2 x	Kg	8,10	121.500,00	4,00	56.000	4,00	56.000	4,00	56.000	4,00	56.000	4,00	56.000	4,00	56.000	224.000
12	Misa Terablon/Alnik. 20 x 30 cm	Bh	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
13	Pewesegala ukuran. 7-9"	Kg	1,58	22.050,00	1,58	22.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.050,00
14	Papan Cor 230 x 13 x 1	Btg	0,11	74.970,00	0,11	74.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.970,00
15	Batu bata 230	Btg	1,00	200.000,00	1,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
			6.217.687,00		2.980.000												5.796.500
C. Alat Kerja																	
1	lembar	Bh	10,00	50.000,00	7,00	35.000,00	3,00	15.000,00	3,00	15.000,00	3,00	15.000,00	3,00	15.000,00	3,00	15.000,00	45.000,00
2	meistar 5m	bh	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
3	espe hifi	Bh	3,00	9.000,00	2,00	6.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	6.000,00
4	benang	Bh	3,00	9.000,00	2,00	6.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	6.000,00
5	campok	Bh	3,00	9.000,00	2,00	6.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	6.000,00
6	kuas	Bh	3,00	9.000,00	2,00	6.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	6.000,00
			66.000,00		190.000												190.000
D. Administrasi																	
1	Biaya proposal & LPJ (hidat + rmtbl)	Ls	1,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
2	Biaya foto esez	Ls	1,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00
3	Biaya ATK	Ls	1,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4	Biaya dokumentasi	Ls	1,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
5	Biaya materi	Bh	1,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
			415.000,00		415.000,00												415.000,00
JUMLAH TOTAL (Rp)			8,000,000		4.350,000												9,000,000
					2.816,500												1.883,500

No	Revisi/Perubahan (Tempat & %/Barang/Jumlah)	Saluran	Total Rencana			Total Li OKS			Total		
			Volume	Jumlah Biaya	Volume (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Volume	Jumlah Biaya (Rp)		
			(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)
1	Konstruksi Kandang		1.00	120,000.00	1.00	120,000.00					
2	Pelatihan		1.00	300,000.00	1.00	300,000.00					
3	Perawatan		1.00	200,000.00	1.00	200,000.00					
4	Perawatan		1.00	200,000.00	1.00	200,000.00					
			1.00	1,480,000.00	1.00	1,480,000.00					
B. Bahan											
1	Kayu		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
2	Kayu		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
3	Pasir		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
4	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
5	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
6	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
7	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
8	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
9	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
10	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
11	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
12	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
13	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
14	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
15	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
16	Urea		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00					
C. Pakan											
1	Pakan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
2	Pakan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
3	Pakan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
4	Pakan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
5	Pakan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
D. Administrasi											
1	Bahan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
2	Bahan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
3	Bahan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
4	Bahan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
5	Bahan		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
E. Gaji/Tenaga											
1	Gaji		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
2	Gaji		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
3	Gaji		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
4	Gaji		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
5	Gaji		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
F. Lainnya											
1	Lainnya		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
2	Lainnya		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
3	Lainnya		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
4	Lainnya		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
5	Lainnya		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00					
Jumlah Total (Rp)											
			1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00					
			1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00					

REALISASI DANA	
U PAKIAN	TOTAL REALISASI (Rp)
1.00	215,000.00
1.00	285,000.00
1.00	485,000.00
Jumlah Total (Rp)	
1.00	1,500,000.00

* Ditetapkan dan disetujui dengan realisasi lapangan
 * Ditandatangani sebagai lampiran pencatatan teknis ini

Disetujui oleh:
 Kepala Dinas
 (Tanda Tangan)
 Disetujui oleh:
 Kepala Kantor
 (Tanda Tangan)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perkotaan)


KOTA / KABUPATEN : JAKARTA BARAT

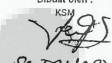
No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME RENCANA A	BOBOT RENCANA (%)	REALISASI VOLUME PEKERJAAN								
					Termin I (50%)		Termin II (40%)		Termin III (10%)		Total		
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(4x5)	(8)	(9)=(8)/(4x5)	(10)	(11)=(10)/(4x5)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)	
PEKERJAAN													
PEMBANGUNAN BAK SAMPAH													
LOKASI													
RW 03 Roa Malaka													
TANGKAI ANGGARAN													
thp I 2010													
TANGGAL MULAI PEKERJAAN													
30 Desember 2010													
					TOTAL DANA BLM				Rp 9,000,000				
					PROGRESS TERMIN I , TANGGAL : 30 / 12 / 2011				NAMA KSM				
					PROGRESS TERMIN II , TANGGAL : 18 / 1 / 2011				B A T A V I A				
					PROGRESS TERMIN III , TANGGAL : 26 / 1 / 2011				Nama KSM				
									KOTA TOEA				
									Alamat				
									Roa Malaka Tambora Jakarta Barat				
Pekerjaan Persiapan 1. Papan Nama Proyek uk 60 x 90 2. Pembersihan Lapangan Pekerjaan galian 1. Galian tanah Pondasi 2. Pasangan Tanah 450mm Pekerjaan Pasangan & Plesteran 1. Pasangan Pondasi batu bata 1 pc : 5 Ps 2. Pasangan Bata Merah tebal 1 bata 1 pc : 5 ps 3. Plesteran 1 Pc : 4Ps, tebal 15 mm Pekerjaan Lantai 1. Cor Beton t = 7 cm Pekerjaan Penutup bak sampah Pekerjaan Finishing 1. Cat Dinding ex Romantor Pekerjaan Prasasti 1. Prasasti Kegiatan Pekerjaan Lain-lain 1. Perakitan 2. Administrasi 3. Dana Tunai 4. Tanah / Tanaman 5. Koneksi													
JUMLAH			100.00%	52.69%	42.12%	5.15%	100.00%						


*Data volume realisasi pekerjaan sesuai dengan progress lapangan
 *Dipergunakan sebagai lampiran pencairan termin IIIII

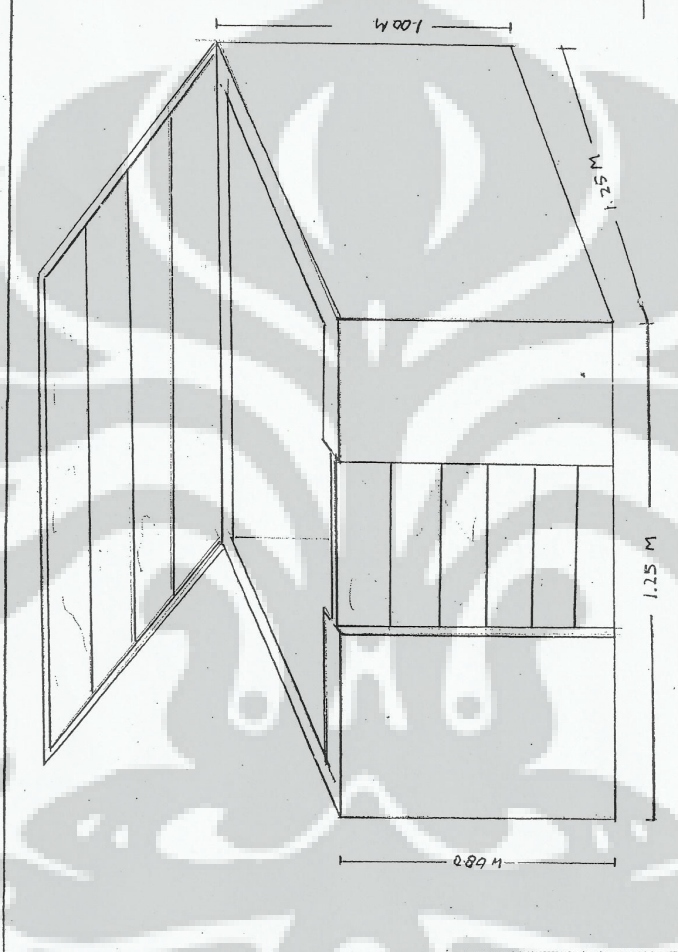
Divertifikasi :
 Fasilitator

 E. W. M.

Dipantau :
 UPL TPP-RV

 M. R. S.

Dibuat oleh :
 KSM

 S. P. W.

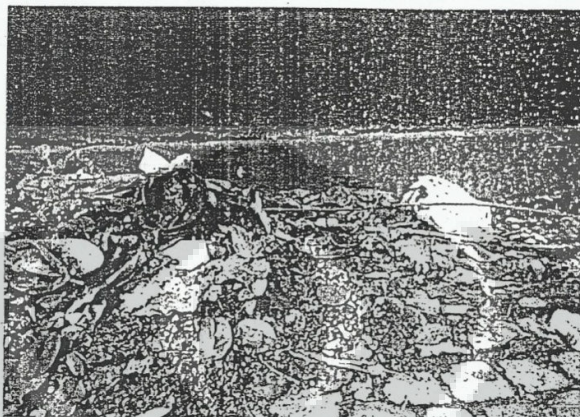
	Program Nasional Peningkatan Masyarakat - Mandiri Perkotaan
	Kawasan Manajemen Wilayah Provinsi Banten dan DKI Jakarta
Provinsi :	Kota Adm / Kab :
Kecamatan :	Desa / Kelurahan :
Kelurahan :	Jenis Kegiatan :
RENCANA BANGUNAN	SKEMA
JUDUL GAMBAR :	DIBUAT OLEH :
GAMBAR REALISASI	KSM
Diverifikasi/Disetujui Oleh :	(S. Susilowati)
(S. Susilowati)	(S. Susilowati)
Fasilitas Teknik	(S. Susilowati)



The drawing shows a perspective view of a building with a gabled roof. The dimensions are: a width of 1.00 M, a depth of 1.25 M, a height of 1.25 M, and a base width of 0.80 M. The building has a central entrance and a staircase on the right side.



PHOTO 0%



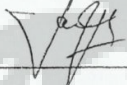
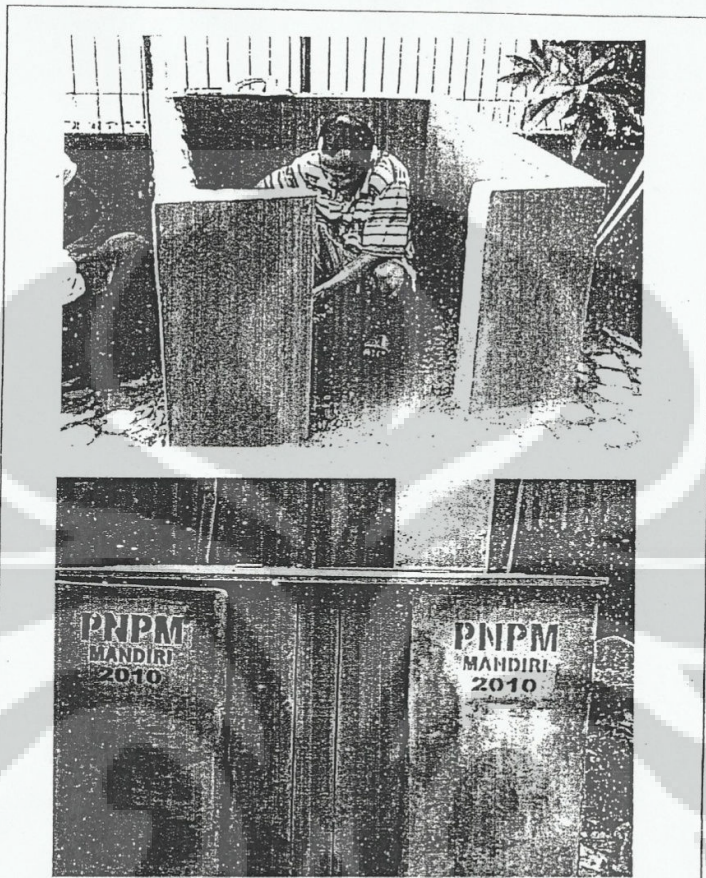
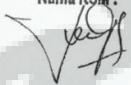
Nama KSM :	Nama Kegiatan :	Lokasi Kegiatan :
	Pembuatan bak sampah	Tpp R 03



PHOTO 100%



Nama KSM : 	Nama Kegiatan : Pembuatan BAK -SAMPAH	Lokasi Kegiatan : TPP RW 03
---	--	--------------------------------




 		PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA BLM TAHAP 1 TAHUN 2010	
LKM "KOTA TOEA" TPP - RW.03 KEL. ROA MALAKA, KEC. TAMBORA, JAKARTA BARAT			
NAMA KSM	:	BATAVIA	
NAMA KEGIATAN	:	PEMBUATAN BAK SAMPAH	
VOLUME KEGIATAN	:	9 TITIK SETIAP RT BAK SAMPAH	
PAGU ANGGARAN	:		
BLM	:	Rp. 9.000.000,-	
SWADAYA	:	Rp. 1.500.000,-	
PEMDA	:	-	
TOTAL	:	Rp. 10.500.000,-	
LOKASI KEGIATAN	:	Di Setiap RT, RT.01 s/d 09, RW.03, KEL. ROA MALAKA	
WAKTU PELAKSANAAN	:	12 HARI KERJA	
PENERIMA MANFAAT	:	360 KEPALA KELUARGA	
PENANGGUNG JAWAB	:	Bp. SUTRISNO	
PELAKSANA	:	HP. 087 88 7860 800	

FOTO PAPAN KEGIATAN



 		PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PROVINSI DKI JAKARTA BLM TAHAP 1 TAHUN 2010
LKM KOTA TOEA TPP-RW 03 KEL. ROA MALAKA, KEC. TAMBORA JAKARTA BARAT		
NAMA KSM	:	BATAVIA
JENIS KEGIATAN	:	PEMBUATAN BAK SAMPAH
PENANGGUNG JAWAB	:	SUTRISNO

FOTO PRASASTI KEGIATAN